

PROFIL GENDER KOTA SEMARANG TAHUN 2025 DENGAN ANGGARAN TAHUN 2026



DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

Jl. Prof. Soedarto No. 70

Kelurahan Sumurboto, Kecamatan Banyumanik

Kota Semarang, Jawa Tengah 50269

KATA PENGANTAR

Puji syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas segala rahmat dan karunia-Nya sehingga Profil Gender Kota Semarang Tahun 2025, dengan Anggaran Tahun 2026, dapat diselesaikan dengan baik. Profil Gender Kota Semarang disusun sebagai sumber data dan informasi yang memberikan gambaran mengenai capaian pembangunan, kondisi kesenjangan gender, serta berbagai isu strategis yang masih memerlukan perhatian.

Penyusunan profil ini merupakan hasil sinergi berbagai Organisasi Perangkat Daerah, instansi vertikal, Badan Pusat Statistik, serta pemangku kepentingan lainnya yang telah memberikan dukungan melalui penyediaan data dan informasi. Atas kerja sama dan kontribusi tersebut, kami menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya.

Kami menyadari bahwa dokumen ini masih memiliki keterbatasan, terutama terkait ketersediaan dan kelengkapan data pada beberapa sektor pembangunan. Oleh karena itu, kritik, saran, dan masukan yang membangun sangat diharapkan sebagai bahan penyempurnaan penyusunan Profil Gender pada masa yang akan datang.

Akhirnya, kami berharap Profil Gender Kota Semarang Tahun 2025 ini dapat memberikan manfaat sebagai salah satu instrumen penyediaan data gender yang akurat dan terpercaya, serta menjadi landasan dalam mewujudkan pembangunan yang lebih responsif gender, berkeadilan, dan berkelanjutan demi meningkatkan kualitas hidup masyarakat Kota Semarang.

Semarang, 24 Agustus 2026

Kepala,



PRANYOTO, A.P.,M.M
Pembina Tk.I/ IV-b
NIP 197703281996021002

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	iii
BAB I	1
PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Maksud dan Tujuan	5
1.3 Dasar Hukum	5
1.4 Sasaran	7
1.5 Ruang Lingkup	7
1.6 Metodologi Penyusunan	8
1.7 Sumber Data	9
1.8 Sistematika Penulisan	9
BAB II LANDASAN TEORI DAN KONSEP GENDER	10
2.1 Pengertian Gender	10
2.2 Kesetaraan dan Keadilan Gender	12
2.3 Ketimpangan Gender	12
2.4 Pengarusutamaan Gender	15
2.5 Data Gender dan Data Terpilah	17
2.6 Indikator Pembangunan Gender	17
BAB III PROFIL KOTA SEMARANG	18
3.1 KONDISI UMUM KOTA SEMARANG	18
3.2 Luas dan Batasan Wilayah Administrasi	19
3.3 Letak dan Kondisi Geografis	22
3.4 Topografi	23
3.5 Kependudukan	25
BAB IV PROFIL GENDER KOTA SEMARANG	32
4.1 INDEKS KETIMPANGAN GENDER (IKG)	33
4.2 Gender dan Bidang Pendidikan	51
4.3 Gender Bidang Kesehatan	64

4.4 Profil Gender Bidang Politik dan Pengambilan Keputusan	81
4.5 Profil Gender Bidang Ekonomi dan Ketenagakerjaan	84
4.6 Gender Bidang Perlindungan dari Kekerasan.....	106
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN.....	144
5.1 Kesimpulan	144
5.2 Saran	146
DAFTAR PUSTAKA.....	149

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Jumlah Penduduk Kota Semarang	25
Tabel 2. Jumlah Penduduk Berdasar Usia	27
Tabel 3. Jumlah Kepala Keluarga Menurut Jenis Kelamin	29
Tabel 4. Jumlah Penduduk Disabilitas di Kota Semarang	31
Tabel 5. Indeks Ketimpangan Gender Kota Semarang	33
Tabel 6. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Menurut Jenis Kelamin	35
Tabel 7. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Menurut Jenis Kelamin ..	37
Tabel 8. Angka Harapan Hidup (AHH) Menurut Jenis Kelamin	40
Tabel 9. Pengeluaran Riil per Kapita Menurut Jenis Kelamin (Ribuan Rupiah)	42
Tabel 10. Indeks Pembangunan Gender (IPG)	45
Tabel 11. Rata-Rata Lama Sekolah Menurut Jenis Kelamin	47
Tabel 12. Angka Harapan Lama Sekolah (HLS) Menurut Jenis Kelamin	49
Tabel 13. Jumlah Lembaga PAUD Terakreditasi.....	52
Tabel 14. Tingkat Partisipasi Warga Usia Sekolah di Kota Semarang Dalam Pendidikan.....	53
Tabel 15. Rasio Guru/Murid.....	56
Tabel 16. Angka Partisipasi Sekolah (APS) menurut Kelompok Umur (7-23)	57
Tabel 17. Angka Partisipasi Kasar (APK) menurut Jenjang Pendidikan ..	59
Tabel 18. Angka Partisipasi Murni (APM) menurut Jenjang Pendidikan ..	61
Tabel 19. Angka Partisipasi Murni (APM)	63
Tabel 20. Data Kesehatan Ibu dan Anak di Kota Semarang	65
Tabel 21. Jumlah Kunjungan Pasien ke Puskesmas di Kota Semarang	71
Tabel 22. Layanan KB Pada Pasangan Usia Subur	75
Tabel 23. Jumlah Catin yang Menerima Bimbingan Kesehatan	77

Tabel 24. Kunjungan Pemeriksaan Kesehatan Mental Menurut Jenis Gangguan.....	80
Tabel 25. Perempuan Dan Pengambil Keputusan.....	82
Tabel 26. Pekerjaan Terbanyak Menurut Jenis Kelamin	86
Tabel 27. Ketenagakerjaan dan Ekonomi.....	92
Tabel 28. Jumlah Tenaga Kesehatan	95
Tabel 29. Jumlah Guru dan Kepala Sekolah di Kota Semarang.....	97
Tabel 30. Jumlah Pegawai Negeri Sipil di Kota Semarang.....	98
Tabel 31. Perempuan Koperasi dan UMKM	101
Tabel 32. Layanan Sosial Kota Semarang	106
Tabel 33. Jumlah Korban dan Kasus Kekerasan Pada Perempuan dan Anak	109
Tabel 34. Jumlah Perempuan dan Anak Bermasalah Hukum di PPA Polrestabes.....	140
Tabel 35. Kegiatan Penanganan Anak Bermasalah Hukum.....	143

DAFTAR GRAFIK

Grafik 1. Jumlah Korban Kekerasan Menurut Jenis Kelamin.....	111
Grafik 2. Jumlah Kasus Berdasarkan Jenis Kasus	113
Grafik 3. Jumlah Kasus Per Kecamatan	115
Grafik 4. Jumlah Kasus Berdasarkan Tempat Kejadian	118
Grafik 5. Jumlah Kasus Berdasarkan Layanan Yang Diberikan	121
Grafik 6. Jumlah Kasus Berdasarkan Tindak Kekerasan Yang Dialami Korban	123
Grafik 7. Jumlah Korban Berdasarkan Jenis Kelamin Per Kecamatan ..	126
Grafik 8. Jumlah Korban Berdasarkan Kelompok Usia.....	128
Grafik 9. Jumlah Korban Berdasarkan Pendidikan	131
Grafik 10. Jumlah Korban Berdasarkan Pekerjaan.....	134
Grafik 11. Jumlah Korban Berdasarkan Status Perkawinan	137

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pembangunan yang berkeadilan merupakan salah satu prinsip utama dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah. Keadilan tersebut tidak hanya diwujudkan melalui pemerataan hasil pembangunan, tetapi juga melalui pemberian kesempatan, akses, partisipasi, kontrol, dan manfaat yang setara bagi seluruh warga negara, baik laki-laki maupun perempuan. Oleh karena itu, perspektif gender perlu diintegrasikan ke dalam seluruh proses pembangunan agar kebijakan dan program yang dilaksanakan mampu menjawab kebutuhan serta permasalahan masyarakat secara lebih tepat dan inklusif. Hal ini sejalan dengan amanat Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender (PUG) dalam Pembangunan Nasional yang mewajibkan seluruh instansi pemerintah untuk mengintegrasikan perspektif gender dalam perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi pembangunan.

Terkait dengan Instruksi Presiden tersebut, Ibu Dr. Agustina Wilujeng Pramestuti, SS., MM dan Pak Ir. H. Iswar Aminuddin, M.T sebagai Walikota dan Wakil Wali Kota Semarang menindaklanjuti dengan memasukkannya ke dalam visi pemerintahan Kota Semarang, yaitu **"Semarang Semakin Hebat"**, yang diwujudkan melalui berbagai misi pembangunan yang menitikberatkan pada peningkatan kualitas sumber daya manusia, penguatan kesejahteraan masyarakat, tata kelola pemerintahan yang baik, pembangunan ekonomi yang inklusif, serta peningkatan kualitas lingkungan hidup dan pelayanan publik. Pembangunan yang berorientasi pada kesejahteraan masyarakat tidak

akan tercapai secara optimal apabila masih terdapat kesenjangan antara laki-laki dan perempuan dalam memperoleh akses, kesempatan, partisipasi, kontrol, maupun manfaat pembangunan. Oleh karena itu, perspektif gender menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam setiap tahapan pembangunan daerah agar seluruh masyarakat dapat memperoleh kesempatan yang setara untuk berkembang dan berkontribusi dalam pembangunan Kota Semarang.

Komitmen Ibu Walikota terhadap kesetaraan gender tidak hanya diwujudkan melalui peningkatan partisipasi perempuan dalam pembangunan, tetapi juga melalui penguatan kapasitas perempuan sebagai penggerak keluarga dan masyarakat dengan menggandeng organisasi perempuan seperti PKK. Berbagai program yang didukung TP PKK Kota Semarang di bawah kepemimpinan Ibu Ir. Lies Iswar Aminuddin, M.Si menunjukkan bahwa pemberdayaan perempuan, pengasuhan anak yang berkualitas, pendidikan karakter, serta perlindungan anak merupakan fondasi penting dalam mewujudkan pembangunan yang inklusif dan berkeadilan gender.

Di sini tampak pentingnya sinergi antara pemerintah daerah, PKK, dunia usaha, akademisi, organisasi masyarakat, serta seluruh pemangku kepentingan dalam mendorong terwujudnya kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan di Kota Semarang. Kolaborasi berbagai pihak menjadi salah satu faktor penting dalam memastikan bahwa hasil pembangunan dapat dirasakan secara adil oleh seluruh lapisan masyarakat tanpa membedakan jenis kelamin.

Dalam mendukung pelaksanaan Pengarusutamaan Gender, ketersediaan data terpilah berdasarkan jenis kelamin menjadi kebutuhan yang sangat penting. Data gender berfungsi sebagai dasar dalam mengidentifikasi kesenjangan, ketimpangan, maupun capaian pembangunan antara laki-laki dan perempuan pada berbagai sektor

pembangunan. Melalui data tersebut, pemerintah daerah dapat menyusun kebijakan yang lebih responsif gender sehingga manfaat pembangunan dapat dirasakan secara adil oleh seluruh kelompok masyarakat. Penyusunan Profil Gender Kota Semarang Tahun 2025 dengan Anggaran Tahun 2026 merupakan salah satu instrumen strategis untuk menyediakan data dan informasi gender yang komprehensif, akurat, dan dapat dipertanggungjawabkan sebagai bahan perencanaan pembangunan daerah yang berkeadilan gender.

Berdasarkan data kependudukan Kota Semarang Tahun 2024, jumlah penduduk mencapai 1.702.379 jiwa yang terdiri dari 842.737 laki-laki dan 859.642 perempuan dengan rasio jenis kelamin sebesar 98,03. Kondisi ini menunjukkan bahwa jumlah penduduk perempuan sedikit lebih banyak dibandingkan laki-laki, sehingga kebutuhan dan kepentingan perempuan perlu menjadi perhatian dalam proses pembangunan daerah. Selain itu, struktur penduduk Kota Semarang didominasi oleh kelompok usia produktif yang mencapai sekitar 68,43 persen dari total penduduk. Kondisi tersebut memberikan peluang besar bagi peningkatan kualitas sumber daya manusia, termasuk peningkatan kualitas hidup perempuan agar mampu berpartisipasi secara optimal dalam pembangunan.

Dari sisi pembangunan gender, Kota Semarang menunjukkan capaian yang cukup baik. Indeks Pembangunan Gender (IPG) mengalami peningkatan dari 95,91 pada tahun 2023 menjadi 96,28 pada tahun 2024. Peningkatan ini mengindikasikan bahwa kesenjangan pembangunan manusia antara laki-laki dan perempuan semakin kecil, terutama pada aspek kesehatan, pendidikan, dan ekonomi. Di sisi lain, Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) juga mengalami peningkatan yang cukup signifikan dari 73,86 pada tahun 2023 menjadi 78,71 pada tahun 2024. Kondisi tersebut menunjukkan semakin meningkatnya peran dan

partisipasi perempuan dalam bidang ekonomi, pengambilan keputusan, serta kehidupan publik.

Meskipun demikian, berbagai tantangan kesetaraan gender masih perlu mendapatkan perhatian. Data Indeks Pembangunan Manusia (IPM) menurut jenis kelamin menunjukkan bahwa IPM laki-laki mencapai 87,03, sedangkan IPM perempuan sebesar 83,87. Perbedaan sebesar 3,16 poin tersebut mengindikasikan masih adanya kesenjangan dalam akses maupun hasil pembangunan yang diperoleh perempuan, baik dalam bidang pendidikan, kesehatan, maupun ekonomi. Kondisi ini menunjukkan bahwa upaya peningkatan kualitas hidup perempuan masih perlu terus diperkuat melalui kebijakan dan program yang lebih responsif gender.

Selain itu, masih terdapat berbagai isu gender yang memerlukan perhatian khusus, antara lain partisipasi perempuan dalam dunia kerja, keterwakilan perempuan dalam pengambilan keputusan, perlindungan perempuan dan anak dari tindak kekerasan, serta peningkatan akses perempuan terhadap sumber daya ekonomi dan layanan publik. Berbagai tantangan tersebut memerlukan dukungan data yang lengkap dan terintegrasi agar dapat dirumuskan kebijakan yang efektif dalam mengurangi kesenjangan gender dan meningkatkan kualitas pembangunan manusia secara menyeluruh.

Penyusunan Profil Gender Kota Semarang Tahun 2025 dengan Anggaran Tahun 2026 menjadi sangat penting sebagai media dokumentasi dan analisis kondisi gender di Kota Semarang. Profil ini diharapkan dapat memberikan gambaran mengenai capaian pembangunan gender, mengidentifikasi kesenjangan yang masih terjadi, serta menjadi dasar dalam penyusunan program dan kegiatan yang responsif gender pada seluruh perangkat daerah. Dengan tersedianya profil gender yang komprehensif, Pemerintah Kota Semarang diharapkan dapat semakin memperkuat implementasi Pengarusutamaan Gender serta mewujudkan

pembangunan yang inklusif, setara, berkeadilan, dan berkelanjutan bagi seluruh masyarakat Kota Semarang.

1.2 Maksud dan Tujuan

A. Maksud

Penyusunan Profil Gender Kota Semarang Tahun 2025 dimaksudkan untuk menyediakan data, informasi, dan analisis mengenai kondisi laki-laki dan perempuan pada berbagai sektor pembangunan sebagai dasar pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Kota Semarang.

B. Tujuan

Tujuan penyusunan Profil Gender Kota Semarang adalah:

1. Menyajikan data terpilah menurut jenis kelamin pada berbagai sektor pembangunan.
2. Mengidentifikasi kondisi, potensi, serta kesenjangan gender yang masih terjadi di Kota Semarang.
3. Menyediakan bahan perumusan kebijakan pembangunan yang responsif gender.
4. Mendukung pelaksanaan Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender (PPRG).
5. Menjadi bahan monitoring dan evaluasi pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Kota Semarang.
6. Menjadi sumber informasi bagi pemerintah, akademisi, dunia usaha, media, dan masyarakat.

1.3 Dasar Hukum

Penyusunan Profil Gender Kota Semarang Tahun 2025 dengan Anggaran Tahun 2026 berpedoman pada berbagai ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan *Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women* (CEDAW).
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang.
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014.
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.
6. Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Nasional.
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011.
8. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak terkait Pengarusutamaan Gender dan Perencanaan Penganggaran Responsif Gender.
9. Peraturan Daerah Kota Semarang yang berkaitan dengan pembangunan daerah, perlindungan perempuan dan anak, serta pengarusutamaan gender.
10. Dokumen RPJMD Kota Semarang Tahun 2021–2026.
11. RKPD Kota Semarang Tahun 2026.

Dasar hukum tersebut menjadi landasan dalam penyediaan data dan informasi gender sebagai bagian dari pelaksanaan pembangunan yang berkeadilan dan responsif gender.

1.4 Sasaran

Sasaran penyusunan Profil Gender Kota Semarang Tahun 2025 meliputi:

1. Pemerintah Kota Semarang dan seluruh perangkat daerah.
2. Lembaga legislatif.
3. Organisasi Pemerintah Daerah (OPD).
4. Perguruan tinggi dan lembaga penelitian.
5. Organisasi masyarakat dan organisasi perempuan.
6. Dunia usaha.
7. Media massa.
8. Masyarakat umum.

Melalui profil ini diharapkan seluruh pemangku kepentingan memiliki pemahaman yang sama mengenai kondisi gender di Kota Semarang sehingga dapat berpartisipasi dalam mewujudkan pembangunan yang lebih inklusif dan berkeadilan.

1.5 Ruang Lingkup

Ruang lingkup Profil Gender Kota Semarang Tahun 2025 mencakup data dan informasi pembangunan yang dianalisis berdasarkan jenis kelamin pada berbagai bidang pembangunan, meliputi:

1. Kependudukan.
2. Pendidikan.
3. Kesehatan.
4. Ketenagakerjaan dan Ekonomi.
5. Politik dan pengambilan keputusan.

6. Perlindungan perempuan dan Anak
7. Bidang-bidang lain yang relevan dengan pelaksanaan Pengarusutamaan Gender.

Data yang digunakan merupakan data tahun 2025 atau data terbaru yang tersedia pada saat penyusunan dokumen.

1.6 Metodologi Penyusunan

Penyusunan Profil Gender Kota Semarang Tahun 2025 dilakukan melalui beberapa tahapan sebagai berikut:

a) Pengumpulan Data

Pengumpulan data dilakukan melalui koordinasi dengan perangkat daerah, instansi vertikal, lembaga layanan, serta sumber data resmi lainnya yang memiliki data terpilah menurut jenis kelamin.

b) Verifikasi dan Validasi Data

Data yang diperoleh dilakukan proses verifikasi dan validasi untuk memastikan konsistensi, kelengkapan, dan akurasi data yang digunakan.

c) Analisis Gender

Analisis dilakukan dengan menggunakan pendekatan gender untuk mengidentifikasi kesenjangan antara laki-laki dan perempuan dalam aspek akses, partisipasi, kontrol, dan manfaat pembangunan.

d) Penyusunan Dokumen

Data yang telah dianalisis disusun menjadi dokumen Profil Gender yang memuat data statistik, tabel, grafik, analisis, dan rekomendasi kebijakan.

e) Konsultasi dan Finalisasi

Draft dokumen dibahas bersama perangkat daerah dan pemangku kepentingan terkait sebelum dilakukan penyempurnaan dan finalisasi.

1.7 Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penyusunan Profil Gender Kota Semarang Tahun 2025 berasal dari:

1. Badan Pusat Statistik (BPS).
2. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.
3. Bappeda Kota Semarang.
4. Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.
5. Dinas Pendidikan.
6. Dinas Kesehatan.
7. Dinas Tenaga Kerja.
8. Pengadilan Agama.
9. Kepolisian.
10. Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA).
11. Perangkat daerah lainnya sesuai kebutuhan data.

1.8 Sistematika Penulisan

Dokumen Profil Gender Kota Semarang Tahun 2025 disusun dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Memuat latar belakang, dasar hukum, maksud dan tujuan, sasaran, ruang lingkup, metodologi penyusunan, sumber data, dan sistematika penulisan.

BAB II LANDASAN TEORI DAN KONSEP GENDER

Memuat tentang teori dan konsep yang berhubungan dengan pengertian gender, kesetaraan gender, ketimpangan gender, pengarusutamaan gender

BAB III PROFIL KOTA SEMARANG

Memuat kondisi geografis, administratif, demografi, sosial ekonomi, dan gambaran umum pembangunan daerah.

BAB IV PROFIL GENDER KOTA SEMARANG

Memuat data dan analisis kependudukan menurut jenis kelamin; analisis gender pada sektor pendidikan, kesehatan, ketenagakerjaan, ekonomi, politik, sosial budaya, perlindungan perempuan dan anak.

BAB V PENUTUP

Memuat kesimpulan, isu strategis gender, dan rekomendasi kebijakan untuk mendukung pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Kota Semarang.

BAB II

LANDASAN TEORI DAN KONSEP GENDER

2.1 Pengertian Gender

Kata “Gender” berasal dari bahasa Inggris, gender yang berarti “jenis kelamin”. Dalam *Webster’s New World Dictionary*, gender diartikan sebagai perbedaan yang tampak antara laki-laki dan perempuan dilihat dari segi

nilai dan tingkah laku.¹ Didalam *Webster's Studies Encyclopedia* dijelaskan bahwajender adalah suatu konsep kultural yang berupaya membuat perbedaan (distinction) dalam hal peran, prilaku, mentalitas dan karakteristik emosional antara laki-laki dan perempuan yang berkembang dalam masyarakat.²

Dalam memahami konsep gender, Mansour Fakih membedakannya antara gender dan seks (jenis kelamin). Pengertian seks lebih condong pada pensifatan atau pembagian dua jenis kelamin manusia berdasarkan ciri biologis yang melekat, tidak berubah dan tidak dapat dipertukarkan. Dalam hal ini sering dikatakan sebagai ketentuan Tuhan atau 'kodrat'.

Sedangkan konsep gender adalah sifat yang melekat pada laki-laki atau perempuan yang dikonstruksi secara sosial maupun kultural dan dapat dipertukarkan. Sehingga semua hal yang dapat dipertukarkan antara sifat laki-laki dan perempuan, yang bisa berubah dari waktu ke waktu, dari tempat ke tempat lainnya, maupun berbeda dari suatu kelas ke kelas yang lain, itulah yang disebut dengan gender. Jadi gender diartikan sebagai jenis kelamin sosial, sedangkan sex adalah jenis kelamin biologis. Maksudnya adalah dalam gender ada perbedaan peran, fungsi dan tanggung jawab antara laki-laki dan perempuan sebagai hasil konstruksi sosial.³ Gender adalah perbedaan yang tampak pada laki-laki dan perempuan apabila dilihat dari nilai dan tingkah laku. Gender merupakan suatu istilah yang digunakan untuk menggambarkan perbedaan antara laki-laki dan perempuan secara sosial. Gender adalah kelompok atribut dan perilaku secara kultural yang ada pada laki-laki dan perempuan.⁴ Sejalan dengan itu, Gender merupakan konsep hubungan sosial yang membedakan

¹ Nassaruddin Umar, *Argumen Kesetaraan Gender*, (Jakarta: Dian Rakyat, 2010)

² Ibid, hlm 30

³ Iswah Adriana, *Kurikulum Berbasis Gender*, Tadrîs. Volume 4. Nomor 1. 2009 hlm 138

⁴ Dwi Narwoko dan Bagong Yuryanto, *Sosiologi Teks Pengantar dan Terapan*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2004) hlm. 334

(memilahkan atau memisahkan) fungsi dan peran antara perempuan dan laki-laki. Perbedaan fungsi dan peran antara laki-laki dan perempuan itu tidak ditentukan karena keduanya terdapat perbedaan biologis atau kodrat, melainkan dibedakan menurut kedudukan, fungsi dan peranan masing-masing dalam berbagai kehidupan dan pembangunan.⁵

2.2 Kesetaraan Gender

Kesetaraan gender adalah kondisi di mana perempuan dan laki-laki memperoleh kesempatan yang sama untuk mengakses sumber daya, berpartisipasi dalam pembangunan, memiliki kontrol terhadap pengambilan keputusan, dan menikmati manfaat pembangunan secara setara.

Kesetaraan gender lebih menekankan pada hasil yang setara, sedangkan keadilan gender menekankan pada proses yang diperlukan untuk mencapai kesetaraan tersebut. Dengan demikian, keadilan gender merupakan langkah yang harus ditempuh untuk mewujudkan kesetaraan gender dalam berbagai aspek kehidupan.

Dalam konteks pembangunan daerah, kesetaraan dan keadilan gender menjadi prinsip penting untuk memastikan bahwa seluruh masyarakat memperoleh manfaat pembangunan tanpa adanya diskriminasi berdasarkan jenis kelamin.

2.3 Ketidakadilan Gender

Dalam masyarakat perbedaan gender melahirkan ketidakadilan gender, baik bagi laki-laki maupun perempuan. Ketidakadilan gender ini muncul ketika seseorang diperlakukan tidak adil hanya karena alasan perbedaan gender. Namun ketidakadilan gender ini banyak dialami oleh perempuan sehingga banyak masalah ketidakadilan gender yang

⁵ Ibid., hlm. 335

diidentikkan dengan masalah kaum perempuan, hal tersebut yang membuat laki-laki dan perempuan jauh dari kata setara. Ketidakadilan gender terwujud dalam kehidupan sehari-hari, seperti :

1. Stereotype (Pelabelan)

Stereotype yang melekat serta diberikan pada masyarakat terhadap peran fungsi dan tanggung jawab laki-laki dan perempuan.⁶ Pelabelan yang paling sering diberikan kepada seorang perempuan misalnya, perempuan diberikan citra yang buruk, perempuan dianggap makhluk yang emosional, tidak rasional, lemah dan sebagainya. Hal ini yang membuat perempuan secara tidak langsung ditempatkan pada posisi yang lemah serta akan membuat perempuan sulit memperoleh kedudukan yang sama dengan laki-laki.

2. Marjinalisasi (Peminggiran),

Bentuk peminggiran terhadap perempuan di masyarakat yang bersumber dari keyakinan maupun tradisi, kebijakan. Peminggiran yang terjadi kepada perempuan tidak hanya berdampak pada posisi dan kedudukan perempuan, tetapi juga berdampak pada akses kontrol terhadap perempuan.⁷

3. Subordinasi (Penomorduaan)

Subordinasi adalah anggapan bahwa perempuan dibawah laki-laki. Perbedaan terhadap perempuan yang seringkali dilakukan berdampak pada akses kontrol pada perempuan. Dalam pendidikan misalnya, perempuan masih dinomorduakan dengan laki-laki dalam hal akses pendidikan sehingga dalam hal ini yang lebih diuntungkan adalah laki-laki daripada perempuan. Dalam pengambilan keputusan laki-laki lebih

⁶ Mansour Fakih, Analisis Gender & Transformasi Sosial, (Yogyakarta: INSISTPress, 2016), 17. 15

⁷ Dede Wiliam, Gender Bukan Tabu: Catatan Perjalanan Fasilitasi Kelompok Perempuan di Jambi, (Bogor: Center for International Forestry Research CIFOR, 2006), 19.

diutamakan daripada perempuan, hal ini yang membuat perempuan tidak bisa mengontrol keuntungan dari kebijakan yang telah dibuat.⁸

4. Kekerasan (Violence)

Kekerasan adalah bentuk serangan fisik, seksual dan non seksual. Bentuk kekerasan yang terjadi sangat beragam dan bisa terjadi kapan saja dan dimana saja. Kebanyakan korban dari kekerasan seksual adalah perempuan.

5. Beban Ganda

Beban ganda merupakan beban tugas dan tanggung jawab baik laki-laki maupun perempuan secara terus menerus. Hal ini terjadi karena laki-laki dan perempuan tidak paham akan pembagian tugas dan tanggung jawab sehingga hanya dibebankan pada satu orang saja. Dalam hal ini perempuan paling banyak mengalami beban ganda seperti pada seorang istri yang selain mengerjakan tugas domestik di rumah juga bekerja untuk membantu mencukupi kebutuhan. Pekerjaan domestik di rumah yang sebenarnya bisa berbagai tugas dengan suami tetapi tidak dilakukan oleh suami, walaupun pada dasarnya pekerjaan semacam ini bisa dilakukan oleh siapapun untuk meringankan beban ganda seorang perempuan yang sudah berumah tangga.

Kesetaraan gender mempunyai arti kondisi yang sama antara laki-laki dan perempuan dalam hal memperoleh kesempatan serta hak-hak yang sama sebagai manusia. Kesetaraan gender dan keadilan gender akan terwujud apabila dalam masyarakat tidak ada diskriminasi yang ditimbulkan akibat perbedaan laki-laki dan perempuan. Menurut paham feminisme radikal-libertarian, gender adalah bagian terpisah dari jenis kelamin, dan masyarakat yang patriarki (masyarakat yang didominasi oleh laki-laki)

⁸ Ibid., 13

menggunakan peran gender yang kaku, yang bertujuan untuk memastikan bahwa perempuan pasif sedangkan laki-laki tetap aktif.⁹

Karenanya menurut paham ini salah satu cara untuk merobohkan budaya patriarki adalah dengan cara menyadarkan perempuan agar tidak terus pasif dan berkeyakinan bahwa laki-laki juga tidak ditakdirkan terus aktif kemudian mengkombinasikan serta merefleksikan sifatsifat yang dimiliki oleh laki-laki dan perempuan sehingga menghilangkan budaya patriarki dan mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender.

2.4 Pengarusutamaan Gender

Dalam upaya mencapai kesetaraan dan keadilan gender diperlukan adanya Pengarusutamaan Gender (PUG). Pengarusutamaan Gender (PUG) merupakan salah satu strategi pembangunan yang dilakukan untuk mencapai kesetaraan dan keadilan gender, dengan melalui pengintegrasian pengalaman, aspirasi, kebutuhan, dan permasalahan perempuan dan laki-laki ke dalam perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi dari seluruh kebijakan, program, proyek, dan kegiatan di berbagai bidang kehidupan dan pembangunan.¹⁰

Inpres No. 9 tahun 2000 menjelaskan bahwa pengarusutamaan gender adalah strategi yang dibangun untuk mengintegrasikan gender menjadi satu dimensi integral dari perencanaan, penyusunan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi atas kebijakan dan program pembangunan nasional.¹¹ Menurut Peraturan Menteri Negara

⁹ Rosmarie Putnam Tong, *Feminist Thought: Pengantar Paling Komprehensif kepada Aliran Utama Pemikiran Feminis*, terj. Auarini Priyatna Prabasmono (Yogyakarta: Jalasutra, 1998), 73.

¹⁰ Wewen Kusumi Rahayu, "Analisis Pengarusutamaan Gender dalam Kebijakan Publik", *JAKPP (Jurnal Analisis Kebijakan dan Pelayanan Publik)*, 1(Juni, 2016), 99.

¹¹ Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender Dalam Pembangunan Nasional, Jakarta: Kementrian Pemberdayaan Perempuan, 2000. 25

Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2010, Pengarusutamaan gender adalah strategi untuk mencapai kesetaraan dan keadilan gender melalui kebijakan dan program yang memperhatikan pengalaman, aspirasi, kebutuhan dan permasalahan perempuan dan laki-laki kedalam perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi dari seluruh kebijakan dan program di berbagai bidang kehidupan dan pembangunan.¹²

Dari penjelasan-penjelasan tersebut dapat disimpulkan bahwa Pengarusutamaan Gender adalah bentuk strategi yang digunakan untuk mencapai kesetaraan dan keadilan gender melalui program dan kebijakan yang dibuat dengan mempertimbangkan aspirasi laki-laki dan perempuan dari mulai perencanaan sampai evaluasi kebijakannya. Pengarusutamaan gender ini sangat penting dilakukan karena memiliki beberapa tujuan. *Pertama*, pemerintah dapat bekerja lebih efisien dalam memproduksi kebijakan-kebijakan publik yang adil dan reponsif gender baik untuk rakyat laki-laki maupun perempuan. *Kedua*, kebijakan dan program perundang-undangan yang adil dan reponsif gender akan membuahkan manfaat yang adil bagi seluruh rakyat. *Ketiga*, pengarusutamaan gender sebagai upaya menegakkan hak-hak dan kesempatan yang sama atas laki-laki dan perempuan. *Keempat*, pengarusutamaan gender akan mengantarkan pada pencapaian kesetaraan gender yang akan meningkatkan akuntabilitas pemerintah terhadap rakyatnya. Kelima, Pengarusutamaan gender yang berhasil akan memperkuat kehidupan sosial, ekonomi, dan politik.¹³

¹² Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2010 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender Di Madrasah Kementerian Agama Republik Indonesia, Jakarta: Kementerian Pemberdayaan Perempuan, 2010.

¹³ Sri Djoharwinarlien, Dilema Kesetaraan Gender: Refleksi dan Respons Praksis, (Yogyakarta: PolGov Fisipol UGM, 2012), 117.

2.5 Data Gender dan Data Terpilah

Data gender adalah data mengenai hubungan antara laki-laki dan perempuan dalam berbagai aspek kehidupan yang menggambarkan kondisi, peran, akses, partisipasi, kontrol, dan manfaat pembangunan.

Data terpilah adalah data yang dipisahkan berdasarkan jenis kelamin, usia, wilayah, tingkat pendidikan, status sosial ekonomi, maupun karakteristik lainnya sehingga memungkinkan dilakukan analisis gender secara lebih mendalam.

Ketersediaan data terpilah menjadi syarat utama dalam pelaksanaan Pengarusutamaan Gender karena memungkinkan pemerintah daerah untuk:

1. Mengidentifikasi kesenjangan gender.
2. Menentukan kelompok sasaran pembangunan.
3. Menyusun kebijakan yang berbasis bukti.
4. Mengukur capaian pembangunan gender.

2.6 Indikator Pembangunan Gender

Untuk mengukur capaian pembangunan gender digunakan beberapa indikator utama, yaitu:

A. Indeks Ketimpangan Gender (IKG)

Indeks Ketimpangan Gender (IKG) merupakan indikator yang digunakan untuk mengukur tingkat ketimpangan atau kesenjangan antara perempuan dan laki-laki dalam tiga dimensi utama pembangunan manusia, yaitu: Kesehatan reproduksi, Pemberdayaan (empowerment), Partisipasi di pasar kerja.

B. Indeks Pembangunan Gender (IPG)

IPG menggambarkan perbandingan capaian pembangunan manusia antara perempuan dan laki-laki pada aspek kesehatan, pendidikan, dan ekonomi.

C. Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)

IDG mengukur tingkat partisipasi aktif perempuan dalam kehidupan ekonomi dan politik, termasuk keterwakilan perempuan dalam pengambilan keputusan.

D. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Menurut Jenis Kelamin

IPM menurut jenis kelamin digunakan untuk melihat perbedaan kualitas hidup laki-laki dan perempuan berdasarkan umur harapan hidup, pendidikan, dan standar hidup layak.

E. Indikator Gender Sektoral

Indikator sektoral meliputi pendidikan, kesehatan, ketenagakerjaan, ekonomi, politik, perlindungan perempuan, perlindungan anak, dan berbagai indikator lain yang menggambarkan kondisi gender pada masing-masing sektor pembangunan.

BAB III

PROFIL KOTA SEMARANG

3.1 Kondisi Umum Kota Semarang

Semarang adalah ibukota Jawa Tengah dan kota pelabuhan utama yang terletak di pantai utara Jawa. Dengan jumlah penduduk 1.702.268

jiwa, kota ini merupakan salah satu kota terbesar di Jawa Tengah dan memainkan peran sentral dalam bidang politik, ekonomi, dan administrasi. Kota ini terletak pada jalur transportasi utama dari timur ke barat di pesisir utara Pulau Jawa, dan menempati posisi penting sebagai pusat logistik dan transportasi yang menghubungkan Jakarta dan Surabaya.

Secara historis, kota ini berkembang sebagai kota pelabuhan dan merupakan kota perdagangan tempat bertemunya beragam budaya. Kota ini dikembangkan sebagai pelabuhan perdagangan penting selama masa kolonial Belanda, dan banyak bangunan bergaya Eropa tetap berada di kota tua. Komunitas Tionghoa yang sudah ada sejak lama menciptakan budaya urban unik yang merupakan perpaduan budaya Jawa dan Tionghoa.

Di bidang ekonomi, industri utama adalah logistik pelabuhan, manufaktur, perdagangan, dan jasa. Kawasan industri telah tersebar di seluruh kota dan berfungsi sebagai basis industri di wilayah Jawa Tengah. Selain itu, infrastruktur transportasi dan fasilitas pelabuhan terus ditingkatkan, dan kota ini terus berkembang menjadi kota yang menarik investasi dalam dan luar negeri.

Secara geografis, kota ini terdiri dari dua medan yang berbeda: dataran rendah di utara dan perbukitan di selatan. Meskipun banjir akibat penurunan tanah dan gelombang badai merupakan masalah perkotaan di dataran rendah, kawasan pemukiman dan universitas sedang dikembangkan di daerah perbukitan di Selatan. Dengan demikian, Semarang merupakan kota perwakilan di Jawa Tengah yang menghadapi permasalahan sejarah, ekonomi, dan perkotaan yang kompleks.

3.2 Luas dan Batasan Wilayah Administrasi

Kota Semarang adalah ibukota Provinsi Jawa Tengah di Indonesia dan kota pelabuhan penting yang terletak di pantai utara Pulau Jawa. Kota

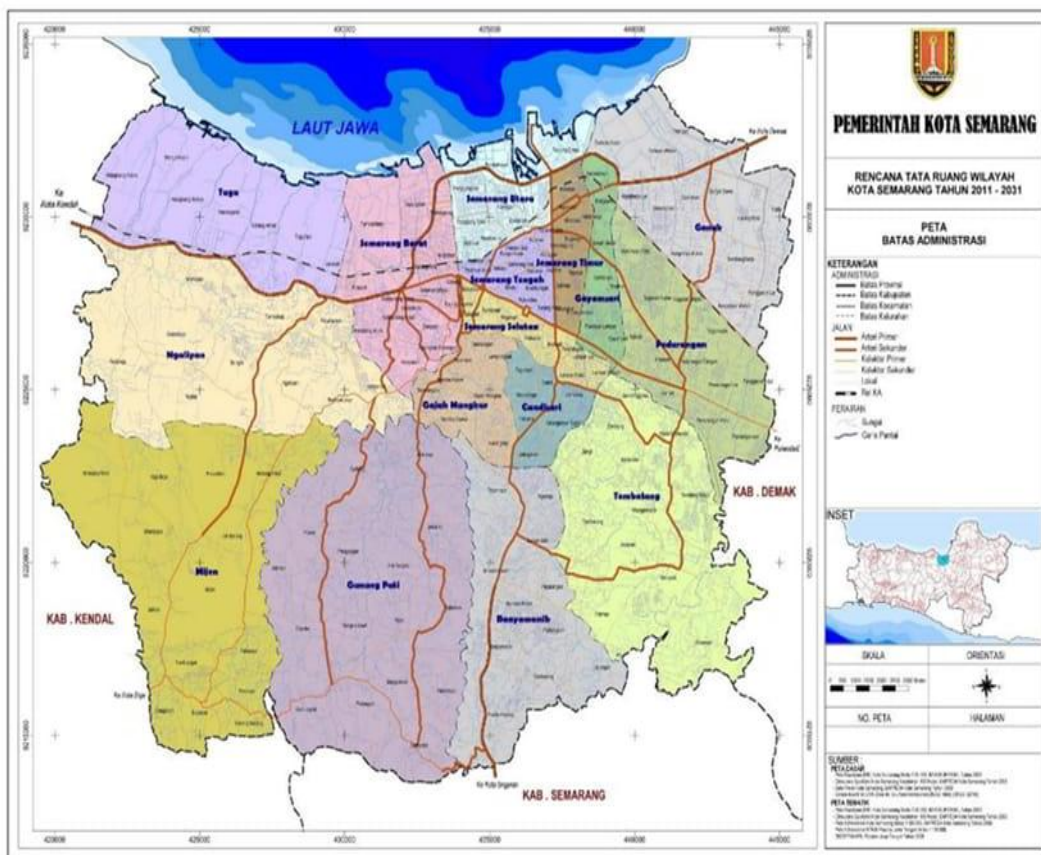
ini memiliki luas sekitar 373,7 km² dan topografi yang membentang dari dataran rendah pesisir hingga perbukitan bagian selatan. Sisi utara menghadap Laut Jawa, tempat terkonsentrasinya pelabuhan dan kawasan komersial, sedangkan sisi selatan merupakan dataran tinggi dan telah berkembang kawasan pemukiman dan universitas.

Wilayah administratif Kota Semarang terdiri dari 16 kecamatan. Kecamatan yang khas antara lain Semarang Utara di utara dengan pelabuhan dan kota tuanya, Semarang Tengah dengan pusat komersialnya, serta Banyumanik dan Tembalang dengan kawasan pemukimannya. Kecamatan-kecamatan ini dibagi lagi menjadi desa dan unit administrasi perkotaan (kelurahan), yang berfungsi sebagai unit dasar administrasi kota dan layanan lokal.

Dilihat dari batas administratifnya, Kota Semarang sebagian besar dikelilingi oleh Kabupaten Semarang. Banyak wilayah di sisi selatan dan barat yang berbatasan dengan prefektur, menjadikannya wilayah dengan ikatan ekonomi dan transportasi yang kuat sebagai wilayah metropolitan. Kecamatan ini juga berbatasan dengan provinsi Demak di sebelah Timur dan terhubung melalui kawasan pertanian dan lahan basah.

Lebih jauh ke Barat, berbatasan dengan Kabupaten Kendal di beberapa bagian. Seperti disebutkan di atas, sisi Utara menghadap Laut Jawa, tempat Pelabuhan Tanjung Emas berada dan berfungsi sebagai basis logistik. Seperti dijelaskan di atas, Kota Semarang terletak dikelilingi oleh laut dan beberapa provinsi, serta berperan penting sebagai pusat perekonomian dan transportasi Jawa Tengah.

**Gambar 1. Peta Wilayah Kota Semarang
Tahun 2025**



Sumber : <https://ppid.semarangkota.go.id>

Berikut tersaji data mengenai kepadatan penduduk per kecamatan di Kota Semarang pada tahun 2025

Tabel 1. Kepadatan Penduduk per Kecamatan di Kota Semarang Tahun 2025

Kecamatan	Luas Wilayah	Kepadatan Penduduk
Mijen	56,52	1704,83
Gunung Pati	58,27	1757,83
Banyumanik	29,74	4844,89
Gajah Mungkur	9,34	6030,84
Semarang Selatan	5,95	10416,97
Candisari	6,4	11780,62
Tembalang	39,47	5190,4
Pedurungan	21,11	9400,85
Genuk	25,98	5428,52
Gayamsari	6,22	11315,27
Semarang Timur	5,42	12266,05
Semarang Utara	11,39	10348,11
Semarang Tengah	5,17	10679,5
Semarang Barat	21,68	6889,16
Tugu	28,13	1222,82
Ngaliyan	42,99	3437,94
Kota Semarang	373,78	4608,11

Sumber : <https://semarangkota.bps.go.id/id/statistics-table2025>

3.3 Letak dan Kondisi Geografis

Semarang adalah ibukota provinsi Jawa Tengah di Indonesia dan merupakan kota yang terletak di pesisir utara Jawa. Kota ini menghadap Laut Jawa dan telah berkembang sebagai pusat transportasi dan perdagangan laut sejak zaman dahulu. Terletak di tengah jalur transportasi utama di sepanjang pantai utara Jawa, kota ini memiliki ikatan ekonomi dan transportasi yang kuat dengan wilayah sekitarnya.

Secara topografis, Kota Semarang terdiri dari dataran rendah pesisir di bagian utara dan daerah perbukitan di bagian selatan. Pesisir

utara merupakan daerah datar dan dataran rendah dengan fasilitas pelabuhan, kawasan komersial, dan kawasan industri. Sebaliknya, saat Anda bergerak ke selatan, datarannya berangsur-angsur menjadi lebih tinggi, dengan perbukitan, kawasan pemukiman, dan institusi pendidikan semakin meluas. Perbedaan topografi ini sangat mempengaruhi perkembangan perkotaan dan penggunaan lahan.

Iklimnya termasuk iklim monsun tropis, dengan suhu dan kelembapan tinggi sepanjang tahun, serta musim hujan dan kemarau yang berbeda. Apalagi pada musim hujan, curah hujan meningkat dan banjir dapat terjadi di wilayah pesisir dataran rendah. Selain itu, penurunan permukaan tanah dan banjir rob merupakan masalah di wilayah yang dekat dengan laut, dan merupakan masalah penting terkait lingkungan perkotaan dan upaya pencegahan bencana.

Dari segi transportasi, Semarang merupakan pusat transportasi penting di Jawa Tengah. Di wilayah ini terdapat Pelabuhan Tanjung Emas, fasilitas pelabuhan, dan Bandara Internasional Ahmad Yani, yang menangani lalu lintas udara, mendukung logistik domestik dan internasional, serta pergerakan orang. Karena letak geografis dan kondisi transportasinya, Semarang telah berkembang sebagai pusat administrasi dan perekonomian wilayah tersebut.

3.4 Topografi

Topografi Kota Semarang secara garis besar dapat dibagi menjadi dataran rendah pesisir di Utara dan daerah perbukitan di Selatan. Sisi Utara kota menghadap ke Laut Jawa dan merupakan daerah dataran rendah yang datar. Kawasan pesisir ini merupakan pusat kegiatan pelabuhan, komersial dan industri serta merupakan kawasan penting bagi kegiatan perekonomian kota.

Dataran rendah bagian Utara merupakan dataran aluvial yang terbentuk dari sedimen yang terbawa sungai. Meskipun kawasan ini relatif datar dan cocok untuk pengembangan perkotaan, namun ketinggiannya yang rendah membuatnya rentan terhadap banjir dan genangan air pasang. Oleh karena itu, upaya-upaya seperti fasilitas drainase dan tanggul menjadi isu penting dalam pengelolaan perkotaan.

Sebaliknya, saat Anda menuju ke arah Selatan Kota Semarang, medannya berangsur-angsur menjadi lebih tinggi dan berbukit. Wilayah ini memiliki ketinggian yang lebih tinggi dan iklim yang relatif lebih sejuk dibandingkan dataran rendah bagian Utara. Ini adalah rumah bagi banyak kawasan pemukiman, lembaga pendidikan, dan tempat wisata, dan memainkan peran penting dalam lingkungan hidup perkotaan.

Lebih jauh ke Selatan, terbentang wilayah pegunungan Jawa Tengah, membentuk latar belakang topografi kota. Meskipun perbukitan dan pegunungan ini membantu menyediakan sumber air dan menjaga lingkungan alam, kemiringan lereng yang curam juga dapat membatasi pembangunan. Perubahan topografi dari dataran rendah menjadi perbukitan ini berdampak besar terhadap struktur perkotaan dan penggunaan lahan di Semarang.

3.5 Kependudukan

Penduduk merupakan subjek sekaligus sasaran utama pembangunan. Oleh karena itu, data kependudukan yang disajikan secara terpilah menurut jenis kelamin menjadi dasar penting dalam mengidentifikasi kondisi, kebutuhan, serta potensi perempuan dan laki-laki di berbagai kelompok usia. Berikut tersaji data mengenai kependudukan di Kota Semarang yang memberikan gambaran kondisi demografi penduduk

**Tabel 2. Jumlah Penduduk Kota Semarang
Tahun 2025**

NO	WILAYAH	LAKI-LAKI	PEREMPUAN	TOTAL
0	Kota Semarang	841.804	860.964	1.702.268
1	Semarang Tengah	27.110	29.236	56.346
2	Semarang Utara	58.012	59.627	117.639
3	Semarang Timur	33.152	34.886	68.038
4	Gayamsari	35.452	35.950	71.402
5	Genuk	65.185	64.964	130.149
6	Pedurungan	98.825	101.051	199.876
7	Semarang Selatan	31.993	33.351	65.344
8	Candisari	37.590	38.720	76.310
9	Gajahmungkur	28.350	29.391	57.741
10	Tembalang	97.299	98.354	195.653
11	Banyumanik	71.739	73.969	145.708
12	Gunungpati	51.894	52.280	104.174
13	Semarang Barat	74.568	77.031	151.599
14	Mijen	42.194	42.292	84.486
15	Ngaliyan	71.537	72.918	144.455
16	Tugu	16.904	16.944	33.848

Sumber : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Semarang, 2025

Tabel ini menunjukkan populasi Semarang berdasarkan jenis kelamin (laki-laki dan perempuan). Secara keseluruhan, populasi perempuan adalah 860.964 dan populasi laki-laki adalah 841.804, artinya terdapat 19.160 lebih banyak perempuan. Ini berarti terdapat sedikit dominasi perempuan di Semarang, dan cenderung terdapat sedikit dominasi perempuan dalam struktur populasi.

Jika dilihat per kecamatan, populasi perempuan melebihi populasi laki-laki di sebagian kecamatan. Misalnya di kecamatan-kecamatan seperti Pedurungan, Banyumanik, Semarang Barat, dan Tembalang, jumlah perempuan lebih banyak daripada jumlah laki-laki. Tren ini umum terjadi dalam struktur populasi perkotaan dan mungkin terkait dengan harapan hidup perempuan yang lebih tinggi dan faktor-faktor sosial lainnya.

Namun, tidak semua kecamatan memiliki jumlah perempuan yang lebih banyak. Jika dilihat dari tabel, kecamatan Genuk memiliki jumlah penduduk laki-laki yang sedikit lebih tinggi, yaitu 65.185 laki-laki dan 64.964 perempuan. Ini adalah kasus yang relatif jarang terjadi dalam tabel, dan mungkin dipengaruhi oleh struktur industri regional dan karakteristik populasi pekerja.

Selain itu, terdapat kecenderungan jumlah perempuan melebihi jumlah laki-laki di daerah dengan populasi yang lebih besar. Misalnya, di daerah dengan populasi besar seperti Pedurungan, Tembalang, dan Semarang Barat, meskipun populasi laki-laki dan perempuan sama-sama tinggi, jumlah perempuan sedikit lebih tinggi. Hal ini menunjukkan bahwa kecenderungan populasi perempuan yang sedikit lebih tinggi di Kota Semarang secara keseluruhan hampir konsisten bahkan di tingkat kecamatan.

**Tabel 3. Jumlah Penduduk Berdasar Usia
Tahun 2025**

WILAYAH	0-18 th			19-59 th			60 th +		
	L	P	Jml	L	P	Jml	L	P	Jml
Kota Semarang	237.476	223.379	460.855	504.401	515.322	1.019.723	99.927	122.263	222.190
Semarang Tengah	6.480	6.257	12.737	16.339	16.497	32.836	4.291	6.482	10.773
Semarang Utara	15.807	15.014	30.821	35.178	34.853	70.031	7.027	9.760	16.787
Semarang Timur	8.427	7.889	16.316	19.980	20.188	40.168	4.745	6.809	11.554
Gayamsari	10.195	9.474	19.669	21.251	21.516	42.767	4.006	4.960	8.966
Genuk	20.526	19.595	40.121	39.153	39.386	78.539	5.506	5.983	11.489
Pedurungan	28.051	26.219	54.270	58.325	60.318	118.643	12.449	14.514	26.963
Semarang Selatan	8.228	7.578	15.806	19.454	19.787	39.241	4.311	5.986	10.297
Candisari	9.974	9.561	19.535	22.642	22.624	45.266	4.974	6.535	11.509
Gajahmungkur	7.511	7.235	14.746	17.061	17.205	34.266	3.778	4.951	8.729
Tembalang	29.085	26.941	56.026	58.214	59.998	118.212	10.000	11.415	21.415
Banyumanik	20.151	18.629	38.780	42.594	44.367	86.961	8.994	10.973	19.967
Gunungpati	15.257	14.325	29.582	30.626	31.551	62.177	6.011	6.404	12.415
Semarang Barat	19.839	18.932	38.771	45.245	46.277	91.522	9.484	11.822	21.306
Mijen	12.814	11.863	24.677	25.046	25.664	50.710	4.334	4.765	9.099
Ngaliyan	20.361	19.216	39.577	43.027	44.788	87.815	8.149	8.914	17.063
Tugu	4.770	4.651	9.421	10.266	10.303	20.569	1.868	1.990	3.858

Sumber : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Semarang, 2025

Tabel di atas menunjukkan populasi Kota Semarang berdasarkan kelompok usia (0-18 tahun, 19-59 tahun, 60 tahun keatas) dan jenis kelamin (laki-laki dan perempuan). Secara keseluruhan, populasi usia kerja tertinggi berada pada kelompok usia 19-59 tahun, dengan total sekitar 1.019.723 jiwa. Sementara itu, kelompok usia 0-18 tahun sebanyak 460.855 jiwa, dan kelompok usia 60 tahun keatas sebanyak 222.190 jiwa, menunjukkan bahwa kelompok usia kerja merupakan inti dari populasi Kota Semarang.

Pada kelompok usia 0-18 tahun, populasi laki-laki (237.476 jiwa) cenderung sedikit lebih banyak daripada populasi perempuan (223.379). Tren ini terlihat banyak di kecamatan seperti Tembalang, Pedurungan, dan Genuk, di mana jumlah laki-laki lebih banyak daripada perempuan. Hal ini mungkin disebabkan oleh fakta bahwa rasio jenis kelamin saat lahir umumnya sedikit lebih tinggi untuk laki-laki.

Populasi usia kerja 19-59 tahun relatif seimbang antara laki-laki dan perempuan, tetapi ada banyak kecamatan di mana perempuan sedikit lebih banyak daripada laki-laki, seperti Banyumanik, Semarang Barat, dan Ngaliyan. Kelompok usia ini merupakan pusat kegiatan ekonomi dan angkatan kerja di kota, dan merupakan kelompok terbesar dalam hal jumlah penduduk dibandingkan dengan kelompok usia lainnya.

Di antara populasi lansia berusia 60 tahun ke atas, terdapat kecenderungan yang jelas bahwa populasi perempuan lebih banyak daripada populasi laki-laki. Di seluruh Kota Semarang, terdapat sekitar 122.263 perempuan dan 99.927 laki-laki. Tren ini juga terlihat di banyak kecamatan, dan faktor utamanya diperkirakan adalah harapan hidup perempuan yang lebih panjang daripada laki-laki. Oleh karena itu, kita dapat melihat kecenderungan peningkatan proporsi perempuan seiring bertambahnya usia.

3.6 Kepala Rumah Tangga

Data kepala keluarga yang dipilah menurut jenis kelamin merupakan salah satu indikator penting dalam analisis gender karena memberikan gambaran mengenai struktur rumah tangga, distribusi tanggung jawab, serta kondisi sosial ekonomi masyarakat.

Keberadaan rumah tangga dengan kepala keluarga perempuan juga perlu menjadi perhatian karena dalam banyak kondisi perempuan memikul tanggung jawab ganda, yaitu sebagai pencari nafkah sekaligus

pengelola rumah tangga. Kondisi tersebut dapat dipengaruhi oleh berbagai faktor, seperti status janda, perceraian, suami bekerja di luar daerah, maupun faktor sosial ekonomi lainnya. Berikut tersaji data kepala keluarga terpilah gender.

**Tabel 4. Jumlah Kepala Keluarga Menurut Jenis Kelamin
Tahun 2025**

NO	WILAYAH	LK	PR	JML
	KOTA SEMARANG	447.889	131.293	579.182
1	Semarang Tengah	14.522	6.941	21.463
2	Semarang Utara	30.315	11.043	41.358
3	Semarang Timur	17.597	7.337	24.934
4	Gayamsari	18.513	5.640	24.153
5	Genuk	34.025	7.455	41.480
6	Pedurungan	52.437	14.472	66.909
7	Semarang Selatan	16.992	6.744	23.736
8	Candisari	20.411	7.056	27.467
9	Gajahmungkur	15.251	5.105	20.356
10	Tembalang	51.030	12.427	63.457
11	Banyumanik	38.479	10.918	49.397
12	Gunungpati	28.204	6.543	34.747
13	Semarang Barat	39.928	12.495	52.423
14	Mijen	22.655	5.272	27.927
15	Ngaliyan	38.427	9.312	47.739
16	Tugu	9.103	2.533	11.636

Sumber : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Semarang, 2025

Berdasarkan data administrasi kependudukan Kota Semarang tahun 2025, jumlah kepala keluarga (KK) tercatat sebanyak 579.182 KK, yang terdiri atas 447.889 kepala keluarga laki-laki (77,33%) dan 131.293

kepala keluarga perempuan (22,67%). Komposisi ini menunjukkan bahwa laki-laki masih mendominasi posisi sebagai kepala keluarga di Kota Semarang. Kondisi tersebut sejalan dengan konstruksi sosial dan budaya yang masih menempatkan laki-laki sebagai pencari nafkah utama dan pemimpin rumah tangga. Namun demikian, keberadaan lebih dari 131 ribu kepala keluarga perempuan menunjukkan bahwa perempuan juga memiliki peran yang sangat signifikan dalam menjalankan fungsi keluarga, baik sebagai pencari nafkah, pengambil keputusan, maupun penanggung jawab pengasuhan anggota keluarga.

Jika ditinjau menurut wilayah kecamatan, jumlah kepala keluarga terbesar terdapat di Kecamatan Pedurungan sebanyak 66.909 KK, diikuti Tembalang sebanyak 63.457 KK, dan Semarang Barat sebanyak 52.423 KK. Sementara itu, jumlah kepala keluarga paling sedikit berada di Kecamatan Tugu sebanyak 11.636 KK. Pola tersebut umumnya berkaitan dengan jumlah penduduk dan tingkat perkembangan kawasan permukiman di masing-masing kecamatan. Di seluruh kecamatan, kepala keluarga laki-laki tetap mendominasi, namun kepala keluarga perempuan juga ditemukan dalam jumlah yang cukup besar, terutama di kecamatan dengan jumlah penduduk tinggi seperti Pedurungan, Semarang Barat, Tembalang, Semarang Utara, dan Banyumanik.

Dari perspektif gender, keberadaan kepala keluarga perempuan tidak semata-mata mencerminkan perubahan struktur keluarga, tetapi juga menunjukkan adanya berbagai kondisi sosial yang melatarbelakanginya, seperti status janda karena perceraian atau kematian pasangan, perempuan yang belum menikah namun menjadi penanggung jawab keluarga, maupun perempuan yang menjadi pencari nafkah utama karena kondisi ekonomi rumah tangga. Oleh karena itu, data kepala keluarga menurut jenis kelamin menjadi salah satu indikator penting dalam penyusunan kebijakan yang responsif gender. Informasi ini dapat

digunakan sebagai dasar dalam perencanaan program perlindungan sosial, pemberdayaan ekonomi, peningkatan akses terhadap pekerjaan layak, bantuan usaha, maupun layanan kesejahteraan keluarga yang mempertimbangkan kebutuhan spesifik rumah tangga yang dipimpin oleh perempuan.

3.7 Penduduk Disabilitas

Penyandang disabilitas merupakan bagian dari masyarakat yang memiliki hak yang sama untuk memperoleh akses terhadap pendidikan, kesehatan, pekerjaan, pelayanan publik, serta kesempatan berpartisipasi dalam kehidupan sosial, ekonomi, dan politik. Dalam perspektif gender, kondisi penyandang disabilitas perlu dianalisis berdasarkan jenis kelamin karena perempuan dan laki-laki penyandang disabilitas sering menghadapi tantangan yang berbeda. Perempuan penyandang disabilitas umumnya memiliki kerentanan yang lebih tinggi terhadap diskriminasi berlapis (multiple discrimination), baik karena faktor gender maupun kondisi disabilitas yang dimiliki. Oleh karena itu, penyajian data penyandang disabilitas menurut jenis kelamin menjadi salah satu dasar penting dalam penyusunan kebijakan dan program pembangunan yang responsif gender, sehingga setiap kelompok memperoleh akses, partisipasi, kontrol, dan manfaat pembangunan secara setara. Berikut data penduduk disabilitas di Kota Semarang tahun 2025.

**Tabel 5. Jumlah Penduduk Disabilitas di Kota Semarang
Tahun 2025**

Jenis Kelamin	Jumlah
Laki-laki	1.555
Perempuan	1.081
Total Warga Disabilitas	2.636

Sumber : Disdukcapil Kota Semarang

Berdasarkan data penyandang disabilitas di Kota Semarang tahun 2025, tercatat sebanyak 2.636 warga penyandang disabilitas, terdiri dari 1.555 laki-laki (58,99%) dan 1.081 perempuan (41,01%). Data tersebut menunjukkan bahwa jumlah penyandang disabilitas laki-laki lebih banyak dibandingkan perempuan dengan selisih 474 jiwa. Perbedaan ini memberikan gambaran bahwa kebutuhan layanan rehabilitasi, kesehatan, pendidikan inklusif, pelatihan keterampilan, serta pemberdayaan ekonomi perlu mempertimbangkan proporsi penyandang disabilitas berdasarkan jenis kelamin.

Oleh karena itu, perencanaan pembangunan di Kota Semarang perlu memastikan bahwa seluruh program yang berkaitan dengan penyandang disabilitas disusun secara inklusif dan responsif gender, sehingga baik laki-laki maupun perempuan penyandang disabilitas memperoleh kesempatan yang sama untuk meningkatkan kualitas hidup dan berpartisipasi secara aktif dalam pembangunan daerah.

BAB IV

PROFIL GENDER KOTA SEMARANG

4.1 Indeks Ketimpangan Gender (IKG)

Indeks Ketimpangan Gender (IKG) merupakan indikator yang mengukur tingkat ketimpangan antara perempuan dan laki-laki dalam tiga dimensi utama, yaitu kesehatan reproduksi, pemberdayaan, dan partisipasi dalam pasar kerja. Nilai IKG berkisar antara 0 hingga 1, di mana semakin rendah nilai IKG menunjukkan semakin kecil kesenjangan gender dan semakin baik capaian kesetaraan gender di suatu daerah. Tabel berikut menyajikan perkembangan Indeks Ketimpangan Gender (IKG) Kota Semarang selama periode 2023–2025 sebagai gambaran kemajuan pembangunan yang responsif gender di Kota Semarang.

**Tabel 6. Indeks Ketimpangan Gender Kota Semarang
Tahun 2023-2025**

IKG	2023	2024	2025
Kota Semarang	0.168	0.140	0.125

Sumber : BPS Kota Semarang, 2025

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Semarang, Indeks Ketimpangan Gender (IKG) Kota Semarang menunjukkan tren yang terus membaik selama periode 2023–2025. Nilai IKG mengalami penurunan dari 0,168 pada tahun 2023, menjadi 0,140 pada tahun 2024, dan kembali turun menjadi 0,125 pada tahun 2025. Dalam pengukuran IKG, semakin rendah nilai indeks menunjukkan semakin kecil ketimpangan antara laki-laki dan perempuan dalam aspek kesehatan reproduksi, pemberdayaan, dan partisipasi di pasar kerja. Dengan demikian, penurunan nilai IKG tersebut mengindikasikan bahwa kesenjangan gender di Kota Semarang semakin berkurang dan hasil pembangunan yang responsif gender semakin baik.

Secara kuantitatif, terjadi penurunan sebesar 0,028 poin dari tahun 2023 ke 2024 atau sekitar 16,7 persen, kemudian kembali turun 0,015 poin

dari tahun 2024 ke 2025 atau sekitar 10,7 persen. Jika dibandingkan dengan tahun 2023, maka selama dua tahun terakhir nilai IKG Kota Semarang telah menurun sebesar 0,043 poin atau sekitar 25,6 persen. Penurunan yang konsisten ini menunjukkan bahwa berbagai kebijakan dan program pembangunan yang mengintegrasikan perspektif gender mulai memberikan dampak positif terhadap peningkatan kesetaraan antara perempuan dan laki-laki di berbagai sektor pembangunan.

Perbaikan nilai IKG tersebut dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor, antara lain meningkatnya akses perempuan terhadap pendidikan dan kesempatan kerja, semakin luasnya partisipasi perempuan dalam pengambilan keputusan di ruang publik, serta meningkatnya kualitas pelayanan kesehatan, khususnya kesehatan reproduksi. Di samping itu, berbagai program pemerintah daerah yang berorientasi pada pengarusutamaan gender, pemberdayaan perempuan, perlindungan perempuan dan anak, serta peningkatan kapasitas ekonomi perempuan turut berkontribusi dalam menurunkan tingkat ketimpangan gender di Kota Semarang.

Meskipun capaian tersebut menunjukkan perkembangan yang positif, upaya untuk menurunkan ketimpangan gender tetap perlu dilakukan secara berkelanjutan. Pemerintah Kota Semarang masih perlu memperkuat kebijakan yang mendukung peningkatan partisipasi perempuan di sektor formal, memperluas keterwakilan perempuan dalam jabatan strategis dan politik, mengurangi kesenjangan kesempatan kerja, serta meningkatkan kualitas perlindungan terhadap perempuan dan anak. Dengan langkah tersebut diharapkan nilai IKG Kota Semarang dapat terus menurun pada tahun-tahun mendatang sehingga pembangunan yang inklusif, adil, dan berkeadilan gender dapat semakin terwujud.

4.2 Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)

Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) merupakan indikator yang menunjukkan persentase penduduk usia kerja yang aktif secara ekonomi, yaitu mereka yang bekerja atau sedang mencari pekerjaan. Indikator ini memberikan gambaran mengenai tingkat keterlibatan penduduk dalam kegiatan ekonomi sekaligus menjadi salah satu ukuran potensi tenaga kerja yang tersedia di suatu daerah. Tabel berikut menyajikan data Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Kota Semarang menurut jenis kelamin sebagai dasar untuk melihat kesenjangan partisipasi ekonomi antara laki-laki dan perempuan dalam pasar kerja.

Tabel 7. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Menurut Jenis Kelamin

Tahun 2025

IKG	2023		2024		2025	
	L	P	L	P	L	P
Kota Semarang	78,56	60,64	79,92	60,24	81,61	63,95

Sumber : BPS Kota Semarang, 2025

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Semarang, Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) menurut jenis kelamin di Kota Semarang selama periode 2023–2025 menunjukkan bahwa partisipasi laki-laki di pasar kerja masih lebih tinggi dibandingkan perempuan. Pada tahun 2023, TPAK laki-laki tercatat sebesar 78,56 persen, sedangkan perempuan 60,64 persen. Tahun 2024 meningkat menjadi 79,92 persen untuk laki-laki, sementara TPAK perempuan sedikit menurun menjadi 60,24 persen. Pada tahun 2025, partisipasi angkatan kerja mengalami peningkatan pada kedua kelompok, dengan TPAK laki-laki mencapai 81,61 persen dan perempuan 63,95 persen.

Secara umum, tren tersebut menunjukkan bahwa keterlibatan masyarakat usia kerja dalam kegiatan ekonomi terus meningkat, khususnya pada tahun 2025. TPAK laki-laki mengalami kenaikan sebesar 3,05 poin persentase selama periode 2023–2025, sedangkan TPAK perempuan meningkat sebesar 3,31 poin persentase. Meskipun pada tahun 2024 sempat terjadi sedikit penurunan partisipasi perempuan, kondisi tersebut berhasil pulih pada tahun 2025 dengan peningkatan yang cukup signifikan. Hal ini mengindikasikan bahwa semakin banyak perempuan yang mulai memasuki atau kembali ke pasar kerja seiring dengan membaiknya kondisi ekonomi dan meningkatnya peluang kerja.

Di sisi lain, masih terdapat kesenjangan partisipasi angkatan kerja antara laki-laki dan perempuan. Selisih TPAK pada tahun 2023 mencapai 17,92 poin persentase, meningkat menjadi 19,68 poin pada tahun 2024, kemudian sedikit menurun menjadi 17,66 poin pada tahun 2025. Kondisi ini menunjukkan bahwa meskipun partisipasi perempuan mengalami peningkatan, kesempatan dan keterlibatan perempuan dalam pasar kerja masih belum setara dengan laki-laki. Perbedaan tersebut dapat dipengaruhi oleh berbagai faktor, seperti masih kuatnya pembagian peran domestik dalam rumah tangga, tanggung jawab pengasuhan anak dan keluarga yang lebih banyak dipikul perempuan, keterbatasan akses terhadap pekerjaan yang fleksibel, serta adanya perbedaan kesempatan kerja pada sektor-sektor tertentu.

Peningkatan TPAK perempuan pada tahun 2025 merupakan perkembangan yang positif karena menunjukkan semakin besarnya kontribusi perempuan dalam pembangunan ekonomi daerah. Kondisi ini dapat mencerminkan meningkatnya akses perempuan terhadap pendidikan, pelatihan keterampilan, peluang berwirausaha, maupun kesempatan bekerja di sektor formal dan informal. Berbagai program pemberdayaan ekonomi perempuan, pengembangan usaha mikro,

pelatihan vokasi, serta kebijakan yang mendukung kesetaraan kesempatan kerja juga berpotensi memberikan kontribusi terhadap peningkatan tersebut.

Meskipun demikian, Pemerintah Kota Semarang masih perlu terus memperkuat kebijakan yang mendorong peningkatan partisipasi perempuan dalam dunia kerja. Upaya tersebut dapat dilakukan melalui penyediaan pelatihan berbasis kebutuhan pasar kerja, perluasan akses terhadap lapangan pekerjaan yang ramah keluarga, peningkatan keterampilan digital dan kewirausahaan bagi perempuan, penguatan perlindungan pekerja perempuan, serta pengembangan fasilitas pendukung seperti layanan penitipan anak. Dengan demikian, kesenjangan partisipasi angkatan kerja antara laki-laki dan perempuan dapat terus diperkecil sehingga pembangunan ekonomi Kota Semarang menjadi semakin inklusif dan berkeadilan gender.

4.3 Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) merupakan indikator komposit yang digunakan untuk mengukur keberhasilan pembangunan manusia melalui tiga dimensi dasar, yaitu kesehatan, pendidikan, dan standar hidup layak. IPM memberikan gambaran mengenai kualitas hidup penduduk sekaligus menjadi salah satu ukuran keberhasilan pembangunan yang berorientasi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat. Tabel berikut menyajikan perkembangan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kota Semarang sebagai dasar untuk melihat capaian pembangunan manusia dan mendukung analisis kesetaraan gender dalam memperoleh akses terhadap layanan dasar dan kesempatan pembangunan.

Tabel 8. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Menurut Jenis Kelamin Tahun 2025

IPG	2023		2024		2025	
	L	P	L	P	L	P
Kota Semarang	86,53	82,99	87,05	83,81	87,57	84,40

Sumber : BPS Kota Semarang, 2025

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Semarang, Indeks Pembangunan Manusia (IPM) menurut jenis kelamin selama periode 2023–2025 menunjukkan tren peningkatan baik pada laki-laki maupun perempuan. Pada tahun 2023, IPM laki-laki tercatat sebesar 86,53, sedangkan perempuan 82,99. Tahun 2024 meningkat menjadi 87,05 untuk laki-laki dan 83,81 untuk perempuan. Selanjutnya pada tahun 2025, IPM kembali mengalami peningkatan menjadi 87,57 pada laki-laki dan 84,40 pada perempuan. Peningkatan ini mencerminkan bahwa kualitas pembangunan manusia di Kota Semarang terus mengalami kemajuan, baik dari aspek kesehatan, pendidikan, maupun standar hidup layak.

Selama kurun waktu 2023–2025, IPM laki-laki meningkat sebesar 1,04 poin, sedangkan IPM perempuan meningkat sebesar 1,41 poin. Kenaikan IPM perempuan yang lebih tinggi dibandingkan laki-laki menunjukkan adanya perkembangan yang cukup baik dalam peningkatan kualitas hidup perempuan. Hal ini mengindikasikan bahwa berbagai upaya pembangunan yang diarahkan pada peningkatan akses pendidikan, pelayanan kesehatan, serta pemberdayaan ekonomi perempuan mulai memberikan hasil yang positif.

Meskipun demikian, masih terdapat kesenjangan nilai IPM antara laki-laki dan perempuan. Pada tahun 2023 selisih IPM mencapai 3,54 poin, kemudian menurun menjadi 3,24 poin pada tahun 2024 dan kembali mengecil menjadi 3,17 poin pada tahun 2025. Penurunan selisih tersebut menunjukkan bahwa kualitas pembangunan manusia perempuan tumbuh lebih cepat dibandingkan laki-laki sehingga kesenjangan pembangunan manusia berdasarkan jenis kelamin secara bertahap semakin menyempit.

Kondisi ini merupakan indikator positif dalam mewujudkan pembangunan yang lebih inklusif dan berkeadilan gender.

Peningkatan IPM perempuan dapat dipengaruhi oleh semakin baiknya akses terhadap layanan pendidikan hingga jenjang yang lebih tinggi, meningkatnya kualitas pelayanan kesehatan termasuk kesehatan ibu dan anak, bertambahnya kesempatan mengikuti pelatihan keterampilan, serta semakin luasnya partisipasi perempuan dalam kegiatan ekonomi dan sosial. Di sisi lain, tingginya IPM laki-laki menunjukkan bahwa kelompok ini juga terus memperoleh manfaat dari pembangunan yang berlangsung secara berkelanjutan di Kota Semarang.

Ke depan, Pemerintah Kota Semarang perlu mempertahankan capaian tersebut melalui penguatan kebijakan pembangunan yang responsif gender. Upaya peningkatan kualitas pendidikan, pemerataan akses layanan kesehatan, perluasan kesempatan kerja yang setara, peningkatan keterampilan masyarakat, serta pemberdayaan perempuan perlu terus diperkuat agar kesenjangan pembangunan manusia antara laki-laki dan perempuan semakin kecil. Dengan demikian, pembangunan manusia di Kota Semarang tidak hanya mengalami peningkatan dari sisi angka, tetapi juga semakin merata sehingga manfaat pembangunan dapat dirasakan secara adil oleh seluruh masyarakat tanpa membedakan jenis kelamin.

4.4 Angka Harapan Hidup (AHH)

Angka Harapan Hidup (AHH) merupakan indikator yang menunjukkan perkiraan rata-rata lama hidup yang dapat dicapai oleh seseorang sejak lahir apabila pola mortalitas pada tahun tersebut tetap berlaku sepanjang hidupnya. Indikator ini mencerminkan derajat kesehatan masyarakat serta keberhasilan pembangunan di bidang kesehatan, gizi, sanitasi, dan pelayanan kesehatan. Tabel berikut menyajikan Angka

Harapan Hidup (AHH) Kota Semarang menurut jenis kelamin sebagai dasar untuk melihat capaian kesehatan penduduk sekaligus mengidentifikasi perbedaan kondisi kesehatan antara laki-laki dan perempuan dalam perspektif gender.

**Tabel 9. Angka Harapan Hidup (AHH) Menurut Jenis Kelamin
Tahun 2025**

IPG	2023		2024		2025	
	L	P	L	P	L	P
Kota Semarang	76,13	79,83	76,42	80,08	76,65	80,66

Sumber : BPS Kota Semarang, 2025

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Semarang, Angka Harapan Hidup (AHH) menurut jenis kelamin selama periode 2023–2025 menunjukkan tren yang terus meningkat baik pada laki-laki maupun perempuan. Pada tahun 2023, AHH laki-laki tercatat sebesar 76,13 tahun, sedangkan perempuan mencapai 79,83 tahun. Tahun 2024 meningkat menjadi 76,42 tahun untuk laki-laki dan 80,08 tahun untuk perempuan. Selanjutnya pada tahun 2025, AHH kembali mengalami peningkatan menjadi 76,65 tahun pada laki-laki dan 80,66 tahun pada perempuan. Peningkatan ini menunjukkan bahwa derajat kesehatan masyarakat Kota Semarang secara umum semakin baik, yang tercermin dari semakin panjangnya rata-rata usia hidup penduduk.

Selama periode 2023–2025, AHH laki-laki meningkat sebesar 0,52 tahun, sedangkan AHH perempuan meningkat sebesar 0,83 tahun. Kenaikan yang lebih besar pada perempuan menunjukkan bahwa peningkatan kualitas kesehatan dan harapan hidup perempuan berlangsung lebih cepat dibandingkan laki-laki. Hal ini mengindikasikan adanya perbaikan pada berbagai faktor yang memengaruhi kesehatan

masyarakat, seperti akses terhadap layanan kesehatan, peningkatan kesadaran akan pola hidup sehat, perbaikan gizi, serta semakin baiknya pelayanan kesehatan ibu dan anak.

Data tersebut juga menunjukkan bahwa perempuan secara konsisten memiliki Angka Harapan Hidup yang lebih tinggi dibandingkan laki-laki. Selisih AHH antara perempuan dan laki-laki mencapai 3,70 tahun pada tahun 2023, meningkat menjadi 3,66 tahun pada tahun 2024, dan 4,01 tahun pada tahun 2025. Perbedaan ini merupakan kondisi yang umum dijumpai, karena secara biologis perempuan cenderung memiliki daya tahan hidup yang lebih tinggi. Selain itu, faktor perilaku dan gaya hidup juga berpengaruh, di mana laki-laki umumnya memiliki risiko lebih besar terhadap penyakit tidak menular, kecelakaan kerja, kebiasaan merokok, maupun aktivitas yang berisiko terhadap kesehatan.

Peningkatan Angka Harapan Hidup pada kedua kelompok menunjukkan bahwa pembangunan di bidang kesehatan di Kota Semarang berjalan ke arah yang positif. Berbagai program peningkatan layanan kesehatan dasar, perluasan cakupan jaminan kesehatan, penguatan pelayanan kesehatan ibu dan anak, pengendalian penyakit menular maupun tidak menular, serta peningkatan kualitas lingkungan hidup diperkirakan turut berkontribusi terhadap meningkatnya usia harapan hidup masyarakat.

Meskipun capaian tersebut cukup menggembirakan, Pemerintah Kota Semarang perlu terus memperkuat upaya promotif dan preventif dalam bidang kesehatan, terutama untuk menurunkan faktor risiko penyakit pada laki-laki serta mempertahankan kualitas kesehatan perempuan di setiap siklus kehidupan. Di samping itu, peningkatan layanan kesehatan bagi lanjut usia, penguatan edukasi mengenai pola hidup sehat, peningkatan aktivitas fisik masyarakat, serta pengendalian faktor risiko penyakit kronis perlu terus dilakukan agar Angka Harapan Hidup

masyarakat Kota Semarang dapat terus meningkat secara berkelanjutan. Dengan demikian, peningkatan usia harapan hidup tidak hanya mencerminkan keberhasilan pembangunan sektor kesehatan, tetapi juga menjadi indikator meningkatnya kualitas hidup masyarakat secara keseluruhan.

4.5 Pengeluaran Riil per Kapita

Pengeluaran Riil per Kapita merupakan indikator yang menggambarkan kemampuan daya beli masyarakat berdasarkan rata-rata pengeluaran per kapita yang telah disesuaikan dengan perubahan harga (riil). Indikator ini digunakan sebagai salah satu komponen dalam penghitungan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) untuk mencerminkan tingkat kesejahteraan dan standar hidup layak penduduk. Tabel berikut menyajikan data Pengeluaran Riil per Kapita Kota Semarang menurut jenis kelamin sebagai dasar untuk melihat perbedaan tingkat kesejahteraan ekonomi laki-laki dan perempuan dalam perspektif gender.

Tabel 10. Pengeluaran Riil per Kapita Menurut Jenis Kelamin (Ribuan Rupiah)
Tahun 2025

IPG	2023		2024		2025	
	L	P	L	P	L	P
Kota Semarang	17.549	15.238	18.175	15.750	18.893	16.115

Sumber : BPS Kota Semarang, 2025

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Semarang, pengeluaran riil per kapita menurut jenis kelamin selama periode 2023–2025 menunjukkan tren yang terus meningkat baik pada laki-laki maupun perempuan. Pada tahun 2023, pengeluaran riil per kapita laki-laki tercatat

sebesar Rp17,549 juta, sedangkan perempuan sebesar Rp15,238 juta. Pada tahun 2024 meningkat menjadi Rp18,175 juta untuk laki-laki dan Rp15,750 juta untuk perempuan. Selanjutnya pada tahun 2025 kembali meningkat menjadi Rp18,893 juta pada laki-laki dan Rp16,115 juta pada perempuan. Kenaikan tersebut mengindikasikan adanya peningkatan kemampuan ekonomi masyarakat dalam memenuhi kebutuhan hidup serta mencerminkan perbaikan daya beli penduduk di Kota Semarang.

Selama periode 2023–2025, pengeluaran riil per kapita laki-laki meningkat sebesar Rp1,344 juta atau sekitar 7,7 persen, sedangkan perempuan meningkat sebesar Rp877 ribu atau sekitar 5,8 persen. Peningkatan pada kedua kelompok menunjukkan bahwa manfaat pertumbuhan ekonomi dapat dirasakan baik oleh laki-laki maupun perempuan. Namun demikian, laju peningkatan pengeluaran riil laki-laki masih lebih tinggi dibandingkan perempuan sehingga menunjukkan bahwa kemampuan ekonomi laki-laki masih relatif lebih besar.

Dilihat dari perbandingan menurut jenis kelamin, pengeluaran riil per kapita laki-laki secara konsisten lebih tinggi dibandingkan perempuan. Selisih pengeluaran riil mencapai sekitar Rp2,311 juta pada tahun 2023, meningkat menjadi Rp2,425 juta pada tahun 2024, dan kembali melebar menjadi sekitar Rp2,778 juta pada tahun 2025. Meningkatnya selisih tersebut mengindikasikan bahwa kesenjangan kemampuan ekonomi antara laki-laki dan perempuan masih cukup nyata. Kondisi ini dapat dipengaruhi oleh berbagai faktor, antara lain perbedaan tingkat partisipasi dalam angkatan kerja, variasi jenis pekerjaan yang ditekuni, kesenjangan pendapatan, proporsi perempuan yang bekerja pada sektor informal, serta masih adanya tanggung jawab domestik yang memengaruhi kesempatan perempuan untuk memperoleh penghasilan yang lebih tinggi.

Meskipun demikian, peningkatan pengeluaran riil perempuan dari tahun ke tahun tetap menunjukkan perkembangan yang positif. Hal ini

mengindikasikan bahwa kondisi ekonomi perempuan secara bertahap mengalami perbaikan, yang kemungkinan didukung oleh meningkatnya partisipasi perempuan dalam kegiatan ekonomi, berkembangnya usaha mikro dan kewirausahaan perempuan, serta berbagai program pemberdayaan ekonomi yang dilaksanakan oleh pemerintah maupun sektor swasta.

Ke depan, Pemerintah Kota Semarang perlu terus memperkuat kebijakan yang mendukung peningkatan kemandirian ekonomi perempuan, antara lain melalui perluasan akses terhadap lapangan pekerjaan yang layak, pelatihan keterampilan berbasis kebutuhan pasar, penguatan usaha mikro dan koperasi perempuan, peningkatan akses terhadap pembiayaan, serta pengembangan ekonomi digital. Selain meningkatkan kesejahteraan perempuan, langkah tersebut juga diharapkan dapat memperkecil kesenjangan ekonomi berdasarkan jenis kelamin sehingga manfaat pembangunan dapat dirasakan secara lebih merata oleh seluruh masyarakat Kota Semarang.

4.6 Indeks Pembangunan Gender (IPG)

Indeks Pembangunan Gender (IPG) merupakan indikator yang mengukur keberhasilan pembangunan manusia dengan membandingkan capaian antara perempuan dan laki-laki dalam aspek kesehatan, pendidikan, dan standar hidup layak. Nilai IPG menunjukkan tingkat kesetaraan capaian pembangunan manusia berdasarkan gender, di mana semakin mendekati angka 100 berarti semakin kecil kesenjangan pembangunan antara laki-laki dan perempuan. Tabel berikut menyajikan perkembangan Indeks Pembangunan Gender (IPG) Kota Semarang sebagai dasar untuk melihat kemajuan kesetaraan gender dalam hasil-hasil pembangunan manusia dari tahun ke tahun.

Tabel 11. Indeks Pembangunan Gender (IPG)

Tahun 2025

IPG	2023	2024	2025
Kota Semarang	95,91	96,28	96,38

Sumber : BPS Kota Semarang, 2025

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Semarang, Indeks Pembangunan Gender (IPG) Kota Semarang selama periode 2023–2025 menunjukkan tren yang terus meningkat. Nilai IPG tercatat sebesar 95,91 pada tahun 2023, meningkat menjadi 96,28 pada tahun 2024, dan kembali naik menjadi 96,38 pada tahun 2025. Peningkatan ini menunjukkan bahwa kesenjangan capaian pembangunan manusia antara laki-laki dan perempuan di Kota Semarang semakin kecil. Semakin tinggi nilai IPG dan semakin mendekati angka 100, berarti pembangunan manusia antara laki-laki dan perempuan semakin setara.

Selama periode 2023–2025, nilai IPG meningkat sebesar 0,47 poin, dengan kenaikan 0,37 poin pada tahun 2024 dan 0,10 poin pada tahun 2025. Meskipun laju peningkatannya relatif kecil, tren yang konsisten ini menunjukkan adanya kemajuan yang berkelanjutan dalam mewujudkan pembangunan yang lebih inklusif dan responsif gender. Nilai IPG yang telah berada di atas 96 juga mengindikasikan bahwa kualitas pembangunan manusia perempuan di Kota Semarang telah mendekati capaian pembangunan manusia laki-laki.

Peningkatan IPG tersebut sejalan dengan membaiknya berbagai indikator pembangunan manusia menurut jenis kelamin. Selama beberapa tahun terakhir, perempuan di Kota Semarang menunjukkan peningkatan pada aspek kesehatan yang tercermin dari meningkatnya Angka Harapan Hidup, peningkatan kualitas pendidikan, serta membaiknya kemampuan ekonomi yang ditunjukkan oleh kenaikan pengeluaran riil per kapita. Di sisi lain, peningkatan partisipasi perempuan dalam dunia kerja juga

memberikan kontribusi terhadap semakin mengecilnya kesenjangan pembangunan antara laki-laki dan perempuan.

Meskipun demikian, nilai IPG yang belum mencapai angka 100 menunjukkan bahwa masih terdapat ruang untuk meningkatkan kesetaraan gender dalam pembangunan. Beberapa tantangan yang masih perlu mendapat perhatian antara lain kesenjangan partisipasi angkatan kerja, perbedaan tingkat pendapatan dan pengeluaran riil, keterwakilan perempuan dalam jabatan pengambil keputusan, serta akses terhadap pekerjaan yang berkualitas. Oleh karena itu, upaya pengarusutamaan gender perlu terus diintegrasikan dalam setiap kebijakan dan program pembangunan agar manfaat pembangunan dapat dirasakan secara setara oleh seluruh masyarakat.

Secara keseluruhan, capaian IPG Kota Semarang selama tahun 2023–2025 menunjukkan bahwa pembangunan yang responsif gender telah memberikan hasil yang positif. Ke depan, Pemerintah Kota Semarang perlu mempertahankan bahkan meningkatkan capaian tersebut melalui penguatan kebijakan yang mendukung peningkatan kualitas pendidikan, kesehatan, pemberdayaan ekonomi, perlindungan perempuan, serta perluasan kesempatan bagi perempuan untuk berpartisipasi dalam berbagai bidang pembangunan. Dengan demikian, kesenjangan pembangunan manusia antara laki-laki dan perempuan dapat terus diperkecil sehingga terwujud pembangunan yang semakin adil, inklusif, dan berkelanjutan.

4.7 Rata-Rata Lama Sekolah (RLS)

Rata-Rata Lama Sekolah (RLS) merupakan indikator yang menunjukkan rata-rata jumlah tahun pendidikan formal yang telah ditempuh oleh penduduk berusia 25 tahun ke atas. Indikator ini mencerminkan capaian pendidikan penduduk sekaligus menjadi salah satu

komponen dalam penghitungan Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Tabel berikut menyajikan data Rata-Rata Lama Sekolah (RLS) Kota Semarang menurut jenis kelamin sebagai dasar untuk melihat capaian pendidikan serta kesenjangan akses pendidikan antara laki-laki dan perempuan dalam perspektif gender.

**Tabel 12. Rata-Rata Lama Sekolah Menurut Jenis Kelamin
Tahun 2025**

IPG	2023		2024		2025	
	L	P	L	P	L	P
Kota Semarang	11,54	10,47	11,55	10,76	11,56	10,82

Sumber : BPS Kota Semarang, 2025

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Semarang, Rata-Rata Lama Sekolah (RLS) menurut jenis kelamin selama periode 2023–2025 menunjukkan tren yang terus meningkat, baik pada laki-laki maupun perempuan. Pada tahun 2023, RLS laki-laki tercatat sebesar 11,54 tahun, sedangkan perempuan 10,47 tahun. Pada tahun 2024, rata-rata lama sekolah meningkat menjadi 11,55 tahun untuk laki-laki dan 10,76 tahun untuk perempuan. Selanjutnya pada tahun 2025, RLS kembali meningkat menjadi 11,56 tahun pada laki-laki dan 10,82 tahun pada perempuan. Data tersebut menunjukkan bahwa penduduk Kota Semarang secara umum telah menempuh pendidikan hingga jenjang kelas XI SMA/ sederajat untuk laki-laki dan sekitar kelas X–XI SMA/ sederajat untuk perempuan.

Selama periode 2023–2025, rata-rata lama sekolah laki-laki meningkat sebesar 0,02 tahun, sedangkan perempuan meningkat sebesar 0,35 tahun. Meskipun peningkatan pada laki-laki relatif stabil, perempuan mengalami peningkatan yang lebih besar. Kondisi ini menunjukkan bahwa

akses dan keberlanjutan pendidikan bagi perempuan terus mengalami perbaikan sehingga mampu memperkecil kesenjangan pendidikan antara laki-laki dan perempuan.

Perbedaan RLS antara laki-laki dan perempuan juga menunjukkan tren yang semakin mengecil. Pada tahun 2023 selisih rata-rata lama sekolah mencapai 1,07 tahun, kemudian menurun menjadi 0,79 tahun pada tahun 2024, dan kembali mengecil menjadi 0,74 tahun pada tahun 2025. Penurunan selisih ini mengindikasikan bahwa perempuan semakin mampu mempertahankan pendidikan hingga jenjang yang lebih tinggi. Hal tersebut mencerminkan meningkatnya kesadaran masyarakat akan pentingnya pendidikan bagi anak perempuan serta semakin baiknya akses terhadap layanan pendidikan yang setara.

Peningkatan rata-rata lama sekolah perempuan dapat dipengaruhi oleh berbagai faktor, seperti meningkatnya angka partisipasi sekolah pada jenjang menengah dan tinggi, berkurangnya angka putus sekolah, tersedianya berbagai program bantuan pendidikan, serta semakin kuatnya dukungan keluarga dan masyarakat terhadap pendidikan perempuan. Selain itu, berbagai kebijakan pemerintah dalam pemerataan akses pendidikan dan penguatan kualitas pendidikan juga berkontribusi terhadap peningkatan capaian tersebut.

Meskipun menunjukkan perkembangan yang positif, Pemerintah Kota Semarang tetap perlu mendorong peningkatan rata-rata lama sekolah hingga mendekati atau melampaui 12 tahun, sejalan dengan target pendidikan menengah universal. Upaya tersebut dapat dilakukan melalui penguatan program pencegahan putus sekolah, perluasan akses pendidikan menengah dan tinggi, pemberian bantuan pendidikan bagi keluarga kurang mampu, serta peningkatan kualitas layanan pendidikan yang inklusif dan responsif gender. Dengan demikian, kualitas sumber daya manusia Kota Semarang dapat terus meningkat, sekaligus

memperkecil kesenjangan pendidikan antara laki-laki dan perempuan sebagai bagian dari upaya mewujudkan pembangunan yang berkeadilan gender.

4.8 Angka Harapan Lama Sekolah (HLS)

Harapan Lama Sekolah (HLS) merupakan indikator yang menunjukkan perkiraan jumlah tahun pendidikan formal yang diharapkan dapat ditempuh oleh seorang anak pada usia tertentu apabila mengikuti pola partisipasi sekolah yang berlaku pada saat ini. Indikator ini mencerminkan peluang penduduk untuk memperoleh pendidikan dan menjadi salah satu komponen dalam penghitungan Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Tabel berikut menyajikan data Harapan Lama Sekolah (HLS) Kota Semarang menurut jenis kelamin sebagai dasar untuk melihat peluang akses pendidikan bagi laki-laki dan perempuan serta mendukung analisis kesetaraan gender di bidang pendidikan.

Tabel 13. Angka Harapan Lama Sekolah (HLS) Menurut Jenis Kelamin Tahun 2025

IPG	2023		2024		2025	
	L	P	L	P	L	P
Kota Semarang	15,76	15,54	15,78	15,56	15,79	15,57

Sumber : BPS Kota Semarang, 2025

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Semarang, Angka Harapan Lama Sekolah (HLS) menurut jenis kelamin selama periode 2023–2025 menunjukkan kondisi yang relatif tinggi dan stabil, dengan kecenderungan meningkat baik pada laki-laki maupun perempuan. Pada tahun 2023, HLS laki-laki tercatat sebesar 15,76 tahun, sedangkan

perempuan 15,54 tahun. Tahun 2024 meningkat menjadi 15,78 tahun untuk laki-laki dan 15,56 tahun untuk perempuan. Selanjutnya pada tahun 2025, HLS kembali mengalami peningkatan menjadi 15,79 tahun pada laki-laki dan 15,57 tahun pada perempuan. Capaian tersebut menunjukkan bahwa anak-anak usia sekolah di Kota Semarang diperkirakan memiliki kesempatan untuk menempuh pendidikan hingga sekitar 15,5–15,8 tahun, atau setara dengan pendidikan hingga awal jenjang perguruan tinggi (Diploma atau semester awal Strata 1), apabila pola pendidikan yang berlangsung saat ini tetap terjaga.

Selama periode 2023–2025, HLS laki-laki meningkat sebesar 0,03 tahun, sedangkan HLS perempuan juga meningkat sebesar 0,03 tahun. Kenaikan yang relatif kecil menunjukkan bahwa indikator ini telah berada pada tingkat yang cukup tinggi sehingga peningkatannya berlangsung secara bertahap. Kondisi tersebut mencerminkan bahwa akses pendidikan di Kota Semarang telah relatif merata dan peluang anak-anak untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi terus terjaga.

Dari sisi kesetaraan gender, kesenjangan HLS antara laki-laki dan perempuan tergolong sangat kecil dan stabil. Selisih HLS hanya sekitar 0,22 tahun pada tahun 2023, 2024, maupun 2025. Perbedaan yang tidak terlalu besar ini menunjukkan bahwa kesempatan memperoleh pendidikan antara anak laki-laki dan perempuan di Kota Semarang telah berlangsung secara cukup setara. Dengan kata lain, baik anak laki-laki maupun perempuan memiliki peluang yang hampir sama untuk mengakses pendidikan hingga jenjang yang lebih tinggi.

Tingginya nilai HLS tersebut menunjukkan keberhasilan pembangunan di bidang pendidikan, yang didukung oleh ketersediaan sarana dan prasarana pendidikan, pemerataan akses sekolah, program wajib belajar, bantuan biaya pendidikan, serta meningkatnya kesadaran masyarakat mengenai pentingnya pendidikan bagi seluruh anak tanpa

membedakan jenis kelamin. Selain itu, kondisi Kota Semarang sebagai pusat pemerintahan, perdagangan, dan pendidikan di Jawa Tengah juga memberikan keuntungan berupa tersedianya berbagai pilihan lembaga pendidikan, mulai dari tingkat dasar hingga perguruan tinggi.

Ke depan, Pemerintah Kota Semarang perlu mempertahankan bahkan meningkatkan capaian ini dengan memastikan bahwa kesempatan pendidikan yang tinggi tersebut benar-benar dapat diwujudkan menjadi lama sekolah yang nyata. Upaya yang dapat dilakukan antara lain melalui pencegahan angka putus sekolah, peningkatan akses pendidikan tinggi bagi keluarga kurang mampu, penyediaan beasiswa, penguatan pendidikan vokasi, serta peningkatan kualitas pembelajaran. Dengan demikian, tingginya harapan lama sekolah tidak hanya mencerminkan peluang yang tersedia, tetapi juga diikuti dengan meningkatnya jumlah penduduk yang berhasil menyelesaikan pendidikan hingga jenjang yang lebih tinggi, sehingga mampu mendukung peningkatan kualitas sumber daya manusia dan pembangunan yang berkeadilan gender di Kota Semarang.

4.9 Gender Bidang Pendidikan

A. Pendidikan Ramah Anak

Pendidikan Ramah Anak adalah pendekatan penyelenggaraan pendidikan yang menjamin terpenuhinya hak anak atas pendidikan secara aman, inklusif, nondiskriminatif, dan berpusat pada kepentingan terbaik anak, serta melindungi anak dari segala bentuk kekerasan, perundungan, eksploitasi, dan perlakuan salah di lingkungan pendidikan. Dalam praktiknya, pendidikan ramah anak ditandai dengan lingkungan belajar yang aman dan nyaman, hubungan pendidik dan peserta didik yang positif dan menghargai, metode pembelajaran yang aktif dan menyenangkan,

serta partisipasi anak yang dihargai sesuai dengan usia dan tahap perkembangannya. Pendekatan ini juga melibatkan peran orang tua, sekolah, dan masyarakat untuk mendukung tumbuh kembang anak secara optimal.

Lembaga PAUD Terakreditasi merupakan indikator yang menunjukkan banyaknya satuan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) yang telah memenuhi standar mutu pendidikan berdasarkan hasil akreditasi. Akreditasi menjadi salah satu tolok ukur kualitas penyelenggaraan layanan PAUD dalam memberikan akses pendidikan yang ramah dan layak bagi seluruh anak sejak usia dini. Tabel berikut menyajikan jumlah lembaga PAUD terakreditasi di Kota Semarang sebagai gambaran ketersediaan layanan pendidikan anak usia dini yang berkualitas dan mendukung terwujudnya akses pendidikan yang setara bagi anak laki-laki maupun perempuan.

Tabel 14. Jumlah Lembaga PAUD Terakreditasi

ELEMEN DATA	TAHUN	
	2024	2025
Jumlah Lembaga PAUD Terakreditasi	693	701

Sumber : <https://data.semarangkota.go.id/datasektoral/detail/12208>

Jumlah PAUD terakreditasi di Kota Semarang meningkat dari 693 lembaga pada tahun 2024 menjadi 701 lembaga pada tahun 2025, yang menunjukkan komitmen pemerintah daerah dalam meningkatkan mutu layanan pendidikan anak usia dini sesuai standar nasional. Peningkatan ini memperkuat ketersediaan layanan PAUD yang berkualitas dan ramah anak bagi anak usia 5–6 tahun.

Dalam konteks kebijakan wajib belajar 12 tahun + 1 tahun PAUD, bertambahnya PAUD terakreditasi menjadi fondasi penting bagi kesiapan anak memasuki jenjang SD. Kondisi ini juga sejalan dengan tingginya tingkat partisipasi PAUD, sehingga kebijakan tersebut tidak hanya bersifat kebijakan normatif, tetapi didukung oleh kapasitas layanan yang memadai

untuk menjamin pemenuhan hak anak atas pendidikan. Bertambahnya PAUD terakreditasi juga menegaskan komitmen pemerintah daerah dalam memperkuat pendidikan usia dini sebagai bagian integral dari sistem pendidikan berkelanjutan.

B. Tingkat Partisipasi Warga

Tingkat Partisipasi Warga Usia Sekolah merupakan indikator yang menunjukkan persentase anak usia sekolah yang mengikuti layanan pendidikan sesuai dengan jenjang usianya, mulai dari Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) hingga Sekolah Menengah Pertama (SMP). Indikator ini menggambarkan tingkat akses masyarakat terhadap layanan pendidikan dasar dan menjadi salah satu ukuran keberhasilan pemerintah dalam mewujudkan pemerataan pendidikan yang inklusif. Tabel berikut menyajikan tingkat partisipasi warga usia sekolah di Kota Semarang.

Tabel 15. Tingkat Partisipasi Warga Usia Sekolah di Kota Semarang Dalam Pendidikan

ELEMEN DATA	TAHUN	
	2024	2025
Tingkat partisipasi warga negara usia 5-6 tahun yang berpartisipasi dalam PAUD (SPM)	97,75	103,27
usia 7-12 th yg berpartisipasi dalam Pendidikan dasar	101,50%	97,86%
usia 13-15 th yg berpartisipasi dalam Pendidikan menengah pertama	99,50	-
usia 7-18 th yg belum menyelesaikan Pendidikan dasar dan menengah yang berpartisipasi dalam Pendidikan kesetaraan (SPM)	83.58	-

Sumber : <https://data.semarangkota.go.id/datasektoral/detail/12208>

Berdasarkan data capaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) bidang pendidikan Tahun 2024–2025, secara umum Pemerintah Kota Semarang telah menunjukkan komitmen yang kuat dalam memperluas akses layanan pendidikan bagi seluruh anak tanpa membedakan jenis kelamin. Tingginya tingkat partisipasi pada berbagai jenjang pendidikan mencerminkan bahwa kesempatan memperoleh layanan pendidikan telah tersedia secara luas. Namun demikian, dari perspektif gender, capaian agregat tersebut belum dapat sepenuhnya menggambarkan apakah anak laki-laki dan anak perempuan memperoleh akses, partisipasi, serta manfaat yang setara karena data masih disajikan secara keseluruhan dan belum dipilah menurut jenis kelamin.

Pada jenjang Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), tingkat partisipasi anak usia 5–6 tahun meningkat dari 97,75 persen pada tahun 2024 menjadi 103,27 persen pada tahun 2025. Capaian di atas 100 persen menunjukkan bahwa layanan PAUD telah mampu menjangkau lebih banyak anak dibandingkan jumlah sasaran yang ditetapkan, yang dapat dipengaruhi oleh perpindahan penduduk atau adanya anak dari luar wilayah sasaran yang memperoleh layanan. Dari perspektif gender, kondisi ini merupakan peluang yang baik untuk memastikan bahwa anak laki-laki maupun anak perempuan memperoleh kesempatan yang sama dalam mengakses pendidikan sejak usia dini, mengingat pendidikan pada fase awal merupakan fondasi penting dalam mengurangi kesenjangan gender pada jenjang pendidikan berikutnya.

Sementara itu, tingkat partisipasi warga negara usia 7–12 tahun dalam pendidikan dasar mengalami penurunan dari 101,50 persen pada tahun 2024 menjadi 97,86 persen pada tahun 2025. Meskipun capaian tersebut masih tergolong tinggi, penurunan ini perlu menjadi perhatian karena dapat mengindikasikan adanya anak usia sekolah dasar yang belum terjangkau layanan pendidikan. Dari sudut pandang gender,

diperlukan data terpilah untuk mengetahui apakah penurunan tersebut lebih banyak dialami oleh anak laki-laki atau anak perempuan. Informasi tersebut penting sebagai dasar penyusunan kebijakan yang responsif gender sehingga hambatan akses pendidikan dapat diidentifikasi dan ditangani secara tepat sesuai karakteristik masing-masing kelompok.

Adapun data tingkat partisipasi usia 13–15 tahun pada pendidikan menengah pertama serta partisipasi warga negara usia 7–18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah dalam pendidikan kesetaraan hanya tersedia pada tahun 2024, sehingga belum dapat dilakukan analisis perkembangan pada tahun 2025. Meski demikian, capaian pendidikan kesetaraan sebesar 83,58 persen pada tahun 2024 menunjukkan masih terdapat kelompok masyarakat yang memerlukan layanan pendidikan alternatif. Dalam perspektif gender, pendidikan kesetaraan memiliki peran strategis untuk memberikan kesempatan kedua bagi perempuan maupun laki-laki yang putus sekolah akibat berbagai faktor, seperti kondisi ekonomi, kewajiban bekerja, perkawinan usia anak, pengasuhan keluarga, maupun faktor sosial lainnya. Oleh karena itu, penyediaan data terpilah menurut jenis kelamin pada seluruh indikator partisipasi pendidikan menjadi kebutuhan penting agar pemerintah daerah dapat mengevaluasi kesenjangan gender secara lebih akurat dan menyusun intervensi yang mampu menjamin akses, partisipasi, kontrol, dan manfaat pendidikan yang setara bagi seluruh warga.

C. Rasio Guru terhadap Murid

Rasio Guru terhadap Murid merupakan indikator yang menunjukkan perbandingan antara jumlah guru dengan jumlah murid pada setiap jenjang pendidikan. Indikator ini menggambarkan ketersediaan tenaga pendidik dalam mendukung proses pembelajaran dan menjadi salah satu ukuran kualitas penyelenggaraan layanan pendidikan. Tabel berikut menyajikan

rasio guru terhadap murid di Kota Semarang sebagai dasar untuk melihat kecukupan tenaga pendidik dalam memberikan layanan pendidikan yang berkualitas serta menjamin kesempatan belajar yang setara bagi peserta didik laki-laki maupun perempuan.

Tabel 16. Rasio Guru/Murid

ELEMEN DATA	TAHUN	
	2024	2025
Rasio guru/murid sekolah pendidikan dasar	597,41	556,36

Sumber : <https://data.semarangkota.go.id/datasektoral/detail/12208>

Berdasarkan data rasio guru terhadap murid pada pendidikan dasar, tercatat bahwa pada tahun 2025 rasionya sebesar 556,36, menurun dibandingkan tahun 2024 yang mencapai 597,41. Penurunan rasio ini menunjukkan adanya perbaikan dari sisi ketersediaan guru terhadap jumlah peserta didik, yang dapat disebabkan oleh bertambahnya jumlah guru, berkurangnya jumlah murid, atau kombinasi keduanya. Secara substantif, kondisi ini mengindikasikan peluang meningkatnya kualitas layanan pembelajaran di jenjang pendidikan dasar karena beban guru terhadap murid relatif lebih seimbang.

D. Angka Partisipasi Sekolah (APS)

Angka Partisipasi Sekolah (APS) merupakan indikator yang menunjukkan persentase penduduk pada kelompok usia sekolah tertentu yang sedang mengikuti pendidikan, tanpa memperhatikan jenjang pendidikan yang ditempuh. Indikator ini digunakan untuk mengukur tingkat partisipasi penduduk dalam mengakses layanan pendidikan sesuai kelompok usianya serta menjadi salah satu gambaran keberhasilan pembangunan di bidang pendidikan. Tabel berikut menyajikan Angka Partisipasi Sekolah (APS) Kota Semarang menurut jenis kelamin sebagai

dasar untuk melihat tingkat partisipasi pendidikan serta kesetaraan akses sekolah bagi laki-laki dan perempuan.

Tabel 17. Angka Partisipasi Sekolah (APS) menurut Kelompok Umur (7-23)
Tahun 2025

Kelompok Umur APS 7-23	Laki laki	Perempuan	Jumlah
Usia 7-12 tahun	97.52	100	98.76
Usia 13-15 tahun	99.26	97.36	98.35
Usia 16-18 tahun	85.88	89.08	87.58
Usia 19-23 tahun	40.19	50.06	44.97

Sumber : <https://data.semarangkota.go.id/datasektoral/detail/12208>

Berdasarkan data Angka Partisipasi Sekolah (APS) penduduk usia 7–23 tahun menurut jenis kelamin, terlihat bahwa akses pendidikan di Kota Semarang pada jenjang pendidikan dasar hingga pendidikan tinggi secara umum telah dinikmati oleh laki-laki maupun perempuan. Namun demikian, masih terdapat variasi tingkat partisipasi berdasarkan kelompok umur yang menunjukkan adanya dinamika kesenjangan gender pada setiap jenjang pendidikan.

Pada kelompok usia 7–12 tahun, Angka Partisipasi Sekolah perempuan mencapai 100 persen, lebih tinggi dibandingkan laki-laki yang sebesar 97,52 persen. Kondisi ini menunjukkan bahwa hampir seluruh anak perempuan usia sekolah dasar telah mengakses pendidikan formal, sementara masih terdapat sebagian kecil anak laki-laki yang belum berpartisipasi. Sebaliknya, pada kelompok usia 13–15 tahun, partisipasi sekolah laki-laki (99,26 persen) sedikit lebih tinggi dibandingkan perempuan (97,36 persen). Meskipun selisihnya relatif kecil, kondisi ini tetap perlu menjadi perhatian agar tidak berkembang menjadi kesenjangan yang lebih besar pada jenjang pendidikan berikutnya.

Perbedaan yang lebih nyata terlihat pada kelompok usia 16–18 tahun dan terutama 19–23 tahun. Pada usia 16–18 tahun, APS perempuan mencapai 89,08 persen, lebih tinggi dibandingkan laki-laki sebesar 85,88 persen. Sementara itu, pada kelompok usia 19–23 tahun, kesenjangan semakin lebar dengan APS perempuan sebesar 50,06 persen, sedangkan laki-laki hanya 40,19 persen. Data ini menunjukkan bahwa perempuan di Kota Semarang memiliki tingkat keberlanjutan pendidikan yang lebih tinggi hingga jenjang pendidikan tinggi dibandingkan laki-laki.

Dari perspektif gender, kondisi tersebut mengindikasikan bahwa tantangan dalam mempertahankan partisipasi pendidikan tidak hanya dialami oleh perempuan, tetapi juga oleh laki-laki, terutama pada usia setelah pendidikan menengah. Salah satu kemungkinan penyebabnya adalah laki-laki lebih cepat memasuki dunia kerja atau memilih bekerja setelah lulus sekolah menengah, sedangkan sebagian perempuan melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi. Oleh karena itu, kebijakan pendidikan yang responsif gender perlu memperhatikan hambatan yang dihadapi masing-masing kelompok. Bagi laki-laki, diperlukan upaya untuk mendorong keberlanjutan pendidikan agar tidak terlalu dini meninggalkan bangku sekolah, sementara bagi perempuan perlu terus dijaga agar akses pendidikan tinggi tetap terbuka dan tidak terhambat oleh faktor sosial, ekonomi, maupun peran domestik. Dengan demikian, kesempatan memperoleh pendidikan yang setara dapat diwujudkan bagi seluruh penduduk tanpa membedakan jenis kelamin.

E. Angka Partisipasi Kasar (APK)

Angka Partisipasi Kasar (APK) merupakan indikator yang menunjukkan perbandingan antara jumlah peserta didik pada suatu jenjang pendidikan, tanpa memperhatikan usia, terhadap jumlah penduduk yang

berada pada kelompok usia resmi jenjang pendidikan tersebut. Indikator ini menggambarkan tingkat partisipasi masyarakat dalam mengakses layanan pendidikan pada setiap jenjang serta menjadi salah satu ukuran pemerataan pendidikan. Tabel berikut menyajikan Angka Partisipasi Kasar (APK) Kota Semarang menurut jenis kelamin sebagai dasar untuk melihat tingkat partisipasi pendidikan dan kesetaraan akses bagi laki-laki dan perempuan pada setiap jenjang pendidikan.

Tabel 18. Angka Partisipasi Kasar (APK) menurut Jenjang Pendidikan Tahun 2025

Jenjang Pendidikan/Sekolah	Laki laki	Perempuan	Jumlah
SD/MI/Sederajat	103.17	100.27	101.71
SMP/MTs/ Sederajat	85.6	99.62	92.32
SMA/SMK/MA/Sederajat	88.2	90.29	89.31
Perguruan Tinggi	47.45	54.95	51.08

Sumber : <https://data.semarangkota.go.id/datasektoral/detail/12208>

Berdasarkan data Angka Partisipasi Kasar (APK) menurut jenjang pendidikan dan jenis kelamin, terlihat bahwa akses pendidikan di Kota Semarang menunjukkan pola yang berbeda antara laki-laki dan perempuan pada setiap jenjang pendidikan. APK menggambarkan tingkat partisipasi penduduk pada suatu jenjang pendidikan tanpa memperhatikan kesesuaian usia, sehingga indikator ini memberikan gambaran mengenai luasnya cakupan layanan pendidikan yang dapat diakses oleh masyarakat.

Pada jenjang SD/MI/ sederajat, APK laki-laki mencapai 103,17 persen, lebih tinggi dibandingkan perempuan sebesar 100,27 persen. Capaian yang melebihi 100 persen menunjukkan adanya peserta didik yang berusia di luar kelompok usia resmi sekolah dasar, seperti siswa yang

masuk lebih awal, terlambat sekolah, atau mengulang kelas. Dari perspektif gender, selisih antara laki-laki dan perempuan relatif kecil sehingga dapat diartikan bahwa akses pendidikan dasar telah berlangsung cukup setara bagi kedua kelompok.

Perbedaan yang lebih menonjol terlihat pada jenjang SMP/MTs/ sederajat, di mana APK perempuan mencapai 99,62 persen, jauh lebih tinggi dibandingkan laki-laki yang sebesar 85,60 persen. Kondisi ini menunjukkan bahwa partisipasi perempuan pada jenjang pendidikan menengah pertama lebih tinggi dibandingkan laki-laki. Pola tersebut masih berlanjut pada jenjang SMA/SMK/MA/ sederajat, meskipun dengan selisih yang lebih kecil, yaitu 90,29 persen pada perempuan dan 88,20 persen pada laki-laki. Hal ini mengindikasikan bahwa perempuan di Kota Semarang memiliki kecenderungan yang lebih tinggi untuk mempertahankan keberlanjutan pendidikan hingga jenjang menengah.

Pada jenjang perguruan tinggi, kesenjangan partisipasi semakin terlihat, dengan APK perempuan mencapai 54,95 persen, sedangkan laki-laki sebesar 47,45 persen. Data ini menunjukkan bahwa perempuan memiliki tingkat partisipasi yang lebih tinggi dalam mengakses pendidikan tinggi. Dari perspektif gender, kondisi ini mencerminkan perkembangan positif karena semakin terbukanya kesempatan bagi perempuan untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi. Di sisi lain, rendahnya APK laki-laki dibandingkan perempuan dapat mengindikasikan bahwa sebagian laki-laki memilih memasuki dunia kerja setelah menyelesaikan pendidikan menengah atau menghadapi faktor lain yang memengaruhi keberlanjutan pendidikannya.

Secara keseluruhan, data APK menunjukkan bahwa kesenjangan gender dalam pendidikan di Kota Semarang tidak lagi selalu menempatkan perempuan sebagai kelompok yang tertinggal. Pada jenjang pendidikan menengah hingga perguruan tinggi, justru perempuan menunjukkan

tingkat partisipasi yang lebih tinggi dibandingkan laki-laki. Temuan ini menegaskan bahwa pengarusutamaan gender dalam bidang pendidikan tidak hanya berfokus pada peningkatan akses bagi perempuan, tetapi juga perlu memastikan bahwa laki-laki memperoleh dukungan yang memadai untuk menyelesaikan pendidikan hingga jenjang yang lebih tinggi. Oleh karena itu, penyusunan kebijakan pendidikan yang responsif gender perlu mempertimbangkan faktor-faktor yang memengaruhi keberlanjutan pendidikan masing-masing jenis kelamin sehingga kesempatan, akses, partisipasi, dan manfaat pendidikan dapat dirasakan secara setara oleh seluruh penduduk.

F. Angka Partisipasi Murni (APM)

Angka Partisipasi Murni (APM) merupakan indikator yang menunjukkan persentase penduduk pada kelompok usia sekolah tertentu yang bersekolah sesuai dengan jenjang pendidikan yang seharusnya. Indikator ini menggambarkan tingkat ketepatan penduduk dalam mengakses pendidikan sesuai usianya dan menjadi salah satu ukuran keberhasilan pemerataan layanan pendidikan. Tabel berikut menyajikan Angka Partisipasi Murni (APM) Kota Semarang menurut jenis kelamin.

Tabel 19. Angka Partisipasi Murni (APM) menurut Jenjang Pendidikan Tahun 2025

Jenjang Pendidikan/Sekolah	Laki laki	Perempuan	Jumlah
	2025	2025	2025
SD/MI/Sederajat	97.16	98.23	97.7
SMP/MTs/ Sederajat	78.51	83.42	80.86
SMA/SMK/MA/Sederajat	69.43	73.25	71.45
Perguruan Tinggi	-	-	-

Sumber : <https://data.semarangkota.go.id/datasektoral/detail/12208>

Berdasarkan data Angka Partisipasi Murni (APM) menurut jenjang pendidikan dan jenis kelamin Tahun 2025, terlihat bahwa partisipasi penduduk yang bersekolah sesuai dengan kelompok usia pada setiap jenjang pendidikan di Kota Semarang masih menunjukkan perbedaan antara laki-laki dan perempuan. APM merupakan indikator yang menggambarkan proporsi penduduk pada usia sekolah tertentu yang benar-benar bersekolah pada jenjang pendidikan yang sesuai dengan usianya, sehingga mampu memberikan gambaran yang lebih akurat mengenai pemerataan akses pendidikan.

Pada jenjang SD/MI/ sederajat, APM perempuan mencapai 98,23 persen, sedikit lebih tinggi dibandingkan laki-laki sebesar 97,16 persen. Selisih yang relatif kecil tersebut menunjukkan bahwa akses pendidikan dasar di Kota Semarang telah berlangsung cukup merata bagi anak laki-laki maupun perempuan. Kondisi ini mencerminkan bahwa sebagian besar anak usia sekolah dasar telah memperoleh kesempatan untuk mengenyam pendidikan sesuai dengan jenjang usianya.

Perbedaan partisipasi mulai terlihat lebih jelas pada jenjang SMP/MTs/ sederajat, di mana APM perempuan mencapai 83,42 persen, lebih tinggi dibandingkan laki-laki yang sebesar 78,51 persen. Pola yang sama juga terjadi pada jenjang SMA/SMK/MA/ sederajat, dengan APM perempuan sebesar 73,25 persen, sedangkan laki-laki 69,43 persen. Data tersebut menunjukkan bahwa perempuan memiliki tingkat keberlanjutan pendidikan sesuai usia yang lebih tinggi dibandingkan laki-laki pada jenjang pendidikan menengah.

Dari perspektif gender, temuan ini mengindikasikan bahwa tantangan dalam mempertahankan anak tetap bersekolah sesuai kelompok usianya justru lebih besar dialami oleh laki-laki. Kondisi tersebut dapat dipengaruhi oleh berbagai faktor, seperti kecenderungan laki-laki memasuki dunia kerja lebih awal, memilih pendidikan nonformal atau

pelatihan kerja, maupun faktor sosial dan ekonomi yang mendorong mereka tidak melanjutkan pendidikan sesuai jenjang usianya. Sementara itu, tingginya APM perempuan menunjukkan semakin terbukanya kesempatan bagi perempuan untuk menyelesaikan pendidikan secara berjenjang dan tepat waktu.

Meskipun demikian, APM pada jenjang pendidikan menengah masih berada di bawah 85 persen untuk kedua jenis kelamin, yang berarti masih terdapat sejumlah anak usia sekolah yang belum mengenyam pendidikan sesuai jenjang usianya. Oleh karena itu, kebijakan pendidikan yang responsif gender perlu diarahkan tidak hanya untuk mempertahankan capaian partisipasi perempuan, tetapi juga meningkatkan keberlanjutan pendidikan bagi laki-laki melalui upaya pencegahan putus sekolah, penguatan dukungan sosial-ekonomi keluarga, serta penyediaan layanan pendidikan yang inklusif dan adaptif terhadap kebutuhan kedua kelompok. Selain itu, belum tersedianya data APM pada jenjang perguruan tinggi menjadi keterbatasan dalam melakukan analisis keberlanjutan pendidikan berdasarkan jenis kelamin pada tingkat pendidikan tinggi, sehingga penyediaan data terpilah tetap menjadi kebutuhan penting dalam mendukung perencanaan pembangunan yang responsif gender.

Berikut tersaji Angka Partisipasi Murni untuk jenjang pendidikan Paket A dan Paket B di Kota Semarang

Tabel 20. Angka Partisipasi Murni (APM)

ELEMEN DATA	TAHUN	
	2024	2025
Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI/Paket A	91,03	92,16
Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs/Paket B	85,18	-

Sumber : <https://data.semarangkota.go.id/datasektoral/detail/12208>, Senin 19 Januari 2026

Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI/Paket A pada tahun 2025 mencapai 92,16, meningkat dibandingkan tahun 2024 sebesar 91,03. Kenaikan ini menunjukkan semakin baiknya kesesuaian usia anak dengan jenjang pendidikan dasar yang diikuti, serta mencerminkan efektivitas layanan pendidikan dasar, termasuk pendidikan kesetaraan Paket A, dalam menjangkau anak usia sekolah secara tepat.

Sementara itu, APM SMP/MTs/Paket B hingga tahun 2025 belum tersedia, namun pada tahun 2024 tercatat sebesar 85,18, yang masih lebih rendah dibandingkan APM SD. Kondisi ini mengindikasikan masih adanya tantangan pada masa transisi dari SD ke SMP, sehingga diperlukan penguatan pencegahan putus sekolah dan pendampingan berkelanjutan agar kesinambungan wajib belajar dapat terjaga.

4.10 Gender Bidang Kesehatan

A. Kesehatan Ibu dan Anak

Data kesehatan ibu dan anak merupakan salah satu indikator strategis dalam menggambarkan kondisi kesejahteraan masyarakat dari perspektif kesetaraan gender. Tidak hanya menggambarkan capaian pembangunan di bidang kesehatan, tetapi juga menunjukkan sejauh mana perempuan, khususnya ibu, memperoleh akses terhadap layanan kesehatan yang berkualitas sejak masa kehamilan, persalinan, nifas, hingga perawatan bayi dan balita. Selain itu, data kesehatan anak memberikan gambaran mengenai pemenuhan hak-hak dasar anak sejak awal kehidupan, yang dipengaruhi oleh kondisi kesehatan ibu, lingkungan keluarga, serta dukungan kebijakan pemerintah. Oleh karena itu, penyajian data kesehatan ibu dan anak secara terpilah menjadi dasar yang penting dalam mengidentifikasi kesenjangan maupun tantangan yang masih dihadapi dalam pembangunan yang responsif gender.

**Tabel 21. Data Kesehatan Ibu dan Anak di Kota Semarang
Tahun 2025**

NO	URAIAN	L	P	JML
1	Kelahiran bayi hidup	9.137	8.394	17.531
2	Kelahiran bayi mati	63	28	91
3	Kematian Ibu			
	Ibu hamil	0	3	3
	Ibu Bersalin	0	0	0
	Ibu Nifas	0	11	11
4	Cakupan pelayanan kesehatan			
	Jumlah Ibu hamil		17.636	17.636
	Perkiraan bumil dengan komplikasi kebidanan		3.527	3.527
	Bumil dengan komplikasi yang ditangani		2.061	2.061
	Jumlah komplikasi dalam masa kehamilan		2.009	2.009
	Jumlah komplikasi dalam persalinan		443	443
	Jumlah komplikasi pasca persalinan (Nifas)		160	160
	K1		17.636	17.636
	K4		17.575	17.575
	K6		17.547	17.547
	Persalinan di Fasyankes		17.561	17.561
	Ibu nifas mendapat vitamin A		17.561	17.561
5	Kematian Balita			
	Malformasi kongenital, deformasi, dan kelainan kromosom			36
	Gangguan terkait usia kehamilan dan pertumbuhan janin			3
	Trauma kelahiran			0
	Komplikasi pada saat persalinan (intrapartum)			0
	Kejang dan gangguan status serebral			1
	Infeksi			6

	Gangguan pernapasan dan kardiovaskular			39
	Kondisi neonatal lainnya			8
	Berat badan lahir rendah dan prematuritas			37
	Kematian neonatal dengan penyebab yang tidak ditentukan			1
	diare			1
	DB			0
	pneumonia			3
	Kelainan jantung			0
	Kelainan syaraf			1
	Kelainan kongenital lainnya			1
	Kecelakaan/tenggelam			0
	Lain - Lain			10
6	Bayi BBLR	304	323	627
	Persentase Bayi BBLR			3,6%
7	Bayi Prematur	158	165	323

Sumber : Dinas Kesehatan Kota Semarang

1. Kelahiran Bayi Hidup dan Kelahiran Bayi Mati

Data menunjukkan bahwa selama tahun pelaporan terdapat 17.531 kelahiran bayi hidup, terdiri atas 9.137 bayi laki-laki (52,12%) dan 8.394 bayi perempuan (47,88%). Komposisi tersebut masih berada dalam kisaran rasio kelahiran biologis yang umum terjadi, yaitu jumlah bayi laki-laki sedikit lebih banyak dibandingkan bayi perempuan. Kondisi ini menunjukkan bahwa tidak terdapat perbedaan yang mencolok berdasarkan jenis kelamin pada saat kelahiran, sehingga peluang hidup bayi sejak lahir relatif seimbang antara laki-laki dan perempuan.

Di sisi lain, tercatat 91 kasus kelahiran bayi mati, terdiri atas 63 bayi laki-laki (69,23%) dan 28 bayi perempuan (30,77%). Jumlah kematian bayi laki-laki yang lebih tinggi sejalan dengan berbagai penelitian kesehatan

yang menunjukkan bahwa bayi laki-laki secara biologis memiliki kerentanan lebih besar terhadap komplikasi kehamilan maupun persalinan. Namun demikian, kondisi tersebut tetap memerlukan perhatian melalui penguatan pelayanan antenatal, deteksi dini faktor risiko kehamilan, peningkatan kualitas persalinan di fasilitas kesehatan, serta penanganan kegawatdaruratan neonatal agar angka kelahiran mati dapat terus ditekan.

2. Kematian Ibu

Pada tahun pelaporan tercatat 14 kematian ibu, terdiri atas 3 kematian pada masa kehamilan dan 11 kematian pada masa nifas, sedangkan tidak terdapat kematian pada masa persalinan. Dominasi kematian pada masa nifas menunjukkan bahwa perhatian terhadap kesehatan ibu tidak berhenti setelah proses persalinan selesai. Masa nifas merupakan periode yang sangat rentan terhadap komplikasi seperti perdarahan, infeksi, hipertensi pascapersalinan, maupun gangguan kesehatan lainnya. Oleh karena itu, kualitas pelayanan kesehatan pascapersalinan, kunjungan nifas secara lengkap, edukasi tanda bahaya kepada keluarga, serta akses terhadap fasilitas kesehatan menjadi faktor penting dalam menurunkan angka kematian ibu.

Dari perspektif gender, kematian ibu tidak hanya berdampak pada kesehatan perempuan sebagai individu, tetapi juga memengaruhi kesejahteraan keluarga secara keseluruhan. Perempuan memiliki peran penting dalam pengasuhan anak dan pengelolaan keluarga sehingga setiap kematian ibu berpotensi menimbulkan dampak sosial, ekonomi, maupun psikologis bagi anggota keluarga yang ditinggalkan. Oleh karena itu, upaya perlindungan kesehatan reproduksi perempuan perlu menjadi prioritas dalam pembangunan daerah.

3. Cakupan Pelayanan Kesehatan Ibu

Jumlah ibu hamil di Kota Semarang tercatat sebanyak 17.636 orang. Dari jumlah tersebut diperkirakan terdapat 3.527 ibu hamil (20,0%) yang

mengalami komplikasi kebidanan, sementara 2.061 kasus (58,4%) telah memperoleh penanganan sesuai standar pelayanan kesehatan.

Data tersebut menunjukkan bahwa lebih dari separuh ibu hamil yang mengalami komplikasi telah mendapatkan penanganan, namun masih terdapat sekitar 41,6% kasus komplikasi yang belum tercatat memperoleh penanganan sesuai target. Kondisi ini menunjukkan perlunya peningkatan akses pelayanan kesehatan maternal, khususnya bagi ibu hamil yang berada dalam kelompok risiko tinggi melalui penguatan sistem rujukan, pemeriksaan kehamilan berkualitas, serta deteksi dini komplikasi sejak masa kehamilan.

Selanjutnya, tercatat 2.009 komplikasi selama masa kehamilan, 443 komplikasi persalinan, dan 160 komplikasi pada masa nifas. Pola tersebut memperlihatkan bahwa sebagian besar komplikasi terjadi sejak masa kehamilan sehingga intervensi kesehatan sebaiknya lebih difokuskan pada pelayanan antenatal yang komprehensif. Pemeriksaan kehamilan secara rutin, pemenuhan gizi ibu, pengendalian penyakit penyerta, serta peningkatan pengetahuan ibu mengenai tanda bahaya kehamilan menjadi langkah penting dalam menurunkan risiko komplikasi hingga masa persalinan dan nifas.

Data juga menunjukkan bahwa cakupan pelayanan kesehatan ibu seperti kunjungan K1, K4, K6, persalinan di fasilitas kesehatan, serta pemberian vitamin A pada ibu nifas telah mencapai sekitar 17.500-an sasaran, yang mengindikasikan bahwa sebagian besar ibu telah memperoleh pelayanan kesehatan dasar. Tingginya cakupan pelayanan tersebut merupakan indikator positif terhadap akses pelayanan kesehatan ibu di Kota Semarang. Namun demikian, kualitas pelayanan tetap perlu terus ditingkatkan agar setiap ibu memperoleh pelayanan yang sesuai standar serta mampu mencegah terjadinya komplikasi yang dapat mengancam keselamatan ibu maupun bayi.

4. Penyebab Kematian Bayi

Berdasarkan penyebab kematian bayi, kasus terbanyak disebabkan oleh gangguan pernapasan dan kardiovaskular (39 kasus), diikuti berat badan lahir rendah (BBLR) dan prematuritas (37 kasus) serta malformasi kongenital, deformitas, dan kelainan kromosom (36 kasus).

Ketiga penyebab tersebut menunjukkan bahwa sebagian besar kematian bayi dipengaruhi oleh faktor medis yang terjadi sejak masa kehamilan maupun segera setelah bayi dilahirkan. Gangguan pernapasan umumnya berkaitan dengan bayi prematur atau komplikasi saat persalinan, sedangkan BBLR sering dipengaruhi oleh kondisi kesehatan ibu, status gizi, penyakit penyerta, maupun usia kehamilan yang belum cukup bulan.

Sementara itu, penyebab lainnya seperti infeksi (6 kasus), pneumonia (3 kasus), gangguan pertumbuhan janin (3 kasus), diare (1 kasus), kelainan saraf (1 kasus), kecelakaan/tenggelam (1 kasus), kondisi neonatal lainnya (8 kasus), serta penyebab lain-lain (10 kasus) memiliki jumlah yang lebih kecil namun tetap memerlukan perhatian. Penguatan pelayanan kesehatan ibu sejak masa kehamilan, peningkatan kualitas pelayanan neonatal, imunisasi, pemberian ASI eksklusif, pemenuhan gizi bayi, serta edukasi keluarga mengenai perawatan bayi baru lahir menjadi strategi penting untuk menurunkan angka kematian bayi.

Dari perspektif gender, kematian bayi pada data ini tidak menunjukkan perbedaan pelayanan berdasarkan jenis kelamin, melainkan lebih dipengaruhi oleh faktor biologis dan kondisi kesehatan ibu selama kehamilan. Oleh karena itu, kebijakan kesehatan yang responsif gender perlu memastikan bahwa seluruh perempuan memperoleh akses pelayanan kesehatan reproduksi yang berkualitas karena kesehatan ibu memiliki hubungan yang sangat erat dengan keselamatan bayi.

5. Bayi Berat Badan Lahir Rendah (BBLR)

Selama tahun pelaporan terdapat 627 bayi dengan berat badan lahir rendah (BBLR) yang terdiri atas 304 bayi laki-laki (48,48%) dan 323 bayi perempuan (51,52%), atau sekitar 3,57% dari seluruh kelahiran hidup.

Persentase tersebut menunjukkan bahwa sebagian kecil bayi lahir dengan kondisi berat badan di bawah standar, namun kelompok ini memiliki risiko lebih tinggi mengalami gangguan pertumbuhan, infeksi, keterlambatan perkembangan, hingga kematian neonatal. Perbedaan jumlah antara bayi laki-laki dan perempuan relatif kecil sehingga menunjukkan bahwa kejadian BBLR tidak dipengaruhi oleh jenis kelamin bayi, melainkan lebih erat kaitannya dengan kondisi kesehatan ibu selama kehamilan, status gizi, usia kehamilan, penyakit penyerta, maupun kualitas pemeriksaan antenatal.

Dalam perspektif pembangunan gender, penurunan angka BBLR sangat bergantung pada peningkatan kesehatan perempuan sebelum dan selama kehamilan. Oleh karena itu, intervensi yang perlu diperkuat meliputi peningkatan status gizi remaja putri dan calon ibu, pencegahan anemia, pemeriksaan kehamilan sesuai standar, pemenuhan suplementasi gizi, serta penguatan edukasi kesehatan reproduksi. Upaya tersebut tidak hanya meningkatkan kualitas hidup perempuan, tetapi juga menjadi investasi penting dalam menghasilkan generasi yang sehat, berkualitas, dan bebas stunting di masa mendatang.

B. Kunjungan Pasien ke Puskesmas

Kunjungan pasien ke puskesmas merupakan salah satu indikator penting dalam menggambarkan tingkat pemanfaatan pelayanan kesehatan dasar oleh masyarakat. Data kunjungan ini tidak hanya mencerminkan akses masyarakat terhadap fasilitas kesehatan, tetapi juga memberikan gambaran mengenai pola pemanfaatan layanan berdasarkan jenis kelamin.

Dari perspektif gender, perbedaan jumlah kunjungan antara laki-laki dan perempuan dapat menjadi bahan evaluasi dalam melihat tingkat kesadaran masyarakat terhadap kesehatan, kebutuhan layanan yang spesifik sesuai siklus kehidupan, serta efektivitas penyelenggaraan pelayanan kesehatan yang responsif gender. Informasi tersebut menjadi dasar bagi pemerintah daerah dalam menyusun kebijakan dan program kesehatan yang lebih inklusif, berkeadilan, dan mampu memenuhi kebutuhan kesehatan seluruh kelompok masyarakat. Gambaran mengenai jumlah kunjungan pasien ke puskesmas di Kota Semarang menurut jenis kelamin pada tahun 2025 disajikan pada tabel berikut.

Tabel 22. Jumlah Kunjungan Pasien ke Puskesmas di Kota Semarang Tahun 2025

No	Puskesmas	Total Kunjungan		
		Laki-laki	Perempuan	Total
1	Poncol	21,868	31,181	53,049
2	Miroto	19,791	34,143	53,934
3	Bandarharjo	28,047	50,033	78,080
4	Bulu Lor	26,569	45,773	72,342
5	Halmahera	33,508	52,113	85,621
6	Bugangan	24,493	36,844	61,337
7	Karangdoro	27,491	46,361	73,852
8	Pandanaran	27,277	45,043	72,320
9	Lamper Tengah	22,156	37,359	59,515
10	Karangayu	12,357	20,888	33,245
11	Lebdosari	18,141	29,866	48,007
12	Manyaran	23,021	37,934	60,955
13	Krobokan	15,704	24,944	40,648
14	Ngemplak Simongan	21,979	34,600	56,579

15	Gayamsari	43,172	53,291	96,463
16	Candilama	24,810	38,402	63,212
17	Kagok	21,885	36,809	58,694
18	Pegandan	27,643	43,168	70,811
19	Genuk	20,987	32,994	53,981
20	Bangetayu	50,742	86,558	137,300
21	Tlogosari Kulon	40,513	66,545	107,058
22	Tlogosari Wetan	34,194	55,398	89,592
23	Kedungmundu	49,750	89,502	139,252
24	Rowosari	29,576	49,766	79,342
25	Ngesrep	25,549	43,105	68,654
26	Padangsari	30,317	47,266	77,583
27	Srondol	23,538	41,233	64,771
28	Pudak Payung	15,748	24,456	40,204
29	Gunungpati	38,602	64,609	103,211
30	Sekaran	21,654	38,320	59,974
31	Mijen	37,612	56,361	93,973
32	Karang Malang	21,217	32,687	53,904
33	Tambakaji	17,579	28,782	46,361
34	Purwoyoso	19,111	30,449	49,560
35	Ngaliyan	49,514	76,390	125,904
36	Mangkang	21,906	32,854	54,760
37	Karanganyar	16,987	23,632	40,619
38	Plamongan Sari	17,233	28,709	45,942
39	Bulusan	12,967	19,558	32,525
	TOTAL	1,035,208	1,667,926	2,703,134

Sumber : Dinas Kesehatan Kota Semarang

Data kunjungan Puskesmas di Kota Semarang Tahun 2025 menunjukkan bahwa pelayanan kesehatan tingkat pertama masih menjadi layanan yang banyak dimanfaatkan masyarakat. Sepanjang tahun 2025 tercatat 2.703.134 kunjungan, terdiri atas 1.035.208 kunjungan laki-laki

(38,3%) dan 1.667.926 kunjungan perempuan (61,7%). Data ini menunjukkan bahwa kunjungan perempuan ke puskesmas sekitar 1,6 kali lebih banyak dibandingkan laki-laki, sehingga terdapat kesenjangan partisipasi dalam pemanfaatan layanan kesehatan berdasarkan jenis kelamin. Kondisi tersebut tidak serta-merta menunjukkan bahwa perempuan memiliki tingkat kesakitan yang lebih tinggi, tetapi lebih menggambarkan bahwa perempuan cenderung lebih aktif memanfaatkan pelayanan kesehatan, baik untuk pelayanan kuratif maupun pelayanan promotif dan preventif seperti pemeriksaan kehamilan, kesehatan reproduksi, keluarga berencana, imunisasi anak, pelayanan balita, maupun skrining kesehatan. Sebaliknya, laki-laki usia produktif umumnya memiliki kecenderungan lebih rendah dalam melakukan pemeriksaan kesehatan secara rutin karena faktor aktivitas kerja, persepsi bahwa kondisi kesehatannya masih baik, maupun budaya yang menganggap laki-laki hanya berobat ketika kondisi sudah cukup berat. Temuan ini juga sejalan dengan berbagai kajian pemanfaatan layanan kesehatan dan dokumen Gender Analysis Pathway (GAP) sektor kesehatan yang menunjukkan bahwa kunjungan perempuan ke fasilitas pelayanan kesehatan tingkat pertama umumnya lebih tinggi dibandingkan laki-laki.

Apabila dilihat berdasarkan puskesmas, Puskesmas Kedungmundu merupakan puskesmas dengan jumlah kunjungan perempuan tertinggi, yaitu 89.502 kunjungan, disusul Puskesmas Bangetayu sebanyak 86.558 kunjungan dan Puskesmas Ngaliyan sebanyak 76.390 kunjungan. Tingginya jumlah kunjungan perempuan pada puskesmas-puskesmas tersebut menunjukkan besarnya pemanfaatan layanan kesehatan oleh perempuan di wilayah kerjanya, terutama layanan kesehatan ibu, kesehatan reproduksi, keluarga berencana, serta pelayanan kesehatan anak dan keluarga yang umumnya lebih banyak diakses oleh perempuan.

Sementara itu, untuk kunjungan laki-laki, jumlah tertinggi juga terdapat di Puskesmas Bangetayu dengan 50.742 kunjungan, diikuti Puskesmas Kedungmundu sebanyak 49.750 kunjungan, dan Puskesmas Ngaliyan sebanyak 49.514 kunjungan. Meskipun ketiga puskesmas tersebut memiliki jumlah kunjungan laki-laki yang relatif tinggi, jumlah kunjungan perempuan tetap lebih besar pada masing-masing puskesmas. Hal ini menunjukkan bahwa perempuan memanfaatkan layanan kesehatan secara lebih intensif dibandingkan laki-laki.

Dari perspektif pengarusutamaan gender, data ini mengindikasikan bahwa akses terhadap pelayanan kesehatan dasar di Kota Semarang telah tersedia bagi laki-laki maupun perempuan, namun tingkat partisipasi pemanfaatannya belum seimbang. Oleh karena itu, diperlukan upaya untuk meningkatkan kesadaran laki-laki, khususnya usia produktif, agar lebih aktif melakukan pemeriksaan kesehatan secara berkala, skrining penyakit tidak menular, serta memanfaatkan layanan promotif dan preventif di puskesmas. Di sisi lain, tingginya kunjungan perempuan juga perlu diimbangi dengan ketersediaan tenaga kesehatan, sarana, dan jenis layanan yang responsif gender agar kebutuhan kesehatan perempuan sepanjang siklus kehidupannya dapat terpenuhi secara optimal.

C. Peserta Keluarga Berencana

Program Keluarga Berencana (KB) merupakan salah satu upaya strategis dalam meningkatkan kualitas kesehatan keluarga, menurunkan angka kematian ibu dan bayi, serta mewujudkan keluarga yang sehat, sejahtera, dan berkualitas. Dalam perspektif gender, pelaksanaan program KB tidak hanya berorientasi pada pengendalian kelahiran, tetapi juga mendorong terwujudnya kesetaraan peran dan tanggung jawab antara laki-laki dan perempuan dalam perencanaan keluarga. Ketersediaan informasi mengenai jumlah peserta dan penggunaan metode kontrasepsi menjadi

penting untuk mengidentifikasi tingkat partisipasi masing-masing jenis kelamin serta mengevaluasi sejauh mana akses terhadap pelayanan KB telah berlangsung secara adil dan responsif gender.

Data mengenai jumlah peserta Keluarga Berencana (KB) beserta penggunaan metode kontrasepsi menurut jenis kontrasepsi di Kota Semarang Tahun 2025 disajikan pada tabel berikut.

**Tabel 23. Layanan KB Pada Pasangan Usia Subur
Tahun 2025**

JML PUS	KONDOM	SUNTIK	Pil	AKDR	MOP	MOW	IMPLAN
211.836	34.584	74.297	18.733	20.475	383	14.205	11.902

Sumber : Dinas Kesehatan Kota Semarang, 2025

Data menunjukkan bahwa jumlah Pasangan Usia Subur (PUS) di Kota Semarang mencapai 211.836 pasangan. Dari berbagai metode kontrasepsi yang digunakan, metode yang paling banyak dipilih adalah suntik sebanyak 74.297 akseptor, diikuti kondom sebanyak 34.584 akseptor, AKDR (IUD) sebanyak 20.475 akseptor, pil sebanyak 18.733 akseptor, MOW (Metode Operasi Wanita) sebanyak 14.205 akseptor, implan sebanyak 11.902 akseptor, dan MOP (Metode Operasi Pria) sebanyak 383 akseptor. Pola tersebut menunjukkan bahwa penggunaan kontrasepsi di Kota Semarang masih didominasi oleh metode yang digunakan oleh perempuan.

Apabila dilihat dari perspektif gender, terdapat ketimpangan yang cukup besar dalam pembagian peran penggunaan alat kontrasepsi antara laki-laki dan perempuan. Hampir seluruh metode kontrasepsi yang digunakan merupakan metode yang ditujukan bagi perempuan, seperti suntik, pil, AKDR, implan, maupun MOW. Sebaliknya, keterlibatan laki-laki dalam program KB masih sangat terbatas. Hal ini terlihat dari jumlah

pengguna MOP yang hanya mencapai 383 akseptor, jauh lebih rendah dibandingkan metode kontrasepsi perempuan. Meskipun penggunaan kondom mencapai 34.584 akseptor, metode ini umumnya bersifat sementara dan tingkat keberlanjutan penggunaannya cenderung lebih rendah dibandingkan metode kontrasepsi jangka panjang.

Rendahnya partisipasi laki-laki dalam penggunaan kontrasepsi dapat dipengaruhi oleh berbagai faktor, antara lain masih kuatnya persepsi sosial bahwa program keluarga berencana merupakan tanggung jawab perempuan, kurangnya pengetahuan mengenai metode kontrasepsi pria, kekhawatiran terhadap prosedur vasektomi (MOP), serta masih adanya stigma yang berkembang di masyarakat. Kondisi tersebut menyebabkan beban pengendalian kelahiran lebih banyak ditanggung oleh perempuan, baik dari sisi penggunaan alat kontrasepsi maupun risiko efek samping yang mungkin ditimbulkan.

Dalam perspektif Pengarusutamaan Gender (PUG), kondisi ini menunjukkan bahwa kesetaraan peran dalam kesehatan reproduksi belum sepenuhnya terwujud. Padahal, pengambilan keputusan mengenai perencanaan keluarga idealnya dilakukan secara bersama oleh suami dan istri dengan pembagian tanggung jawab yang seimbang. Oleh karena itu, diperlukan penguatan edukasi kepada laki-laki mengenai kesehatan reproduksi, peningkatan promosi metode kontrasepsi pria, pelibatan suami dalam konseling keluarga berencana, serta penghapusan stigma terhadap penggunaan kontrasepsi oleh laki-laki. Dengan meningkatnya partisipasi laki-laki, diharapkan tanggung jawab dalam mewujudkan keluarga yang sehat, berkualitas, dan sejahtera dapat dilaksanakan secara lebih adil antara perempuan dan laki-laki.

D. Bimbingan Kesehatan untuk Calon Pengantin

Bimbingan kesehatan bagi calon pengantin merupakan salah satu upaya promotif dan preventif yang bertujuan mempersiapkan pasangan sebelum memasuki kehidupan berkeluarga. Melalui layanan ini, calon pengantin memperoleh edukasi mengenai kesehatan reproduksi, gizi, pencegahan penyakit menular, kesehatan mental, serta pentingnya perencanaan kehamilan yang sehat. Dalam perspektif gender, bimbingan kesehatan calon pengantin menjadi sarana untuk meningkatkan pengetahuan, kesadaran, dan tanggung jawab bersama antara laki-laki dan perempuan dalam menjaga kesehatan diri, pasangan, serta mewujudkan keluarga yang berkualitas. Selain itu, layanan ini diharapkan mampu mendorong pengambilan keputusan yang setara dalam perencanaan keluarga dan kesehatan reproduksi, sehingga dapat mendukung terwujudnya keluarga yang sehat, harmonis, dan berketahanan.

Gambaran mengenai jumlah calon pengantin yang mengikuti bimbingan kesehatan menurut jenis kelamin disajikan pada tabel berikut.

Tabel 24. Jumlah Catin yang Menerima Bimbingan Kesehatan Tahun 2025

NO	PELAYANAN CATIN	CATIN	L	P	JUMLAH	
					LAYANAN	%
1	Layanan Kesehatan	13.816	6.695	6.841	13.536	97,9
2	Catin Perempuan Anemia	6.908		227		3,2
3	Catin perempuan kurang gizi	6.908		269		3,8

Sumber : Dinas Kesehatan Kota Semarang, 2025

Data menunjukkan bahwa pada tahun 2025 terdapat 13.816 calon pengantin (catin) yang menjadi sasaran pelayanan kesehatan di Kota Semarang, terdiri atas 6.695 laki-laki (48,46%) dan 6.841 perempuan

(49,51%). Dari jumlah tersebut, sebanyak 13.536 calon pengantin (97,9%) telah memperoleh layanan kesehatan. Tingginya cakupan pelayanan ini menunjukkan bahwa sebagian besar calon pengantin telah mendapatkan akses terhadap pemeriksaan kesehatan sebelum memasuki kehidupan rumah tangga. Kondisi ini merupakan capaian yang positif karena pemeriksaan kesehatan pranikah menjadi salah satu upaya penting dalam mempersiapkan pasangan yang sehat serta mendukung terwujudnya keluarga berkualitas.

Dalam perspektif gender, layanan kesehatan calon pengantin memberikan kesempatan yang setara bagi laki-laki maupun perempuan untuk mengetahui kondisi kesehatannya sebelum menikah. Keterlibatan kedua calon mempelai dalam pemeriksaan kesehatan menunjukkan bahwa kesehatan reproduksi bukan hanya menjadi tanggung jawab perempuan, tetapi merupakan tanggung jawab bersama antara laki-laki dan perempuan. Pemeriksaan kesehatan pranikah juga menjadi media edukasi bagi pasangan mengenai kesehatan reproduksi, perencanaan kehamilan, pencegahan penyakit menular, serta pentingnya pemenuhan gizi sebelum memasuki masa reproduksi.

Meskipun cakupan layanan kesehatan calon pengantin sudah sangat tinggi, hasil pemeriksaan menunjukkan masih terdapat 227 calon pengantin perempuan (3,2%) mengalami anemia dan 269 calon pengantin perempuan (3,8%) mengalami kurang gizi. Temuan ini menunjukkan bahwa masih terdapat perempuan usia reproduksi yang memasuki jenjang pernikahan dengan kondisi kesehatan yang memerlukan perhatian khusus. Anemia dan kekurangan gizi pada calon pengantin perempuan berpotensi meningkatkan risiko komplikasi selama kehamilan, melahirkan bayi dengan berat badan lahir rendah (BBLR), serta berkontribusi terhadap terjadinya stunting pada anak apabila tidak ditangani sejak dini.

Dari sudut pandang Pengarusutamaan Gender (PUG), data ini mengindikasikan bahwa meskipun akses pelayanan kesehatan telah tersedia secara luas bagi kedua jenis kelamin, perempuan masih menghadapi tantangan biologis dan kesehatan reproduksi yang memerlukan intervensi lebih spesifik. Oleh karena itu, selain mempertahankan tingginya cakupan layanan kesehatan calon pengantin, diperlukan penguatan edukasi gizi, pencegahan anemia melalui pemberian tablet tambah darah, konseling kesehatan reproduksi, serta pelibatan laki-laki dalam mendukung kesehatan calon istri sebelum dan selama kehamilan. Pendekatan tersebut diharapkan mampu mewujudkan keluarga yang sehat, meningkatkan kualitas kesehatan ibu dan anak, serta mendukung pencapaian pembangunan yang responsif gender di Kota Semarang.

E. Kesehatan Mental

Kesehatan mental merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari kesehatan secara menyeluruh dan menjadi salah satu faktor penting dalam mendukung kualitas hidup serta produktivitas masyarakat. Kondisi kesehatan mental yang baik memungkinkan setiap individu berfungsi secara optimal dalam kehidupan keluarga, pendidikan, pekerjaan, maupun lingkungan sosial. Dalam perspektif gender, laki-laki dan perempuan memiliki karakteristik, faktor risiko, serta kebutuhan yang berbeda dalam menjaga kesehatan mental maupun dalam mengakses layanan kesehatan. Oleh karena itu, penyajian data kesehatan mental yang terpilah menurut jenis kelamin menjadi penting untuk mengidentifikasi pola pemanfaatan layanan, mengenali kelompok yang membutuhkan perhatian lebih, serta menjadi dasar dalam penyusunan kebijakan dan program kesehatan mental yang responsif gender.

Gambaran mengenai kunjungan pemeriksaan kesehatan mental berdasarkan jenis gangguan dan jenis kelamin di Kota Semarang Tahun 2025 disajikan pada tabel berikut.

Tabel 25. Kunjungan Pemeriksaan Kesehatan Mental Menurut Jenis Gangguan Tahun 2025

No	Jenis Gangguan Mental	Laki-laki	Perempuan
1	Gangguan depresi	200	150
2	Gangguan cemas	115	169
3	Gangguan campuran ansietas & depresi	281	105
4	Skizofrenia	1.842	1.200
5	Gangguan Psikotik Akut	82	60

Sumber : Dinkes Kota Semarang

Data kunjungan pemeriksaan kesehatan mental di Kota Semarang Tahun 2025 menunjukkan adanya variasi jumlah kunjungan antara laki-laki dan perempuan pada setiap jenis gangguan mental. Secara umum, jumlah kunjungan laki-laki lebih tinggi pada sebagian besar kategori gangguan, yaitu gangguan depresi sebanyak 200 kunjungan laki-laki dibandingkan 150 kunjungan perempuan, gangguan campuran ansietas dan depresi sebanyak 281 kunjungan laki-laki dan 105 kunjungan perempuan, skizofrenia sebanyak 1.842 kunjungan laki-laki dan 1.200 kunjungan perempuan, serta gangguan psikotik akut sebanyak 82 kunjungan laki-laki dibandingkan 60 kunjungan perempuan. Sementara itu, gangguan cemas menunjukkan pola yang berbeda, di mana kunjungan perempuan (169 kunjungan) lebih tinggi dibandingkan laki-laki (115 kunjungan).

Perbedaan pola kunjungan tersebut mengindikasikan bahwa kebutuhan layanan kesehatan mental antara laki-laki dan perempuan tidak

selalu sama pada setiap jenis gangguan. Tingginya kunjungan laki-laki pada gangguan psikotik, skizofrenia, maupun gangguan campuran ansietas dan depresi dapat mencerminkan tingginya jumlah kasus yang memerlukan penanganan atau lebih banyaknya kasus yang telah teridentifikasi dan memperoleh layanan kesehatan. Di sisi lain, tingginya kunjungan perempuan pada gangguan cemas menunjukkan bahwa perempuan memiliki kebutuhan yang relatif lebih besar terhadap layanan penanganan gangguan kecemasan, yang dapat dipengaruhi oleh berbagai faktor biologis, psikologis, maupun sosial. Oleh karena itu, perbedaan tersebut tidak dapat dimaknai sebagai tingkat kerentanan semata, melainkan perlu dipahami sebagai gambaran variasi kebutuhan pelayanan kesehatan mental antara laki-laki dan perempuan.

Dari perspektif pengarusutamaan gender, data ini menunjukkan pentingnya penyelenggaraan layanan kesehatan mental yang responsif terhadap kebutuhan masing-masing jenis kelamin. Upaya promotif, preventif, deteksi dini, serta akses terhadap layanan kesehatan mental perlu terus diperkuat bagi seluruh masyarakat tanpa membedakan jenis kelamin, dengan memperhatikan karakteristik dan faktor risiko yang berbeda pada laki-laki maupun perempuan. Pendekatan tersebut diharapkan dapat meningkatkan akses pelayanan, mempercepat penanganan gangguan kesehatan mental, serta mengurangi stigma yang masih menjadi hambatan dalam pemanfaatan layanan kesehatan mental.

4.11 Gender Bidang Politik dan Pengambilan Keputusan

Partisipasi perempuan dalam pengambilan keputusan merupakan salah satu indikator penting dalam mewujudkan kesetaraan gender dan tata kelola pemerintahan yang inklusif. Keterlibatan perempuan pada berbagai posisi strategis, baik di lingkungan pemerintahan, lembaga

legislatif, organisasi kemasyarakatan, maupun sektor publik lainnya, mencerminkan adanya kesempatan yang setara dalam proses perumusan kebijakan dan pembangunan. Meskipun demikian, representasi perempuan dalam posisi pengambil keputusan masih menghadapi berbagai tantangan yang dipengaruhi oleh faktor sosial, budaya, maupun struktural. Oleh karena itu, penyajian data mengenai perempuan dalam pengambil keputusan menjadi penting sebagai dasar untuk mengidentifikasi capaian, kesenjangan, serta arah kebijakan dalam mendorong peningkatan partisipasi dan kepemimpinan perempuan di berbagai sektor. Berikut disajikan data **Perempuan dan Pengambil Keputusan** di Kota Semarang Tahun 2025.

**Tabel 26. Perempuan Dan Pengambil Keputusan
Tahun 2025**

No.	Data	L	P	Total
1	Kepala Badan/Dinas (Eselon II)	15	8	23
3	Camat	14	1	15
4	Lurah	76	50	126
5	Direktur RSUD	1		1
6	Walikota		1	1
7	Wakil Walikota	1		1
8	Anggota DPRD	36	13	49
9	Jumlah Pimpinan DPRD	3	1	4
10	Pimpinan Hakim di Pengadilan Negeri		1	1
11	Jumlah Pejabat Polisi Wilayah Polres	18	6	24
12	Kepala Sekolah	103	242	345

Sumber : DPRD, Kejari, Pengadilan Negeri, Polrestabes, BKPP Kota Semarang 2025

Data Perempuan dan Pengambil Keputusan Kota Semarang menunjukkan bahwa keterwakilan perempuan dalam jabatan strategis di

lingkungan pemerintahan, lembaga legislatif, yudikatif, maupun aparat penegak hukum masih beragam. Pada jabatan eksekutif, dari 23 Kepala Badan/Dinas (Eselon II), terdapat 8 perempuan (34,78%) dan 15 laki-laki (65,22%), yang menunjukkan bahwa perempuan telah memperoleh kesempatan menduduki jabatan pimpinan tinggi, meskipun proporsinya masih berada di bawah laki-laki. Kondisi serupa terlihat pada jabatan Camat, di mana hanya terdapat 1 camat perempuan dari total 15 camat, sehingga kepemimpinan di tingkat kewilayahan masih didominasi oleh laki-laki.

Di tingkat kelurahan, keterwakilan perempuan relatif lebih baik. Dari 126 lurah, terdapat 50 perempuan (39,68%) dan 76 laki-laki (60,32%). Persentase tersebut menunjukkan bahwa perempuan mulai memperoleh akses yang lebih luas dalam memimpin pemerintahan di tingkat akar rumput, meskipun belum mencapai keseimbangan gender. Pada jabatan Direktur RSUD, Walikota, serta sejumlah pimpinan lembaga penegak hukum yang masing-masing hanya diisi oleh satu orang, belum dapat dilakukan analisis keterwakilan berdasarkan proporsi karena bersifat jabatan tunggal.

Pada lembaga legislatif, dari 49 anggota DPRD Kota Semarang, terdapat 13 perempuan (26,53%) dan 36 laki-laki (73,47%). Meskipun angka tersebut telah melampaui keterwakilan perempuan di beberapa daerah lain, proporsinya masih berada di bawah target afirmasi 30 persen yang diharapkan dalam mendorong partisipasi politik perempuan. Hal ini menunjukkan bahwa upaya peningkatan kapasitas dan kesempatan perempuan dalam bidang politik masih perlu terus diperkuat.

Sementara itu, pada unsur kepolisian, terdapat 6 pejabat perempuan dari total 24 pejabat Polres (25%), sedangkan 18 lainnya merupakan laki-laki (75%). Kondisi ini menggambarkan bahwa jabatan

struktural di sektor keamanan juga masih didominasi oleh laki-laki, meskipun peluang bagi perempuan mulai terbuka.

Di sisi lain, terdapat capaian yang cukup baik pada sektor pendidikan. Dari 345 kepala sekolah, sebanyak 242 orang (70,14%) merupakan perempuan, sedangkan 103 orang (29,86%) laki-laki. Dominasi perempuan pada jabatan kepala sekolah menunjukkan bahwa sektor pendidikan memberikan ruang yang lebih luas bagi perempuan untuk menduduki posisi kepemimpinan. Kondisi ini sekaligus mencerminkan tingginya partisipasi perempuan dalam bidang pendidikan serta adanya peluang pengembangan karier yang relatif lebih setara dibandingkan beberapa sektor lainnya.

Secara keseluruhan, data ini menunjukkan bahwa kesetaraan gender dalam pengambilan keputusan di Kota Semarang terus mengalami perkembangan, namun belum merata pada seluruh sektor. Perempuan telah menunjukkan representasi yang cukup kuat di bidang pendidikan dan mulai meningkat pada jabatan pemerintahan daerah, tetapi masih menghadapi keterbatasan pada bidang politik, kewilayahan, serta sektor penegakan hukum.

4.12 Gender Bidang Ekonomi dan Ketenagakerjaan

Bidang ekonomi dan ketenagakerjaan merupakan salah satu aspek penting dalam menggambarkan tingkat partisipasi, kesempatan, dan kontribusi perempuan serta laki-laki dalam kegiatan perekonomian. Sebagai pusat pemerintahan, perdagangan, jasa, industri, dan pendidikan di Jawa Tengah, Kota Semarang memiliki dinamika pasar kerja yang terus berkembang sehingga membuka berbagai peluang kerja bagi seluruh penduduk. Namun demikian, masih terdapat tantangan dalam mewujudkan

kesetaraan gender di bidang ini, seperti perbedaan tingkat partisipasi angkatan kerja, jenis pekerjaan yang ditekuni, akses terhadap pekerjaan yang layak, kesempatan berwirausaha, serta keterwakilan perempuan pada sektor-sektor strategis. Penyajian data ekonomi dan ketenagakerjaan yang terpilah menurut jenis kelamin menjadi penting untuk memberikan gambaran mengenai kondisi aktual perempuan dan laki-laki, mengidentifikasi kesenjangan yang masih terjadi, serta menjadi dasar dalam penyusunan kebijakan dan program pembangunan yang lebih responsif gender di Kota Semarang.

A. Pekerjaan Penduduk

Data pekerjaan penduduk merupakan salah satu indikator penting dalam menggambarkan kondisi ketenagakerjaan serta tingkat partisipasi ekonomi masyarakat. Dari perspektif gender, distribusi pekerjaan dapat menunjukkan bagaimana laki-laki dan perempuan memperoleh akses terhadap kesempatan kerja, jenis pekerjaan yang ditekuni, serta potensi adanya kesenjangan dalam pembagian peran di dunia kerja. Informasi mengenai pekerjaan juga menjadi dasar dalam mengidentifikasi karakteristik angkatan kerja, penyusunan kebijakan ketenagakerjaan yang lebih inklusif, serta perumusan program pemberdayaan ekonomi yang responsif gender. Oleh karena itu, analisis terhadap data pekerjaan tidak hanya berfokus pada jumlah tenaga kerja, tetapi juga pada upaya mewujudkan kesempatan kerja yang setara, perlindungan pekerja, dan peningkatan kualitas sumber daya manusia bagi laki-laki maupun perempuan.

Gambaran mengenai distribusi penduduk menurut jenis pekerjaan di Kota Semarang Tahun 2025 disajikan pada tabel berikut.

**Tabel 27. Pekerjaan Terbanyak Menurut Jenis Kelamin
Tahun 2025**

No	Pekerjaan	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
1	Karyawan Swasta	312.048	210.444	522.492
2	Belum/tidak bekerja	256.897	241.567	498.464
3	Pelajar/Mahasiswa	126.286	107.006	233.292
4	Mengurus rumah tangga	77	201.036	201.113
5	Wiraswasta	52.498	31.124	83.622
6	Pegawai Negeri Sipil	18.064	14.837	32.901
7	Buruh Tani/Perkebunan	15.042	10.705	25.747
8	Pensiunan	10.283	5.332	15.615
9	Buruh harian lepas	10.975	4.286	15.261
10	Guru	4.434	10.026	14.460
11	Pedagang	3.330	5.593	8.923
12	Petani/pekebun	3.696	3.163	6.859
13	Karyawan BUMN	4.530	2.325	6.855
14	Kepolisian RI	5.232	646	5.878
15	Tentara Nasional Indonesia	4.583	156	4.739
16	Dosen	2.328	2.062	4.390
17	Dokter	1.352	2.174	3.526
18	Anggota Lembaga Tinggi Lainnya	1.769	1.668	3.437
19	Perawat	521	2.647	3.168
20	Nelayan/Perikanan	1.574	65	1.639

Sumber : Disdukcapil Kota Semarang, 2025

Berdasarkan data administrasi kependudukan, lima jenis pekerjaan dengan jumlah penduduk terbanyak di Kota Semarang terdiri atas karyawan swasta, belum/tidak bekerja, pelajar/mahasiswa, mengurus

rumah tangga, dan wiraswasta. Komposisi laki-laki dan perempuan pada masing-masing kelompok pekerjaan menunjukkan adanya perbedaan pola partisipasi ekonomi yang masih dipengaruhi oleh pembagian peran gender di masyarakat.

Kelompok karyawan swasta merupakan pekerjaan dengan jumlah penduduk terbesar, yaitu sebanyak 522.492 jiwa, terdiri dari 312.048 laki-laki (59,7%) dan 210.444 perempuan (40,3%). Dominasi laki-laki pada sektor ini menunjukkan bahwa laki-laki masih menjadi kelompok yang lebih banyak terserap pada sektor formal swasta. Meskipun demikian, jumlah perempuan yang bekerja sebagai karyawan swasta juga cukup besar, yang mencerminkan semakin meningkatnya partisipasi perempuan dalam kegiatan ekonomi perkotaan. Kondisi ini menunjukkan adanya perkembangan positif dalam akses perempuan terhadap lapangan kerja formal. Namun demikian, tantangan berupa kesenjangan jenjang karier, perbedaan upah pada sektor tertentu, perlindungan pekerja perempuan, serta keseimbangan antara pekerjaan dan tanggung jawab keluarga masih perlu menjadi perhatian dalam pembangunan ketenagakerjaan yang responsif gender.

Kelompok belum atau tidak bekerja menempati urutan kedua dengan jumlah 498.464 jiwa, terdiri dari 256.897 laki-laki (51,5%) dan 241.567 perempuan (48,5%). Komposisi yang relatif seimbang menunjukkan bahwa baik laki-laki maupun perempuan masih menghadapi tantangan dalam memasuki pasar kerja. Namun demikian, karakteristik kelompok ini perlu dianalisis lebih lanjut karena mencakup berbagai kondisi, seperti pencari kerja, lulusan baru, penyandang disabilitas, maupun penduduk usia kerja yang belum memperoleh kesempatan bekerja. Dari perspektif gender, kondisi ini menunjukkan perlunya peningkatan kualitas pelatihan kerja, penguatan informasi pasar kerja, serta program

penempatan tenaga kerja yang memberikan kesempatan setara bagi laki-laki dan perempuan.

Kelompok pelajar/mahasiswa berjumlah 233.292 jiwa, terdiri dari 126.286 laki-laki (54,1%) dan 107.006 perempuan (45,9%). Tingginya jumlah pelajar dan mahasiswa menunjukkan bahwa Kota Semarang memiliki modal sumber daya manusia yang besar untuk memasuki dunia kerja pada masa mendatang. Selisih jumlah antara laki-laki dan perempuan relatif tidak terlalu jauh, sehingga menggambarkan bahwa akses terhadap pendidikan tinggi telah dinikmati oleh kedua kelompok. Kondisi ini menjadi peluang untuk meningkatkan kualitas angkatan kerja perempuan melalui pendidikan, pelatihan vokasi, penguasaan teknologi digital, dan pengembangan kompetensi yang sesuai dengan kebutuhan dunia kerja.

Kelompok mengurus rumah tangga berjumlah 201.113 jiwa, dengan komposisi 201.036 perempuan (99,96%) dan hanya 77 laki-laki (0,04%). Perbedaan yang sangat mencolok ini menunjukkan bahwa pekerjaan domestik masih sangat identik dengan perempuan. Meskipun pekerjaan mengurus rumah tangga memiliki kontribusi besar terhadap keberlangsungan kehidupan keluarga, aktivitas tersebut belum dihitung sebagai pekerjaan yang menghasilkan pendapatan sehingga sering kali tidak terlihat dalam indikator ekonomi. Kondisi ini menggambarkan masih kuatnya pembagian peran berbasis gender dalam rumah tangga yang berpotensi membatasi kesempatan perempuan untuk memasuki pasar kerja, meningkatkan pendapatan, maupun mengembangkan karier. Oleh karena itu, diperlukan kebijakan yang mendukung peningkatan partisipasi ekonomi perempuan melalui penyediaan pelatihan kewirausahaan, akses terhadap pembiayaan, pengembangan usaha rumahan, serta layanan pendukung seperti penitipan anak dan fleksibilitas kerja.

Kelompok wiraswasta berjumlah 83.622 jiwa, terdiri dari 52.498 laki-laki (62,8%) dan 31.124 perempuan (37,2%). Dominasi laki-laki

menunjukkan bahwa laki-laki masih lebih banyak berperan sebagai pelaku usaha. Meskipun demikian, jumlah perempuan yang menjalankan usaha juga cukup besar dan berpotensi terus meningkat seiring berkembangnya sektor UMKM di Kota Semarang. Perempuan pelaku usaha umumnya menghadapi tantangan berupa keterbatasan akses terhadap modal, teknologi, pemasaran digital, jaringan usaha, dan legalitas usaha. Oleh karena itu, penguatan kapasitas UMKM perempuan melalui pelatihan, pendampingan, fasilitasi akses pembiayaan, serta perluasan pemasaran menjadi strategi penting dalam meningkatkan pemberdayaan ekonomi perempuan.

Secara keseluruhan, data lima pekerjaan terbanyak menunjukkan bahwa perempuan di Kota Semarang telah berpartisipasi cukup besar dalam sektor formal maupun kegiatan ekonomi produktif. Namun demikian, masih terlihat adanya segregasi pekerjaan berdasarkan gender, terutama pada pekerjaan domestik yang hampir seluruhnya dilakukan oleh perempuan dan pada sektor usaha yang masih didominasi laki-laki. Kondisi tersebut mengindikasikan bahwa upaya mewujudkan kesetaraan gender di bidang ketenagakerjaan perlu terus diperkuat melalui kebijakan pembangunan yang memberikan kesempatan, akses, partisipasi, kontrol, dan manfaat yang setara bagi laki-laki maupun perempuan. Pemerintah Kota Semarang dapat memperkuat kebijakan tersebut melalui peningkatan pelatihan kerja yang responsif gender, pengembangan kewirausahaan perempuan, perluasan kesempatan kerja yang inklusif, penguatan perlindungan pekerja perempuan, serta penyediaan layanan pendukung yang memungkinkan perempuan berpartisipasi lebih optimal dalam pembangunan ekonomi daerah.

B. Perempuan Nelayan

Kota Semarang merupakan salah satu daerah pesisir di Provinsi Jawa Tengah yang memiliki garis pantai di bagian utara serta didukung oleh aktivitas perikanan tangkap, budidaya, dan pengolahan hasil perikanan. Keberadaan kawasan pesisir menjadikan sektor kelautan dan perikanan sebagai salah satu sektor yang berkontribusi terhadap perekonomian masyarakat, khususnya di wilayah pesisir seperti Kecamatan Tugu, Semarang Barat, Semarang Utara, Genuk, dan Gayamsari. Pemerintah Kota Semarang terus memberikan perhatian terhadap pembangunan sektor kelautan dan perikanan melalui berbagai program, antara lain peningkatan sarana dan prasarana perikanan, pemberdayaan nelayan, pengembangan kampung nelayan, peningkatan nilai tambah hasil perikanan, serta penguatan ketahanan ekonomi masyarakat pesisir. Dalam perspektif gender, pembangunan sektor perikanan tidak hanya diarahkan untuk meningkatkan produktivitas, tetapi juga memastikan bahwa laki-laki dan perempuan memperoleh kesempatan, akses, partisipasi, kontrol, dan manfaat yang setara dalam seluruh rantai usaha perikanan.

Data menunjukkan bahwa jumlah penduduk yang bekerja sebagai nelayan atau di sektor perikanan di Kota Semarang sebanyak 1.639 orang, terdiri atas 1.574 laki-laki (96,03%) dan 65 perempuan (3,97%) (Dispendukcapil, 2025). Komposisi tersebut menunjukkan bahwa sektor penangkapan ikan dan aktivitas utama sebagai nelayan masih sangat didominasi oleh laki-laki. Kondisi ini dipengaruhi oleh karakteristik pekerjaan yang memerlukan aktivitas melaut dalam waktu yang relatif lama, menghadapi risiko cuaca, serta membutuhkan kondisi fisik yang kuat. Sementara itu, keterlibatan perempuan dalam sektor perikanan relatif lebih sedikit apabila dilihat dari status pekerjaan utama. Namun demikian, kontribusi perempuan di kawasan pesisir sesungguhnya tidak dapat dipandang kecil karena banyak perempuan berperan dalam kegiatan

pascapanen, seperti membersihkan, mengolah, mengawetkan, mengemas, memasarkan hasil tangkapan, hingga mengelola keuangan rumah tangga nelayan. Sebagian besar aktivitas tersebut belum sepenuhnya tercermin dalam data pekerjaan formal sehingga kontribusi ekonomi perempuan di sektor perikanan sering kali kurang terlihat.

Dari perspektif gender, kondisi ini menunjukkan bahwa masih terdapat pembagian peran yang cukup kuat antara laki-laki dan perempuan dalam sektor kelautan dan perikanan. Oleh karena itu, kebijakan pembangunan perikanan di Kota Semarang perlu terus memperkuat pemberdayaan perempuan pesisir melalui pelatihan pengolahan hasil perikanan, pengembangan kewirausahaan berbasis hasil laut, peningkatan akses terhadap permodalan dan teknologi, serta perluasan pemasaran produk perikanan. Selain meningkatkan kesejahteraan keluarga nelayan, upaya tersebut juga dapat memperluas partisipasi ekonomi perempuan, menciptakan nilai tambah pada sektor perikanan, serta mendukung terwujudnya pembangunan daerah yang inklusif, berkelanjutan, dan berkeadilan gender.

C. Ketenagakerjaan dan Ekonomi

Bidang ketenagakerjaan dan ekonomi merupakan salah satu aspek penting dalam mewujudkan pembangunan yang berkeadilan gender, karena berkaitan langsung dengan kesempatan memperoleh pekerjaan, pendapatan, serta peningkatan kesejahteraan masyarakat. Kesetaraan akses dan partisipasi laki-laki maupun perempuan dalam kegiatan ekonomi menjadi faktor yang menentukan keberhasilan pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan. Oleh karena itu, penyajian data ketenagakerjaan dan ekonomi berdasarkan jenis kelamin sangat diperlukan untuk mengidentifikasi kondisi, potensi, maupun kesenjangan yang masih terjadi, baik dalam akses terhadap lapangan kerja, jenis pekerjaan yang ditekuni,

tingkat partisipasi angkatan kerja, maupun peluang pengembangan usaha. Informasi tersebut menjadi dasar bagi pemerintah daerah dalam menyusun kebijakan, program, dan strategi pemberdayaan ekonomi yang responsif gender sehingga laki-laki dan perempuan memiliki kesempatan, akses, partisipasi, kontrol, dan manfaat yang setara dalam pembangunan ekonomi.

Gambaran kondisi ketenagakerjaan dan ekonomi masyarakat di Kota Semarang Tahun 2025 berdasarkan indikator-indikator yang relevan disajikan pada tabel berikut.

**Tabel 28. Ketenagakerjaan dan Ekonomi
Tahun 2025**

No	Jenis Data	Jumlah
A	KETENAGAKERJAAN DAN EKONOMI	
1	Jumlah penduduk menurut pekerjaan laki-laki (orang)	519.036
	Jumlah penduduk menurut pekerjaan perempuan (orang)	419.730
6	Jumlah pencari kerja laki-laki (orang)	1.511
7	Jumlah pencari kerja perempuan (orang)	1.516
8	Jumlah tenaga kerja yang ditempatkan laki-laki (orang)	1.525
9	Jumlah tenaga kerja yang ditempatkan perempuan (orang)	1.674
10	Jumlah pekerja migran laki-laki (orang)	30
11	Jumlah pekerja migran menurut jenis kelamin (orang)	228
B	ANGKATAN KERJA	

1	Total Angkatan kerja (Laki-laki dan Perempuan) (orang)	994.994
2	TPAK laki-laki (%)	81,61
3	TPAK Perempuan (%)	63,95
4	Distribusi pekerja per sektor formal laki-laki	210.560
5	Distribusi pekerja per sektor formal perempuan	149.655

Sumber : Disnaker Kota Semarang, Sakernas BPS 2025

Struktur ketenagakerjaan di Kota Semarang Tahun 2025 menunjukkan bahwa kesempatan kerja tersebar pada berbagai sektor ekonomi, dengan dominasi pada pekerjaan sebagai karyawan swasta, pekerja yang belum atau tidak bekerja, pelajar/mahasiswa, serta pekerjaan domestik mengurus rumah tangga. Berdasarkan data ketenagakerjaan, jumlah penduduk yang bekerja mencapai 519.036 laki-laki dan 419.730 perempuan, sedangkan total angkatan kerja mencapai 994.994 orang. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) laki-laki sebesar 81,61 persen masih lebih tinggi dibandingkan perempuan yang mencapai 63,95 persen. Kondisi ini menunjukkan bahwa partisipasi perempuan dalam pasar kerja formal masih menghadapi berbagai kendala dibandingkan laki-laki.

Apabila ditinjau berdasarkan jenis pekerjaan, karyawan swasta merupakan pekerjaan dengan jumlah tenaga kerja terbesar dan diisi oleh laki-laki maupun perempuan. Namun demikian, terdapat kecenderungan bahwa laki-laki masih mendominasi sebagian besar pekerjaan produktif di sektor formal maupun sektor yang membutuhkan mobilitas dan pekerjaan lapangan, seperti wiraswasta, buruh harian lepas, buruh tani/perkebunan, nelayan/perikanan, anggota TNI, Kepolisian, serta pekerja pada BUMN. Sebaliknya, perempuan lebih banyak terkonsentrasi pada pekerjaan mengurus rumah tangga yang jumlahnya jauh lebih tinggi dibandingkan

laki-laki, serta memiliki proporsi yang relatif lebih besar pada profesi guru, perawat, dan dokter. Pola tersebut menunjukkan bahwa pembagian peran berdasarkan gender masih cukup kuat, di mana perempuan cenderung berada pada sektor pelayanan, pengasuhan, dan pekerjaan domestik, sedangkan laki-laki lebih banyak bekerja pada sektor yang bersifat teknis, keamanan, maupun pekerjaan dengan risiko fisik yang lebih tinggi.

Besarnya jumlah perempuan yang tercatat mengurus rumah tangga juga menggambarkan bahwa pekerjaan domestik masih didominasi oleh perempuan. Meskipun pekerjaan ini memiliki kontribusi penting dalam mendukung keberlangsungan rumah tangga dan pembangunan sumber daya manusia, pekerjaan domestik belum sepenuhnya tercermin sebagai aktivitas ekonomi yang menghasilkan pendapatan. Kondisi tersebut berpotensi membatasi akses perempuan terhadap kesempatan kerja, pengembangan karier, perlindungan sosial ketenagakerjaan, maupun peningkatan kemandirian ekonomi.

Di sisi lain, data penempatan tenaga kerja menunjukkan bahwa perempuan yang berhasil ditempatkan bekerja pada tahun 2025 berjumlah 1.674 orang, sedikit lebih tinggi dibandingkan laki-laki sebanyak 1.525 orang. Jumlah pencari kerja antara laki-laki dan perempuan juga relatif seimbang, yaitu masing-masing sebanyak 1.511 orang dan 1.516 orang. Kondisi ini mengindikasikan bahwa minat perempuan untuk memasuki dunia kerja cukup tinggi dan peluang penempatan kerja mulai menunjukkan perkembangan yang lebih inklusif.

Secara keseluruhan, kondisi ketenagakerjaan di Kota Semarang masih menunjukkan adanya kesenjangan gender dalam pembagian jenis pekerjaan maupun tingkat partisipasi angkatan kerja. Oleh karena itu, pengarusutamaan gender dalam bidang ketenagakerjaan perlu terus diperkuat melalui peningkatan akses perempuan terhadap pendidikan dan pelatihan vokasi, perluasan kesempatan kerja yang setara,

pengembangan kewirausahaan perempuan, penyediaan lingkungan kerja yang ramah keluarga, serta pengurangan hambatan yang menyebabkan perempuan lebih banyak berada di sektor domestik. Upaya tersebut diharapkan dapat meningkatkan partisipasi ekonomi perempuan sekaligus mewujudkan pembangunan yang lebih adil, inklusif, dan berkelanjutan di Kota Semarang.

Berikut tabel ketenagakerjaan di Bidang Kesehatan.

**Tabel 29. Jumlah Tenaga Kesehatan
Tahun 2025**

No	Tenaga Kesehatan	L	P	Jml
1	Dokter Spesialis	1	-	1
2	Dokter Umum	71	215	286
3	Dokter Gigi Spesialis	-	-	-
4	Dokter Gigi	6	77	83
5	Perawat	180	552	732
6	Bidan	-	368	368
7	Apoteker	11	165	176
8	Teknis kefarmasian	-	-	-
9	Kesehatan masyarakat	-	-	-
10	Sanitarian	12	43	55
11	Nutrisi	4	95	99
12	Keterampilan fisik	-	-	-
13	Ketehnikisan medis	-	-	-
14	Teknis biomedika	-	-	-
15	Ahli teknologi lab medik	-	-	-

Sumber : BKPP Kota Semarang

Berdasarkan data jumlah tenaga kesehatan menurut jenis kelamin Tahun 2025, terlihat bahwa komposisi sumber daya manusia di sektor

kesehatan Kota Semarang masih menunjukkan perbedaan yang cukup nyata berdasarkan jenis profesi. Secara umum, perempuan mendominasi sebagian besar profesi tenaga kesehatan, terutama pada profesi yang berkaitan dengan pelayanan keperawatan, kebidanan, farmasi, gizi, dan kesehatan masyarakat. Kondisi ini mencerminkan masih adanya segmentasi pekerjaan berdasarkan gender, di mana profesi tertentu lebih banyak diisi oleh perempuan dibandingkan laki-laki.

Dominasi perempuan tampak pada profesi dokter umum dengan 215 perempuan dan 71 laki-laki, dokter gigi dengan 77 perempuan dan 6 laki-laki, perawat sebanyak 552 perempuan dan 180 laki-laki, serta apoteker sebanyak 165 perempuan dan 11 laki-laki. Kesenjangan yang paling mencolok terlihat pada profesi bidan, yang seluruhnya berjumlah 368 orang dan seluruhnya merupakan perempuan, sesuai dengan karakteristik profesi yang secara regulasi memang diperuntukkan bagi perempuan. Selain itu, perempuan juga mendominasi profesi sanitarian (43 perempuan dan 12 laki-laki) serta nutrisisionis (95 perempuan dan 4 laki-laki). Data ini menunjukkan bahwa perempuan memiliki peran yang sangat besar dalam penyelenggaraan layanan kesehatan, khususnya pada pelayanan promotif, preventif, kuratif, maupun rehabilitatif.

Dari perspektif gender, tingginya keterlibatan perempuan dalam sektor kesehatan merupakan potensi yang mendukung peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat. Namun demikian, dominasi jumlah perempuan pada profesi tertentu juga menunjukkan bahwa pembagian peran di dunia kerja masih dipengaruhi oleh konstruksi sosial mengenai jenis pekerjaan yang dianggap sesuai bagi perempuan maupun laki-laki. Oleh karena itu, pengarusutamaan gender di sektor kesehatan tidak hanya diarahkan pada peningkatan jumlah tenaga kesehatan, tetapi juga pada terciptanya kesempatan yang setara bagi perempuan dan laki-laki untuk

memilih, mengembangkan karier, memperoleh pelatihan, serta menduduki posisi kepemimpinan tanpa dipengaruhi oleh stereotip gender. Berikut tabel ketenagakerjaan di Bidang Pendidikan.

**Tabel 30. Jumlah Guru dan Kepala Sekolah di Kota Semarang
Tahun Ajaran 2025/2026**

No	Guru	2025/2026		
		L	P	Jml
1	PNS Fungsional Guru	684	1.790	2.474
2	PNS Kepala Sekolah	103	242	345
3	PPPK Guru	1.243	2.598	3.841

Sumber, BKPP Kota Semarang

Berdasarkan data jumlah guru dan kepala sekolah menurut jenis kelamin Tahun Ajaran 2025/2026, terlihat bahwa perempuan mendominasi profesi pendidik di lingkungan Pemerintah Kota Semarang. Dominasi tersebut terlihat baik pada jabatan fungsional guru maupun jabatan kepala sekolah. Kondisi ini menunjukkan bahwa sektor pendidikan merupakan salah satu bidang yang memberikan ruang partisipasi cukup besar bagi perempuan dalam mendukung penyelenggaraan layanan pendidikan.

Pada jabatan PNS Fungsional Guru, terdapat 1.790 guru perempuan dan 684 guru laki-laki, sehingga sekitar 72,4 persen dari total guru PNS merupakan perempuan. Pola yang sama juga terlihat pada PPPK Guru, di mana jumlah perempuan mencapai 2.598 orang, lebih dari dua kali lipat dibandingkan laki-laki yang berjumlah 1.243 orang. Data ini menunjukkan bahwa perempuan memiliki keterwakilan yang sangat kuat dalam profesi guru, sekaligus mencerminkan tingginya partisipasi perempuan dalam pembangunan sumber daya manusia melalui sektor pendidikan.

Dominasi perempuan juga terlihat pada jabatan Kepala Sekolah, dengan 242 kepala sekolah perempuan dan 103 kepala sekolah laki-laki. Hal ini menunjukkan bahwa perempuan tidak hanya berperan sebagai tenaga pendidik, tetapi juga memiliki kesempatan untuk menduduki posisi kepemimpinan di lingkungan sekolah. Dari perspektif gender, kondisi tersebut merupakan indikator yang positif karena mencerminkan semakin terbukanya akses perempuan terhadap jabatan strategis di sektor pendidikan. Keberadaan perempuan pada posisi kepala sekolah juga mengindikasikan bahwa peluang pengembangan karier di bidang pendidikan relatif lebih setara dibandingkan beberapa sektor lainnya.

Berikut tabel ketenagakerjaan di Pemerintah Kota Semarang.

**Tabel 31. Jumlah Pegawai Negeri Sipil di Kota Semarang
Tahun 2025**

No.	Data	L	P	Total	Ket
1	Eselon II bukan Kepala Perangkat Daerah	7		7	
2	PNS Kantor Sekda	82	101	183	
3	PNS Badan/Dinas	1.912	3.873	5.785	Terdiri dari 30 Badan/Dinas
4	PNS RSUD	151	438		Termasuk 1 Direktur RSUD
5	PNS Kecamatan	118	103	221	Termasuk 16 Camat
6	PNS Kelurahan	455	422	877	Termasuk 177 Lurah
7	Jabatan Fungsional, Struktural pada dinas pemerintahan pejabat eselon III, IV	3.404	7.434	10.838	Data termasuk CPNS, PNS, PPPK, PPPK PW
8	PNS Difabel	13	5	18	
9	PNS Kejaksaan	79	76	155	PNS + PPNP
9	Polisi di Wilayah Polres	1.807	144	1.951	
10	Polisi Unit Khusus PPA	11	8	19	
NOTE : Tanpa CPNS					

Sumber : Polrestabes, BKPP Kota Semarang

Data Aparatur Sipil Negara (ASN) dan personel pemerintahan di Kota Semarang Tahun 2025 menunjukkan bahwa keterwakilan laki-laki dan perempuan berbeda pada masing-masing sektor kerja sesuai dengan karakteristik jabatan dan bidang tugasnya. Perbedaan tersebut tidak semata menunjukkan adanya ketimpangan, namun mencerminkan masih adanya segregasi pekerjaan berdasarkan gender yang perlu terus diperhatikan dalam kebijakan pengembangan sumber daya manusia.

Pada lingkungan PNS Badan/Dinas, jumlah pegawai perempuan mencapai 3.873 orang (66,9%), lebih tinggi dibandingkan laki-laki sebanyak 1.912 orang (33,1%). Kondisi ini menunjukkan bahwa perempuan telah memiliki akses yang sangat baik terhadap pekerjaan di lingkungan pemerintahan daerah, terutama pada jabatan administrasi maupun jabatan fungsional yang banyak berada di perangkat daerah.

Dominasi perempuan juga terlihat pada PNS RSUD, yaitu 438 orang (74,4%) dibandingkan laki-laki 151 orang (25,6%). Komposisi ini sejalan dengan karakteristik sektor kesehatan yang secara umum banyak diisi oleh tenaga keperawatan, kebidanan, farmasi, dan profesi kesehatan lainnya yang didominasi perempuan. Hal tersebut menunjukkan tingginya kontribusi perempuan dalam penyelenggaraan pelayanan kesehatan kepada masyarakat.

Sebaliknya, pada PNS Kecamatan dan PNS Kelurahan komposisi pegawai relatif lebih seimbang. Di tingkat kecamatan terdapat 118 laki-laki (53,4%) dan 103 perempuan (46,6%), sedangkan di tingkat kelurahan terdapat 455 laki-laki (51,9%) dan 422 perempuan (48,1%). Kondisi ini menunjukkan bahwa kesempatan bekerja pada pemerintahan wilayah telah relatif setara bagi laki-laki maupun perempuan.

Pada kelompok jabatan fungsional dan struktural (pejabat eselon III dan IV), perempuan mendominasi dengan jumlah 7.434 orang (68,6%), sedangkan laki-laki sebanyak 3.404 orang (31,4%). Data ini

mengindikasikan bahwa perempuan tidak hanya berperan sebagai pelaksana, tetapi juga telah memperoleh ruang yang cukup besar dalam jabatan fungsional dan sebagian jabatan struktural di lingkungan Pemerintah Kota Semarang. Meskipun demikian, perlu dilakukan analisis lebih lanjut mengenai distribusi perempuan pada jabatan strategis dan posisi pengambil keputusan tingkat tinggi agar kesetaraan gender dapat dinilai secara lebih komprehensif.

Data PNS difabel menunjukkan terdapat 18 pegawai, terdiri atas 13 laki-laki (72,2%) dan 5 perempuan (27,8%). Meskipun jumlahnya relatif kecil, keberadaan ASN penyandang disabilitas mencerminkan komitmen pemerintah daerah dalam memberikan kesempatan kerja yang inklusif. Ke depan, perlu terus didorong peningkatan akses dan akomodasi yang layak agar perempuan penyandang disabilitas juga memperoleh kesempatan yang setara dalam dunia kerja.

Berbeda dengan kondisi ASN, pada institusi Kepolisian di wilayah Polrestabes Semarang terlihat dominasi laki-laki yang cukup tinggi, yaitu 1.807 personel (92,6%), sedangkan perempuan berjumlah 144 personel (7,4%). Demikian pula pada Unit Khusus Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) terdapat 11 personel laki-laki dan 8 personel perempuan. Walaupun secara umum institusi kepolisian masih didominasi laki-laki karena karakteristik tugas operasional, keterlibatan personel perempuan pada Unit PPA memiliki peran penting dalam memberikan pelayanan yang responsif gender, khususnya dalam penanganan perempuan dan anak yang menjadi korban maupun saksi tindak pidana.

Secara keseluruhan, data ini menunjukkan bahwa Pemerintah Kota Semarang telah memberikan akses yang cukup baik bagi perempuan dalam sektor pemerintahan, bahkan pada beberapa bidang jumlah perempuan telah melampaui laki-laki. Namun demikian, upaya Pengarusutamaan Gender (PUG) tetap perlu diarahkan pada peningkatan

kualitas partisipasi perempuan dalam jabatan kepemimpinan strategis, penguatan kesempatan yang setara bagi penyandang disabilitas, serta pengurangan segregasi pekerjaan berdasarkan gender sehingga prinsip kesetaraan akses, partisipasi, kontrol, dan manfaat dapat terwujud secara lebih optimal.

4.6 Gender Bidang Koperasi dan UMKM

Pemberdayaan ekonomi perempuan melalui keterlibatan dalam koperasi dan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) merupakan salah satu aspek penting dalam mewujudkan kesetaraan gender dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Perempuan tidak hanya berperan sebagai pelaku usaha, tetapi juga sebagai penggerak ekonomi keluarga dan komunitas yang berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi daerah. Namun demikian, perempuan pelaku koperasi dan UMKM masih menghadapi berbagai tantangan, antara lain dalam akses terhadap permodalan, peningkatan kapasitas usaha, pemanfaatan teknologi, serta perluasan jaringan pemasaran. Oleh karena itu, data mengenai perempuan dalam koperasi dan UMKM menjadi informasi penting untuk melihat tingkat partisipasi perempuan dalam sektor ekonomi sekaligus sebagai dasar penyusunan kebijakan dan program pemberdayaan ekonomi yang responsif gender. Berikut disajikan data mengenai Perempuan, Koperasi, dan UMKM di Kota Semarang Tahun 2025.

Tabel 32. Perempuan Koperasi dan UMKM
Tahun 2025

NO	Uraian Indikator	L	P	Jumlah	Satuan
1	Jumlah Koperasi Aktif			755	Kop

2	Jumlah Anggota Koperasi Aktif	67,668	70,336	138.004	Org
3	Jumlah Manajer Koperasi	74	59	133	Org
4	Jumlah Karyawan Koperasi	2.588	2.357	4.945	Org
5	Jumlah Koperasi Wanita / Perempuan			38	Kop
6	Jumlah Anggota Koperasi Wanita / Perempuan	4	4.199	4.203	Org
7	Jumlah Usaha Mikro	9.742	21.049	30.791	Usaha
8	Jumlah Pelaku Usaha Mikro	9.742	21.049	30.791	Org
9	Jumlah UMKM Binaan	9.742	21.049	30.791	Usaha
10	Jumlah Pelaku (Pemilik) UMKM Binaan	9.742	21.049	30.791	Org
11	Jumlah Penyerapan Tenaga Kerja UMKM Binaan	13.110	24.021	37.131	Org
12	Jumlah Bank Sampah			856	Usaha
13	Jumlah Pengurus Organisasi Perempuan (PKK)	0	76	76	Org
14	Jumlah Anggota Organisasi Perempuan (PKK)	125	166.299	166.424	Org

Sumber : Dinas Koperasi dan Usaha Mikro, PKK, DLH Kota Semarang, 2025

Data Koperasi dan UMKM Kota Semarang Tahun 2025 menunjukkan bahwa perempuan memiliki peran yang cukup signifikan dalam pengembangan koperasi dan usaha mikro, meskipun pola keterlibatannya berbeda pada setiap aspek kelembagaan. Dari 755 koperasi aktif, terdapat 38 koperasi wanita, yang menunjukkan adanya

ruang bagi perempuan untuk membangun kelembagaan ekonomi yang berorientasi pada pemberdayaan anggotanya. Kehadiran koperasi wanita menjadi salah satu instrumen penting dalam meningkatkan akses perempuan terhadap permodalan, pengembangan usaha, serta peningkatan kesejahteraan keluarga.

Berdasarkan keanggotaan koperasi, jumlah anggota laki-laki mencapai 67.868 orang, sedangkan perempuan sebanyak 70.336 orang, sehingga perempuan merupakan 50,9 persen dari total 138.004 anggota koperasi. Kondisi ini menunjukkan bahwa partisipasi perempuan dalam kegiatan koperasi sedikit lebih tinggi dibandingkan laki-laki. Tingginya keikutsertaan perempuan mencerminkan semakin meningkatnya kesadaran dan akses perempuan terhadap aktivitas ekonomi berbasis kelembagaan, sekaligus menunjukkan bahwa koperasi menjadi salah satu wadah yang inklusif bagi perempuan dalam mengembangkan kapasitas ekonomi.

Pada aspek kepengurusan koperasi, terdapat 74 manajer koperasi laki-laki dan 59 perempuan, atau sekitar 44,36 persen dari seluruh manajer koperasi merupakan perempuan. Meskipun jumlahnya belum setara, proporsi tersebut menunjukkan bahwa perempuan mulai memperoleh kesempatan untuk menduduki posisi strategis dalam pengelolaan koperasi. Sebaliknya, pada tenaga kerja koperasi, komposisi laki-laki (2.588 orang) sedikit lebih tinggi dibandingkan perempuan (2.357 orang), sehingga distribusi tenaga kerja di sektor koperasi relatif seimbang.

Data usaha mikro menunjukkan dominasi perempuan sebagai pelaku usaha. Dari 30.791 pelaku usaha mikro, sebanyak 21.049 orang (68,36 persen) adalah perempuan, sedangkan 9.742 orang (31,64 persen) merupakan laki-laki. Kondisi ini mengindikasikan bahwa perempuan memiliki kontribusi yang sangat besar dalam sektor usaha mikro, yang umumnya menjadi sumber pendapatan keluarga sekaligus membuka

peluang ekonomi berbasis rumah tangga. Tingginya jumlah pelaku usaha perempuan juga mencerminkan meningkatnya kemandirian ekonomi perempuan serta besarnya potensi UMKM sebagai media pemberdayaan perempuan.

Berdasarkan data tahun 2025, terdapat 30.791 UMKM binaan di Kota Semarang yang terdiri atas 9.742 pelaku usaha laki-laki (31,64%) dan 21.049 pelaku usaha perempuan (68,36%). Sementara itu, jumlah pemilik UMKM binaan memiliki komposisi yang sama, yaitu 9.742 laki-laki dan 21.049 perempuan, serta tenaga kerja UMKM binaan berjumlah 37.131 orang, terdiri atas 13.110 laki-laki (35,31%) dan 24.021 perempuan (64,69%).

Mengenai jumlah UMKM binaan, data menunjukkan bahwa perempuan mendominasi kepemilikan UMKM binaan di Kota Semarang, dengan proporsi lebih dari dua pertiga dari seluruh pelaku usaha. Kondisi ini mengindikasikan bahwa perempuan memiliki peran yang sangat strategis sebagai penggerak ekonomi kerakyatan, khususnya pada sektor usaha mikro dan kecil. Tingginya keterlibatan perempuan juga mencerminkan semakin terbukanya akses terhadap program pembinaan pemerintah, yang menjadi salah satu indikator positif dalam upaya mewujudkan kesetaraan gender di bidang ekonomi.

Komposisi pemilik UMKM binaan yang identik dengan jumlah UMKM binaan menunjukkan bahwa mayoritas usaha dikelola secara langsung oleh pemiliknya (owner-managed). Dominasi perempuan sebagai pemilik usaha memperlihatkan meningkatnya kapasitas perempuan sebagai pengambil keputusan ekonomi, baik dalam pengelolaan usaha maupun dalam meningkatkan kesejahteraan keluarga. Dari perspektif Pengarusutamaan Gender (PUG), kondisi ini merupakan peluang bagi Pemerintah Kota Semarang untuk terus memperkuat pemberdayaan ekonomi perempuan melalui peningkatan akses terhadap

pembiayaan, literasi digital, inovasi produk, sertifikasi usaha, dan perluasan pasar, tanpa mengurangi kesempatan yang sama bagi pelaku usaha laki-laki.

UMKM binaan tidak hanya berkontribusi terhadap pertumbuhan usaha, tetapi juga terhadap penciptaan lapangan kerja. Dari 37.131 tenaga kerja yang terserap, 24.021 orang (64,69%) merupakan perempuan dan 13.110 orang (35,31%) laki-laki. Hal ini menunjukkan bahwa sektor UMKM menjadi salah satu sumber kesempatan kerja yang sangat penting bagi perempuan di Kota Semarang. Tingginya partisipasi perempuan dalam tenaga kerja UMKM mengindikasikan bahwa sektor ini mampu meningkatkan kemandirian ekonomi perempuan sekaligus memperkuat ketahanan ekonomi rumah tangga. Namun demikian, diperlukan kebijakan yang responsif gender untuk memastikan perempuan dan laki-laki memperoleh kesempatan yang setara dalam peningkatan kompetensi, akses terhadap teknologi, perlindungan ketenagakerjaan, pengembangan karier, serta peningkatan produktivitas usaha.

Peran kepemimpinan perempuan juga terlihat pada organisasi PKK, di mana seluruh 76 pengurus PKK merupakan perempuan. Selain itu, jumlah anggota organisasi perempuan PKK mencapai 166.299 orang, lebih tinggi dibandingkan anggota laki-laki sebanyak 125 orang, dari total 166.424 anggota. Kondisi ini menunjukkan bahwa organisasi perempuan masih menjadi kekuatan utama dalam menggerakkan kegiatan pemberdayaan masyarakat, termasuk pengembangan ekonomi keluarga melalui berbagai program usaha produktif.

Secara keseluruhan, data ini menunjukkan bahwa perempuan memiliki kontribusi yang sangat besar dalam pembangunan ekonomi berbasis koperasi dan UMKM di Kota Semarang. Namun demikian, keterwakilan perempuan pada posisi manajerial koperasi masih dapat terus ditingkatkan

agar kesetaraan gender tidak hanya tercermin pada tingkat partisipasi, tetapi juga dalam proses pengambilan keputusan ekonomi.

4.13 Gender Bidang Sosial

Layanan sosial merupakan salah satu bentuk komitmen pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui penyediaan berbagai layanan yang responsif, inklusif, dan berkeadilan gender. Pelaksanaan layanan sosial tidak hanya ditujukan untuk memenuhi kebutuhan dasar masyarakat, tetapi juga memberikan perlindungan, pemberdayaan, serta akses yang setara bagi seluruh kelompok masyarakat, termasuk perempuan, laki-laki, anak, lanjut usia, penyandang disabilitas, dan kelompok rentan lainnya. Penyajian data layanan sosial dalam Profil Gender menjadi penting sebagai bahan evaluasi terhadap capaian pembangunan yang berperspektif gender serta sebagai dasar dalam penyusunan kebijakan yang lebih efektif dan tepat sasaran. Berikut capaian layanan sosial bagi masyarakat sepanjang Tahun 2025.

**Tabel 33. Layanan Sosial Kota Semarang
Tahun 2025**

No	Uraian	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
1	PPKS (Non fakir miskin)	2.416	2.605	5.021
2	Penyandang disabilitas	2.257	1.669	3.926
3	Disabilitas mental	29	20	49
4	Perempuan rawan sosek		857	857
5	Orang terlantar	8	1	9
6	Lansia terlantar	13	3	16
7	Korban bencana	1.283	1,202	2.485

Sumber : Dinas Sosial Kota Semarang

Data layanan sosial menunjukkan bahwa kebutuhan layanan yang diterima masyarakat di Kota Semarang memiliki karakteristik yang berbeda antara laki-laki dan perempuan. Perbedaan ini tidak hanya dipengaruhi oleh jumlah penerima layanan, tetapi juga oleh kondisi sosial, ekonomi, dan peran gender yang melekat di masyarakat. Oleh karena itu, penyediaan layanan sosial perlu memperhatikan kebutuhan spesifik setiap kelompok agar prinsip keadilan dan kesetaraan gender dapat diwujudkan dalam penyelenggaraan pelayanan publik.

Pada kategori PPKS (Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial) non fakir miskin, penerima layanan didominasi oleh perempuan sebanyak 2.605 orang (51,9%), sedangkan laki-laki sebanyak 2.416 orang (48,1%). Kondisi ini menunjukkan bahwa perempuan masih menghadapi kerentanan sosial yang relatif lebih tinggi, yang dapat dipengaruhi oleh berbagai faktor seperti status sebagai kepala keluarga perempuan, keterbatasan akses terhadap pekerjaan yang layak, maupun beban pengasuhan dalam rumah tangga.

Sebaliknya, pada layanan penyandang disabilitas, penerima layanan didominasi oleh laki-laki sebanyak 2.257 orang (57,5%), sedangkan perempuan sebanyak 1.669 orang (42,5%). Perbedaan ini dapat mencerminkan lebih besarnya jumlah penyandang disabilitas laki-laki yang terdata atau memperoleh akses layanan. Namun demikian, perlu dipastikan bahwa perempuan penyandang disabilitas tidak menghadapi hambatan ganda dalam memperoleh layanan sosial, mengingat mereka rentan mengalami diskriminasi baik karena gender maupun kondisi disabilitas.

Pada kategori disabilitas mental, jumlah penerima layanan relatif seimbang, yaitu 29 laki-laki dan 20 perempuan. Walaupun jumlahnya tidak besar, layanan kesehatan jiwa dan rehabilitasi sosial perlu tetap memperhatikan kebutuhan yang berbeda antara laki-laki dan perempuan,

termasuk dukungan keluarga, rehabilitasi psikososial, dan reintegrasi ke masyarakat.

Kategori perempuan rawan sosial ekonomi mencatat 857 penerima layanan, yang seluruhnya merupakan perempuan sesuai sasaran program. Data ini menunjukkan masih adanya kelompok perempuan yang berada dalam kondisi rentan akibat keterbatasan ekonomi, rendahnya akses terhadap pekerjaan produktif, maupun beban pengasuhan keluarga. Kondisi tersebut memperlihatkan pentingnya program pemberdayaan ekonomi perempuan melalui pelatihan keterampilan, akses permodalan, dan penguatan usaha produktif agar perempuan memiliki kemandirian ekonomi yang lebih baik.

Pada layanan orang terlantar dan lansia terlantar, penerima layanan lebih banyak merupakan laki-laki, masing-masing sebanyak 8 dari 9 orang dan 13 dari 16 orang. Kondisi ini mengindikasikan bahwa laki-laki juga menghadapi kerentanan sosial, terutama pada kelompok yang kehilangan dukungan keluarga atau mengalami keterbatasan ekonomi di usia lanjut. Oleh karena itu, kebijakan perlindungan sosial perlu menjangkau seluruh kelompok rentan tanpa membedakan jenis kelamin, dengan tetap memperhatikan kebutuhan spesifik masing-masing kelompok.

Sementara itu, pada kategori korban bencana, jumlah penerima layanan antara laki-laki (1.283 orang) dan perempuan (1.202 orang) relatif seimbang. Hal ini menunjukkan bahwa dampak bencana dirasakan oleh kedua kelompok. Namun, dalam pelaksanaan penanganan bencana tetap diperlukan pendekatan yang responsif gender, mengingat perempuan, anak, lansia, penyandang disabilitas, serta kelompok rentan lainnya memiliki kebutuhan perlindungan, kesehatan, sanitasi, dan pemulihan yang berbeda dibandingkan laki-laki.

Secara keseluruhan, data layanan sosial Kota Semarang Tahun 2025 menunjukkan bahwa kebutuhan perlindungan sosial dialami oleh baik

laki-laki maupun perempuan dengan karakteristik kerentanan yang berbeda. Oleh karena itu, perencanaan program kesejahteraan sosial perlu terus didukung oleh data terpilah menurut jenis kelamin sebagai dasar penyusunan kebijakan yang responsif gender, sehingga seluruh masyarakat memperoleh akses layanan yang setara sesuai dengan kebutuhan dan tingkat kerentanannya.

4.14 Gender Bidang Perlindungan dari Kekerasan

A. Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak

Kekerasan terhadap perempuan dan anak merupakan salah satu isu strategis dalam pembangunan gender karena berdampak langsung terhadap pemenuhan hak asasi manusia, kualitas hidup, serta keberlangsungan pembangunan yang inklusif. Perempuan dan anak merupakan kelompok yang rentan mengalami berbagai bentuk kekerasan, baik yang terjadi di lingkungan rumah tangga, tempat kerja, satuan pendidikan, maupun ruang publik. Oleh karena itu, penyajian data kasus kekerasan yang terpilah dan terukur menjadi bagian penting dalam penyusunan Profil Gender sebagai dasar untuk mengidentifikasi kerentanan, merumuskan kebijakan yang responsif gender, serta memperkuat upaya pencegahan, perlindungan, dan penanganan korban secara komprehensif. Berikut disajikan data mengenai kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak di Kota Semarang Tahun 2025.

Tabel 34. Jumlah Korban dan Kasus Kekerasan Pada Perempuan dan Anak Tahun 2025

Jumlah Korban	Korban Laki-laki	Korban Perempuan	Jumlah Kasus
355	45	310	334

Sumber : <https://ppt-dp3a.semarangkota.go.id;2025>

Berdasarkan data Tahun 2025, tercatat 355 korban dari 334 kasus kekerasan. Dari jumlah korban tersebut, 310 korban (87,3%) merupakan perempuan, sedangkan 45 korban (12,7%) merupakan laki-laki. Dengan demikian, setiap satu korban laki-laki terdapat hampir tujuh korban perempuan. Data ini menunjukkan bahwa kekerasan masih berdampak secara tidak proporsional terhadap perempuan, sehingga isu kekerasan berbasis gender masih menjadi salah satu tantangan utama dalam upaya mewujudkan kesetaraan gender di Kota Semarang. Kondisi ini juga sejalan dengan berbagai kajian yang menunjukkan bahwa perempuan lebih rentan menjadi korban kekerasan, terutama kekerasan yang terjadi dalam relasi personal, rumah tangga, maupun kekerasan seksual.

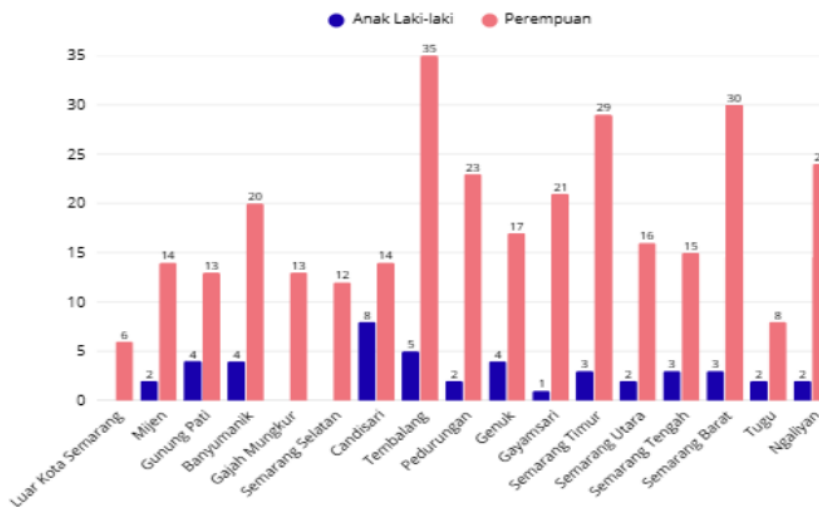
Jika dibandingkan dengan jumlah kasus, terdapat 334 kasus dengan 355 korban, yang berarti terdapat kasus yang melibatkan lebih dari satu korban. Hal ini mengindikasikan bahwa dalam satu peristiwa kekerasan dapat terjadi pada beberapa anggota keluarga atau lebih dari satu individu sekaligus. Dari perspektif gender, kondisi tersebut menunjukkan bahwa dampak kekerasan tidak hanya dirasakan oleh korban secara individu, tetapi juga dapat mempengaruhi anggota keluarga lain, termasuk perempuan dan anak yang sering berada dalam posisi paling rentan. Oleh karena itu, penanganan kasus kekerasan tidak cukup berfokus pada penyelesaian perkara, tetapi juga memerlukan layanan pemulihan psikologis, pendampingan hukum, rehabilitasi sosial, serta upaya pencegahan yang melibatkan keluarga dan masyarakat.

Meskipun jumlah korban laki-laki jauh lebih sedikit dibandingkan perempuan, keberadaan 45 korban laki-laki tetap memerlukan perhatian dalam penyelenggaraan layanan perlindungan. Pendekatan Pengarusutamaan Gender (PUG) menekankan bahwa seluruh korban berhak memperoleh perlindungan, pendampingan, dan akses terhadap

layanan tanpa diskriminasi. Namun demikian, tingginya proporsi korban perempuan menunjukkan bahwa perempuan masih menghadapi kerentanan yang lebih besar akibat berbagai faktor, seperti ketimpangan relasi kuasa, stereotip gender, ketergantungan ekonomi, serta norma sosial yang masih menempatkan perempuan pada posisi yang lebih lemah dalam relasi tertentu. Faktor-faktor tersebut menjadi salah satu penyebab mengapa perempuan lebih sering menjadi korban kekerasan berbasis gender.

Data ini memberikan gambaran bahwa upaya pencegahan kekerasan di Kota Semarang perlu terus diperkuat melalui edukasi mengenai kesetaraan gender, penguatan fungsi keluarga, peningkatan kapasitas masyarakat dalam mengenali dan melaporkan tindak kekerasan, serta penguatan koordinasi antarperangkat daerah dan lembaga layanan. Di sisi lain, peningkatan jumlah laporan juga dapat mencerminkan semakin baiknya akses masyarakat terhadap mekanisme pengaduan dan meningkatnya keberanian korban untuk melaporkan kasus yang dialami. Oleh karena itu, angka kasus perlu dipahami tidak hanya sebagai indikator masih terjadinya kekerasan, tetapi juga sebagai cerminan meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap pentingnya perlindungan korban dan penegakan hak-hak perempuan serta kelompok rentan.

Grafik 1. Jumlah Korban Kekerasan Menurut Jenis Kelamin Tahun 2025



Sumber : <https://ppt-dp3a.semarangkota.go.id;2025>

Data menunjukkan bahwa korban perempuan mendominasi jumlah korban kekerasan di seluruh kecamatan di Kota Semarang. Jumlah korban perempuan tercatat jauh lebih tinggi dibandingkan korban laki-laki, sehingga menggambarkan masih adanya ketimpangan gender dalam kejadian kekerasan. Kondisi ini menunjukkan bahwa perempuan masih menjadi kelompok yang paling rentan mengalami berbagai bentuk kekerasan, baik yang terjadi di lingkungan keluarga, masyarakat, maupun ruang publik.

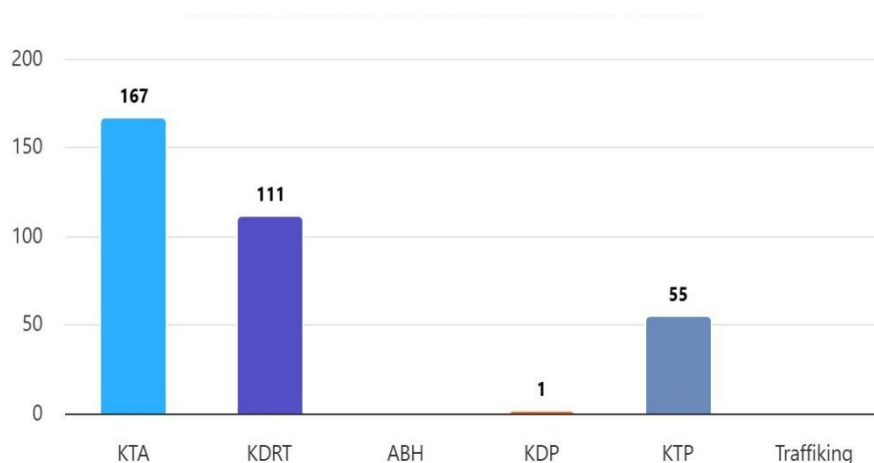
Berdasarkan persebaran wilayah, Kecamatan Tembalang mencatat jumlah korban perempuan tertinggi yaitu 35 korban, diikuti Semarang Barat (30 korban), Semarang Timur (29 korban), Ngaliyan (24 korban), dan Pedurungan (23 korban). Sementara itu, jumlah korban laki-laki relatif lebih sedikit, dengan angka tertinggi berada di Candisari (8 korban), disusul Tembalang (5 korban), serta Gunungpati, Banyumanik, dan Genuk masing-masing sebanyak 4 korban.

Dari perspektif gender, tingginya jumlah korban perempuan menunjukkan bahwa relasi gender yang belum sepenuhnya setara masih

berkontribusi terhadap tingginya kerentanan perempuan terhadap berbagai bentuk kekerasan, termasuk kekerasan dalam rumah tangga, kekerasan seksual, maupun bentuk kekerasan berbasis gender lainnya. Di sisi lain, jumlah korban laki-laki yang lebih rendah juga perlu dicermati secara hati-hati karena masih terdapat kemungkinan underreporting, yaitu kasus yang tidak dilaporkan akibat adanya stigma sosial yang menganggap laki-laki harus kuat dan enggan mengakui dirinya sebagai korban kekerasan.

Temuan ini menunjukkan bahwa upaya perlindungan perlu dilakukan secara responsif gender dengan memperkuat strategi pencegahan, edukasi, dan penanganan kasus, terutama di wilayah dengan jumlah korban yang tinggi seperti Tembalang, Semarang Barat, Semarang Timur, Pedurungan, dan Ngaliyan. Selain meningkatkan kualitas layanan bagi korban perempuan, pemerintah juga perlu memastikan bahwa korban laki-laki memperoleh akses yang setara terhadap mekanisme pelaporan, pendampingan psikologis, bantuan hukum, dan rehabilitasi tanpa terhambat oleh norma maupun stereotip gender.

Grafik 2. Jumlah Kasus Berdasarkan Jenis Kasus



Sumber : <https://ppt-dp3a.semarangkota.go.id;2025>

Data menunjukkan bahwa selama tahun 2025 tercatat 334 kasus kekerasan, yang terdiri atas 167 kasus Kekerasan Terhadap Anak (KTA),

111 kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT), 55 kasus Kekerasan Terhadap Perempuan (KTP), 1 kasus KDP, serta tidak terdapat kasus Anak Berhadapan dengan Hukum (ABH) maupun Tindak Pidana Perdagangan Orang (Trafficking) yang tercatat pada periode pelaporan. Komposisi tersebut menunjukkan bahwa kekerasan terhadap anak masih menjadi bentuk kekerasan yang paling banyak dilaporkan, diikuti oleh kekerasan dalam rumah tangga dan kekerasan terhadap perempuan.

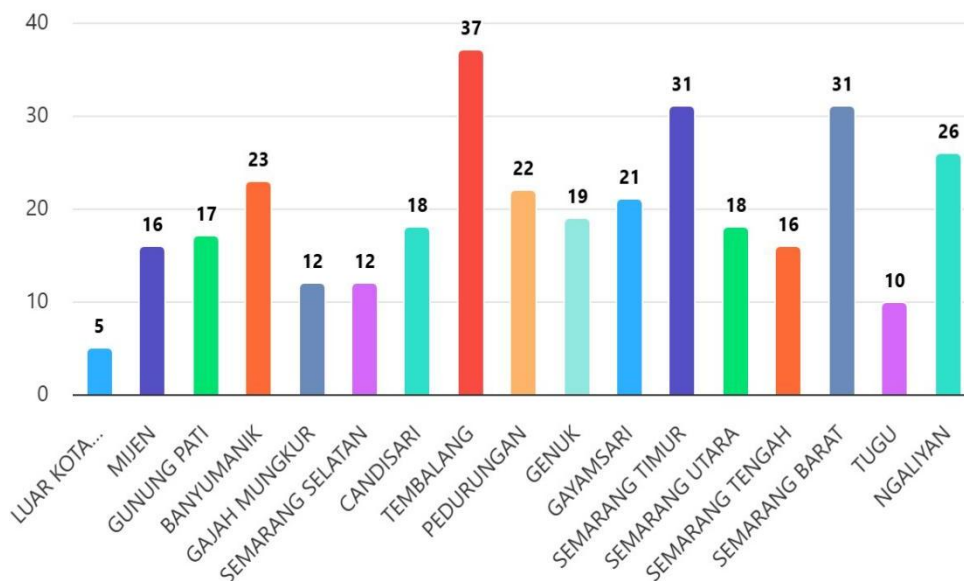
Dari perspektif gender, tingginya jumlah kasus KDRT dan KTP menunjukkan bahwa ketimpangan relasi gender masih menjadi salah satu faktor yang memengaruhi terjadinya kekerasan. Dalam banyak kasus, perempuan berada pada posisi yang lebih rentan akibat ketidaksetaraan dalam relasi kuasa, ketergantungan ekonomi, norma sosial yang masih menempatkan perempuan pada posisi subordinat, serta adanya budaya yang menganggap kekerasan dalam ranah domestik sebagai persoalan privat. Kondisi tersebut dapat menghambat perempuan untuk melaporkan kekerasan yang dialaminya sehingga angka yang tercatat berpotensi masih lebih rendah dibandingkan kondisi yang sebenarnya.

Tingginya jumlah kasus Kekerasan Terhadap Anak juga perlu dipahami dalam perspektif gender karena kerentanan anak tidak terlepas dari konstruksi sosial mengenai peran laki-laki dan perempuan dalam keluarga maupun masyarakat. Anak perempuan umumnya lebih berisiko mengalami kekerasan seksual dan kekerasan berbasis gender, sedangkan anak laki-laki lebih sering mengalami kekerasan fisik atau menghadapi hambatan dalam mengungkapkan pengalaman kekerasan akibat norma maskulinitas yang mengharuskan mereka tampak kuat. Oleh karena itu, upaya perlindungan anak perlu memperhatikan perbedaan bentuk kerentanan berdasarkan jenis kelamin agar intervensi yang dilakukan lebih tepat sasaran.

Tidak ditemukannya kasus trafficking dan ABH dalam data pelaporan merupakan kondisi yang perlu diapresiasi, namun belum dapat diartikan bahwa kedua bentuk permasalahan tersebut tidak terjadi sama sekali. Masih terdapat kemungkinan adanya kasus yang belum teridentifikasi atau belum dilaporkan karena keterbatasan akses terhadap layanan, rendahnya kesadaran masyarakat, maupun kekhawatiran korban terhadap stigma sosial. Oleh karena itu, penguatan sistem deteksi dini, peningkatan kapasitas petugas layanan, serta perluasan edukasi kepada masyarakat tetap diperlukan agar seluruh korban, baik perempuan maupun laki-laki, memperoleh akses yang setara terhadap mekanisme perlindungan dan penanganan.

Secara keseluruhan, pola kasus tersebut menunjukkan bahwa upaya pengarusutamaan gender dalam pencegahan dan penanganan kekerasan masih perlu diperkuat melalui peningkatan edukasi mengenai kesetaraan gender, penghapusan stereotip gender yang memicu kekerasan, penguatan ketahanan keluarga, serta penyediaan layanan perlindungan yang responsif terhadap kebutuhan spesifik perempuan, laki-laki, dan anak sesuai karakteristik kerentanan masing-masing.

Grafik 3. Jumlah Kasus Per Kecamatan



Sumber : <https://ppt-dp3a.semarangkota.go.id;2025>

Data menunjukkan bahwa kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak pada tahun 2025 tersebar di seluruh kecamatan di Kota Semarang dengan jumlah yang bervariasi. Kecamatan Tembalang mencatat jumlah kasus tertinggi, yaitu 37 kasus, diikuti Kecamatan Semarang Timur dan Semarang Barat yang masing-masing sebanyak 31 kasus, Ngaliyan 26 kasus, Banyumanik 23 kasus, serta Pedurungan 22 kasus. Sementara itu, jumlah kasus yang relatif lebih rendah terdapat di Kecamatan Tugu (10 kasus), Gajahmungkur dan Semarang Selatan (masing-masing 12 kasus), serta terdapat 5 kasus yang berasal dari luar Kota Semarang.

Dari perspektif gender, persebaran kasus di seluruh kecamatan menunjukkan bahwa kekerasan berbasis gender bukan merupakan permasalahan yang hanya terjadi pada wilayah tertentu, tetapi merupakan isu yang dapat terjadi di berbagai lingkungan sosial, baik kawasan perkotaan yang padat penduduk maupun wilayah dengan kepadatan penduduk yang lebih rendah. Tingginya jumlah kasus di beberapa

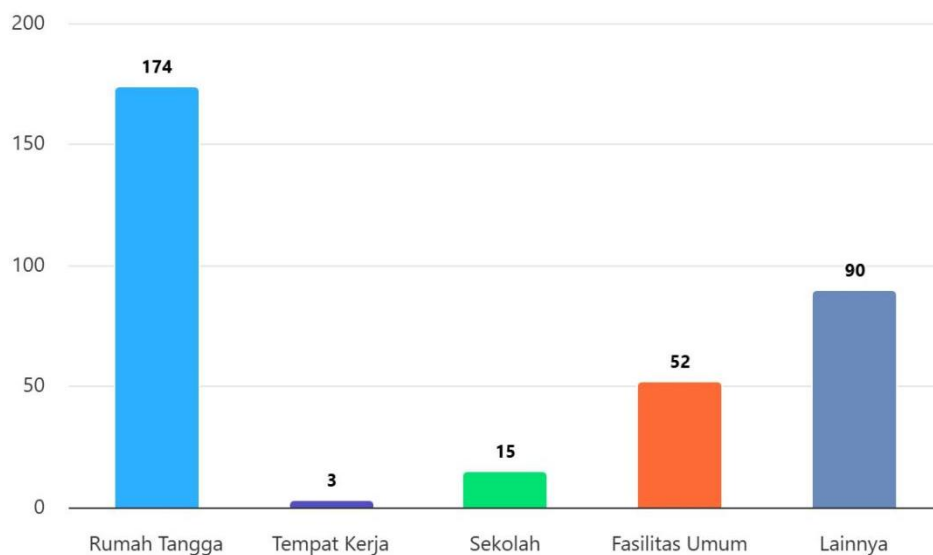
kecamatan dapat dipengaruhi oleh besarnya jumlah penduduk, tingginya mobilitas masyarakat, kompleksitas interaksi sosial, serta meningkatnya akses masyarakat terhadap layanan pengaduan dan pendampingan. Dengan demikian, banyaknya kasus yang tercatat tidak selalu mencerminkan tingginya tingkat kekerasan semata, tetapi juga dapat menunjukkan bahwa korban memiliki akses yang lebih baik untuk melaporkan kasus yang dialaminya.

Sebaliknya, kecamatan dengan jumlah kasus yang lebih rendah tidak dapat secara langsung diartikan sebagai wilayah yang lebih aman bagi perempuan dan kelompok rentan lainnya. Dalam isu kekerasan berbasis gender masih terdapat fenomena *underreporting*, yaitu kondisi ketika korban memilih tidak melaporkan kekerasan karena rasa takut, malu, ketergantungan ekonomi terhadap pelaku, tekanan keluarga, maupun kekhawatiran terhadap stigma sosial. Kondisi tersebut dapat menyebabkan jumlah kasus yang tercatat lebih rendah daripada kondisi yang sebenarnya terjadi di masyarakat.

Perbedaan jumlah kasus antarwilayah juga mengindikasikan bahwa akses terhadap informasi, layanan perlindungan, serta mekanisme pelaporan belum tentu dimanfaatkan secara merata oleh seluruh masyarakat. Oleh karena itu, penguatan sistem perlindungan yang responsif gender perlu dilakukan di seluruh kecamatan melalui peningkatan kapasitas aparat, perluasan layanan pengaduan yang mudah dijangkau, penguatan jejaring perlindungan berbasis masyarakat, serta edukasi mengenai kesetaraan gender dan pencegahan kekerasan. Pendekatan tersebut penting untuk memastikan bahwa perempuan maupun laki-laki yang menjadi korban memperoleh kesempatan yang setara dalam mengakses perlindungan, pendampingan, dan keadilan tanpa dipengaruhi oleh lokasi tempat tinggalnya.

Secara keseluruhan, data ini menunjukkan bahwa penanganan kekerasan berbasis gender memerlukan pendekatan yang tidak hanya berfokus pada wilayah dengan jumlah kasus tinggi, tetapi juga memperhatikan kecamatan dengan angka pelaporan yang rendah. Pengarusutamaan gender dalam perencanaan pembangunan daerah perlu diarahkan pada pemerataan akses layanan, penguatan sistem pelaporan yang aman dan ramah korban, serta peningkatan kesadaran masyarakat agar setiap korban memiliki keberanian dan kesempatan yang sama untuk memperoleh perlindungan dan pemulihan.

Grafik 4. Jumlah Kasus Berdasarkan Tempat Kejadian



Sumber : <https://ppt-dp3a.semarangkota.go.id;2025>

Data tahun 2025 menunjukkan bahwa sebagian besar kasus kekerasan terjadi di rumah tangga, yaitu sebanyak 174 kasus atau sekitar 52,1% dari seluruh kasus yang tercatat. Selanjutnya, 90 kasus terjadi pada kategori lainnya, 52 kasus terjadi di fasilitas umum, 15 kasus di sekolah, dan 3 kasus di tempat kerja. Sebaran tersebut menunjukkan bahwa kekerasan terhadap perempuan dan kelompok rentan dapat terjadi di berbagai ruang kehidupan, baik di ranah domestik maupun ruang publik.

Dari perspektif gender, dominasi kasus yang terjadi di lingkungan rumah tangga menunjukkan bahwa ruang domestik masih menjadi lokasi yang paling rentan terjadinya kekerasan, khususnya terhadap perempuan. Kondisi ini berkaitan dengan masih adanya ketimpangan relasi kuasa dalam keluarga, pembagian peran gender yang belum setara, serta ketergantungan ekonomi yang dapat membatasi kemampuan korban untuk menolak, melapor, atau keluar dari situasi kekerasan. Rumah yang seharusnya menjadi ruang yang aman justru menjadi tempat terjadinya berbagai bentuk kekerasan, seperti kekerasan fisik, psikis, seksual, maupun penelantaran. Temuan ini menunjukkan pentingnya penguatan upaya pencegahan kekerasan berbasis keluarga melalui pendidikan kesetaraan gender, penguatan komunikasi dalam keluarga, serta peningkatan akses korban terhadap layanan perlindungan.

Sebanyak 52 kasus yang terjadi di fasilitas umum menunjukkan bahwa perempuan dan kelompok rentan masih menghadapi risiko kekerasan di ruang publik. Bentuk kekerasan yang terjadi dapat berupa pelecehan seksual, kekerasan fisik, maupun bentuk kekerasan lainnya yang membatasi rasa aman dalam beraktivitas. Kondisi tersebut mengindikasikan perlunya penyediaan ruang publik yang aman, peningkatan sistem pengawasan, serta penguatan mekanisme pengaduan yang mudah diakses agar setiap warga, terutama perempuan, dapat menjalankan aktivitas sosial, pendidikan, dan ekonomi tanpa rasa takut.

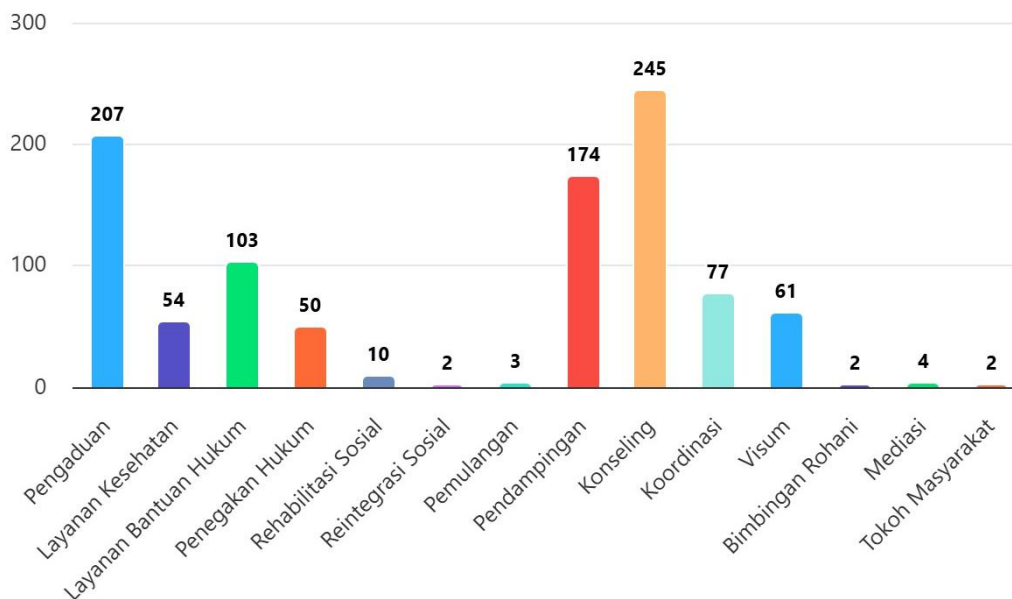
Kasus yang terjadi di lingkungan sekolah sebanyak 15 kasus menunjukkan bahwa satuan pendidikan masih menghadapi tantangan dalam mewujudkan lingkungan belajar yang aman dan bebas dari kekerasan. Dari perspektif gender, kekerasan di sekolah dapat dipengaruhi oleh masih adanya stereotip gender, perundungan, diskriminasi, maupun kekerasan seksual yang berdampak terhadap proses tumbuh kembang peserta didik. Oleh karena itu, penguatan kebijakan pencegahan

kekerasan di lingkungan pendidikan, pendidikan kesetaraan gender sejak usia dini, serta penguatan mekanisme pelaporan yang berpihak kepada korban perlu terus ditingkatkan.

Sementara itu, 3 kasus yang terjadi di tempat kerja menunjukkan bahwa kekerasan juga dapat terjadi dalam lingkungan kerja, meskipun jumlah yang tercatat relatif rendah. Namun demikian, angka tersebut tidak dapat diartikan bahwa tempat kerja telah sepenuhnya bebas dari kekerasan. Masih terdapat kemungkinan kasus yang tidak dilaporkan akibat kekhawatiran terhadap kehilangan pekerjaan, ketimpangan relasi antara atasan dan pekerja, maupun stigma yang diterima korban. Oleh karena itu, penerapan kebijakan pencegahan kekerasan dan pelecehan di tempat kerja, penyediaan mekanisme pengaduan yang aman, serta perlindungan terhadap korban perlu terus diperkuat.

Secara keseluruhan, data ini menunjukkan bahwa kekerasan berbasis gender masih terjadi pada berbagai ruang kehidupan, baik domestik maupun publik. Oleh karena itu, upaya pencegahan tidak hanya berfokus pada lingkungan keluarga, tetapi juga perlu diintegrasikan dalam kebijakan pembangunan daerah melalui penciptaan ruang publik yang aman, penguatan perlindungan di lingkungan pendidikan dan tempat kerja, serta peningkatan akses layanan yang responsif gender agar seluruh korban memperoleh perlindungan dan pemulihan secara adil dan setara.

Grafik 5. Jumlah Kasus Berdasarkan Layanan Yang Diberikan



Sumber : <https://ppt-dp3a.semarangkota.go.id;2025>

Data layanan penanganan kasus menunjukkan bahwa setiap korban kekerasan memerlukan bentuk layanan yang beragam sesuai dengan kondisi, kebutuhan, dan tingkat kerentanan yang dialami. Layanan yang paling banyak diberikan adalah konseling sebanyak 245 layanan, diikuti pengaduan sebanyak 207 layanan, pendampingan sebanyak 174 layanan, serta layanan bantuan hukum sebanyak 103 layanan. Tingginya jumlah layanan tersebut menunjukkan bahwa sebagian besar korban tidak hanya membutuhkan perlindungan hukum, tetapi juga memerlukan dukungan psikologis dan pendampingan secara berkelanjutan untuk membantu proses pemulihan serta memperoleh akses terhadap keadilan.

Dari perspektif gender, tingginya kebutuhan akan layanan konseling dan pendampingan mencerminkan bahwa dampak kekerasan terhadap perempuan dan anak tidak hanya bersifat fisik, tetapi juga menimbulkan trauma psikologis, tekanan sosial, dan gangguan terhadap keberlangsungan kehidupan korban. Kondisi ini sejalan dengan

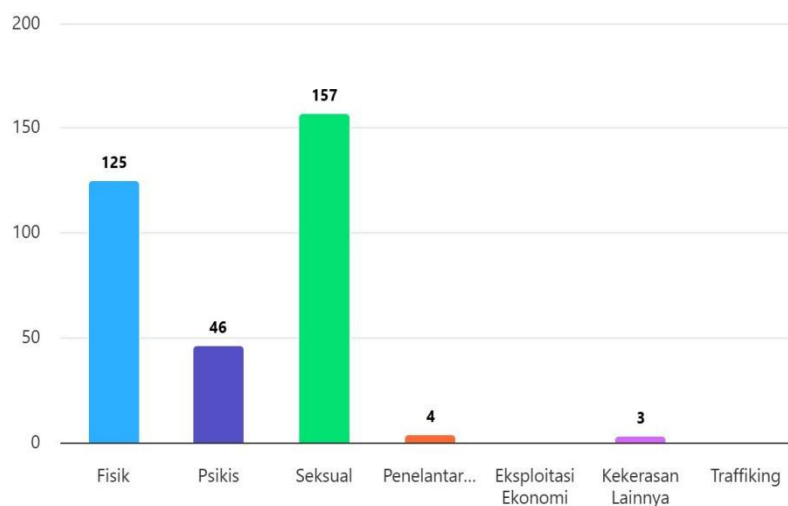
karakteristik kasus kekerasan berbasis gender, khususnya kekerasan seksual dan kekerasan dalam rumah tangga, yang umumnya memerlukan penanganan secara komprehensif melalui pendekatan psikologis, sosial, dan hukum secara terpadu. Oleh karena itu, layanan perlindungan tidak dapat berhenti pada proses pelaporan atau penegakan hukum semata, tetapi harus memastikan adanya pemulihan yang berkelanjutan bagi korban.

Sementara itu, layanan kesehatan tercatat sebanyak 54 layanan, penegakan hukum sebanyak 50 layanan, koordinasi sebanyak 77 layanan, dan visum sebanyak 61 layanan. Data ini menunjukkan bahwa penanganan kasus dilakukan melalui mekanisme lintas sektor yang melibatkan tenaga kesehatan, aparat penegak hukum, serta berbagai lembaga terkait. Kolaborasi tersebut menjadi bagian penting dalam mewujudkan sistem perlindungan yang responsif gender, karena korban sering kali memerlukan lebih dari satu jenis layanan secara bersamaan agar hak-haknya dapat terpenuhi secara optimal.

Sebaliknya, layanan seperti rehabilitasi sosial (10 layanan), pemulangan (3 layanan), reintegrasi sosial (2 layanan), bimbingan rohani (2 layanan), mediasi (4 layanan), dan pelibatan tokoh masyarakat (2 layanan) masih relatif sedikit. Rendahnya jumlah layanan tersebut tidak serta-merta menunjukkan bahwa layanan tersebut kurang penting, melainkan dapat mengindikasikan bahwa layanan tersebut bersifat khusus dan hanya diberikan sesuai dengan kebutuhan atau karakteristik kasus tertentu. Namun demikian, penguatan kapasitas layanan rehabilitasi dan reintegrasi sosial tetap perlu menjadi perhatian agar korban, terutama perempuan dan anak, dapat kembali menjalankan fungsi sosialnya secara aman, bermartabat, dan bebas dari stigma maupun risiko kekerasan berulang.

Secara keseluruhan, pola layanan yang diberikan menunjukkan bahwa sistem perlindungan di Kota Semarang telah mengedepankan pendekatan yang berpusat pada korban (victim-centered approach) dengan mengintegrasikan aspek pengaduan, pendampingan, pemulihan psikologis, pelayanan kesehatan, dan bantuan hukum. Dari perspektif gender, pendekatan ini menjadi sangat penting mengingat perempuan dan anak merupakan kelompok yang paling banyak menjadi korban kekerasan. Oleh karena itu, penguatan koordinasi antarinstansi, peningkatan akses layanan yang mudah dijangkau, serta penyediaan layanan yang sensitif terhadap kebutuhan spesifik perempuan, anak perempuan, dan anak laki-laki perlu terus ditingkatkan agar setiap korban memperoleh perlindungan, pemulihan, dan keadilan secara optimal.

Grafik 6. Jumlah Kasus Berdasarkan Tindak Kekerasan Yang Dialami Korban



Sumber : <https://ppt-dp3a.semarangkota.go.id;2025>

Data tahun 2025 menunjukkan bahwa bentuk kekerasan yang paling banyak dialami korban adalah kekerasan seksual, yaitu sebanyak

157 kasus (46,9%), diikuti kekerasan fisik sebanyak 125 kasus (37,3%), kekerasan psikis sebanyak 46 kasus (13,7%), penelantaran sebanyak 4 kasus, kekerasan lainnya sebanyak 3 kasus, serta tidak terdapat kasus eksploitasi ekonomi maupun trafficking yang tercatat pada periode pelaporan. Data ini menunjukkan bahwa kekerasan terhadap perempuan dan kelompok rentan masih didominasi oleh bentuk kekerasan yang memberikan dampak serius terhadap kondisi fisik, psikologis, maupun kehidupan sosial korban.

Dari perspektif gender, tingginya kasus kekerasan seksual mengindikasikan bahwa ketimpangan relasi kuasa antara pelaku dan korban masih menjadi tantangan dalam mewujudkan kesetaraan gender. Kekerasan seksual umumnya tidak hanya dipengaruhi oleh tindakan individu, tetapi juga oleh norma sosial yang masih mentoleransi perilaku diskriminatif, stereotip gender, serta posisi perempuan yang sering kali berada dalam hubungan yang tidak setara. Dampak kekerasan seksual tidak hanya berupa gangguan kesehatan fisik, tetapi juga trauma psikologis, hilangnya rasa aman, terganggunya pendidikan maupun pekerjaan, serta menurunnya kualitas hidup korban dalam jangka panjang. Oleh karena itu, pencegahan kekerasan seksual memerlukan pendekatan yang komprehensif melalui edukasi mengenai kesetaraan gender, penguatan perlindungan hukum, serta penyediaan layanan pemulihan yang berpihak kepada korban.

Jumlah kasus kekerasan fisik yang juga relatif tinggi menunjukkan bahwa penyelesaian konflik melalui penggunaan kekerasan masih terjadi dalam kehidupan keluarga maupun lingkungan sosial. Dalam perspektif gender, kekerasan fisik sering kali dipengaruhi oleh relasi yang tidak setara, dominasi salah satu pihak, serta pola pengasuhan dan budaya yang masih mentoleransi penggunaan kekerasan sebagai bentuk kontrol atau pendisiplinan. Kondisi ini menunjukkan pentingnya membangun budaya

yang menghormati hak asasi manusia, mengedepankan penyelesaian konflik tanpa kekerasan, serta memperkuat ketahanan keluarga melalui pendidikan yang responsif gender.

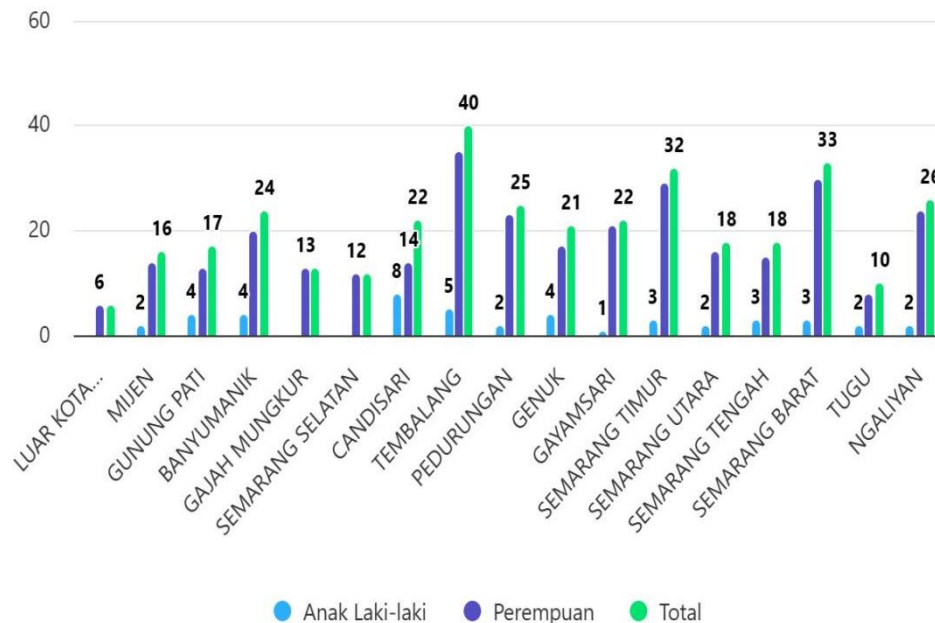
Sementara itu, 46 kasus kekerasan psikis menunjukkan bahwa kekerasan tidak selalu meninggalkan luka yang terlihat secara fisik, tetapi juga dapat menimbulkan dampak emosional dan psikologis yang berkepanjangan. Bentuk kekerasan ini meliputi ancaman, penghinaan, intimidasi, pengendalian, maupun perlakuan yang merendahkan martabat korban. Dari perspektif gender, kekerasan psikis sering kali sulit dikenali dan kurang dilaporkan karena masih dianggap sebagai persoalan pribadi atau bagian dari dinamika hubungan dalam keluarga. Padahal, dampaknya dapat memengaruhi kesehatan mental, rasa percaya diri, produktivitas, serta kemampuan korban dalam menjalankan fungsi sosial dan ekonomi.

Rendahnya jumlah kasus penelantaran, kekerasan lainnya, serta tidak ditemukannya kasus eksploitasi ekonomi dan trafficking dalam data pelaporan perlu disikapi secara hati-hati. Angka tersebut belum tentu menunjukkan bahwa bentuk-bentuk kekerasan tersebut tidak terjadi, tetapi dapat dipengaruhi oleh masih terbatasnya identifikasi kasus, rendahnya kesadaran korban untuk melapor, maupun adanya hambatan sosial dan budaya yang menyebabkan kasus tidak terungkap. Oleh karena itu, penguatan sistem deteksi dini, peningkatan kapasitas petugas layanan, serta perluasan akses masyarakat terhadap mekanisme pelaporan menjadi bagian penting dalam mewujudkan sistem perlindungan yang responsif gender.

Secara keseluruhan, pola tindak kekerasan yang dialami korban menunjukkan bahwa isu kekerasan berbasis gender masih menjadi tantangan dalam pembangunan yang berkeadilan. Pengarusutamaan gender perlu terus diperkuat melalui upaya pencegahan yang menasar perubahan norma sosial, peningkatan kesadaran mengenai kesetaraan

hak antara perempuan dan laki-laki, penguatan perlindungan hukum, serta penyediaan layanan yang mampu memenuhi kebutuhan spesifik setiap korban tanpa diskriminasi.

Grafik 7. Jumlah Korban Berdasarkan Jenis Kelamin Per Kecamatan



Sumber : <https://ppt-dp3a.semarangkota.go.id;2025>

Data tahun 2025 menunjukkan bahwa terdapat 355 korban kekerasan yang tersebar di seluruh kecamatan, terdiri atas 320 korban perempuan (90,14%) dan 35 korban anak laki-laki (9,86%). Hampir seluruh kecamatan memperlihatkan dominasi korban perempuan, dengan jumlah tertinggi berada di Kecamatan Tembalang sebanyak 35 korban, diikuti Semarang Barat 30 korban, Semarang Timur 29 korban, Ngaliyan 24 korban, Pedurungan 23 korban, dan Gayamsari 21 korban. Sementara itu, korban anak laki-laki berjumlah jauh lebih sedikit, dengan jumlah tertinggi berada di Kecamatan Candisari sebanyak 8 korban, disusul Tembalang

sebanyak 5 korban, serta Gunungpati, Banyumanik, dan Genuk yang masing-masing mencatat 4 korban.

Dari perspektif gender, dominasi korban perempuan menunjukkan bahwa perempuan masih menjadi kelompok yang paling rentan mengalami berbagai bentuk kekerasan. Kondisi ini mencerminkan masih adanya ketimpangan relasi gender yang menempatkan perempuan pada posisi yang lebih rentan terhadap kekerasan, baik di lingkungan keluarga maupun di ruang publik. Faktor-faktor seperti ketimpangan relasi kuasa, ketergantungan ekonomi, stereotip gender, serta norma sosial yang masih mentoleransi diskriminasi terhadap perempuan dapat meningkatkan risiko terjadinya kekerasan sekaligus menghambat korban dalam memperoleh perlindungan dan keadilan.

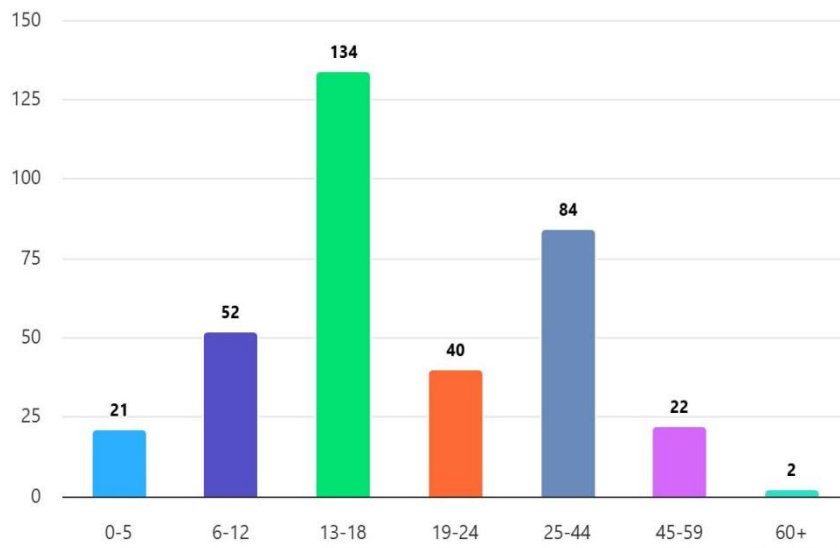
Perbedaan jumlah korban antar kecamatan tidak semata-mata menggambarkan tingkat kerawanan suatu wilayah, tetapi juga dapat dipengaruhi oleh tingkat akses masyarakat terhadap layanan pengaduan, keberadaan lembaga pendampingan, serta tingkat kesadaran masyarakat untuk melaporkan kasus kekerasan. Kecamatan dengan jumlah korban yang tinggi dapat menunjukkan bahwa mekanisme pelaporan telah lebih mudah diakses dan dimanfaatkan oleh masyarakat. Sebaliknya, kecamatan dengan jumlah korban yang lebih rendah belum tentu memiliki tingkat kekerasan yang lebih kecil, karena masih terdapat kemungkinan underreporting, yaitu kasus yang tidak dilaporkan akibat rasa takut, stigma sosial, tekanan dari pelaku, atau keterbatasan akses terhadap layanan perlindungan.

Meskipun jumlah korban anak laki-laki relatif lebih sedikit dibandingkan perempuan, keberadaan kasus tersebut tetap memerlukan perhatian dalam perspektif gender. Anak laki-laki sering menghadapi hambatan untuk mengungkapkan pengalaman kekerasan karena masih kuatnya konstruksi sosial yang mengaitkan laki-laki dengan sifat kuat,

berani, dan tidak boleh menunjukkan kerentanan. Norma tersebut dapat menyebabkan korban memilih untuk menyembunyikan pengalaman kekerasan sehingga jumlah kasus yang tercatat belum tentu mencerminkan kondisi yang sebenarnya.

Secara keseluruhan, data ini menunjukkan bahwa perempuan masih menjadi kelompok yang paling terdampak oleh kekerasan di Kota Semarang. Oleh karena itu, kebijakan pengarusutamaan gender perlu terus diperkuat melalui peningkatan kualitas layanan perlindungan yang mudah diakses di seluruh kecamatan, penguatan jejaring perlindungan berbasis masyarakat, peningkatan literasi mengenai kesetaraan gender, serta penghapusan norma dan stereotip yang menjadi akar terjadinya kekerasan. Di sisi lain, sistem perlindungan juga perlu memastikan bahwa korban laki-laki memperoleh kesempatan yang sama untuk melaporkan kasus dan mendapatkan layanan pemulihan tanpa menghadapi stigma maupun diskriminasi.

Grafik 8. Jumlah Korban Berdasarkan Kelompok Usia



Sumber : <https://ppt-dp3a.semarangkota.go.id;2025>

Data tahun 2025 menunjukkan bahwa terdapat 355 korban kekerasan yang tersebar pada berbagai kelompok usia. Kelompok usia 13–18 tahun merupakan kelompok dengan jumlah korban tertinggi, yaitu 134 korban (37,75%), diikuti kelompok usia 25–44 tahun sebanyak 84 korban (23,66%), kelompok usia 6–12 tahun sebanyak 52 korban (14,65%), kelompok usia 19–24 tahun sebanyak 40 korban (11,27%), kelompok usia 45–59 tahun sebanyak 22 korban (6,20%), kelompok usia 0–5 tahun sebanyak 21 korban (5,92%), dan kelompok usia 60 tahun ke atas sebanyak 2 korban (0,56%). Data tersebut menunjukkan bahwa lebih dari separuh korban berada pada kelompok usia anak dan remaja, sehingga kelompok ini menjadi prioritas dalam upaya perlindungan dari berbagai bentuk kekerasan.

Dari perspektif gender, tingginya jumlah korban pada kelompok usia 13–18 tahun menunjukkan bahwa masa remaja merupakan periode yang memiliki tingkat kerentanan tinggi terhadap kekerasan berbasis gender. Pada fase ini, remaja mulai membangun relasi sosial yang lebih luas, menggunakan media digital secara aktif, serta mulai mengenal hubungan pertemanan maupun relasi dengan lawan jenis. Kondisi tersebut meningkatkan risiko terjadinya kekerasan seksual, kekerasan dalam hubungan pacaran, perundungan, kekerasan berbasis teknologi informasi, maupun bentuk kekerasan lainnya. Kerentanan tersebut juga dipengaruhi oleh masih adanya stereotip gender, ketimpangan relasi kuasa, serta rendahnya pemahaman mengenai hak, batasan, dan perlindungan diri.

Kelompok usia 25–44 tahun yang menempati urutan kedua didominasi oleh usia produktif, yaitu kelompok yang umumnya telah memasuki dunia kerja maupun kehidupan berkeluarga. Dalam perspektif gender, tingginya jumlah korban pada kelompok usia ini menunjukkan bahwa perempuan usia produktif masih menghadapi berbagai bentuk kekerasan, terutama kekerasan dalam rumah tangga, kekerasan seksual,

maupun kekerasan yang berkaitan dengan ketimpangan relasi dalam keluarga dan lingkungan kerja. Beban ganda yang masih banyak dialami perempuan, ketergantungan ekonomi, serta pembagian peran yang belum setara dapat menjadi faktor yang meningkatkan kerentanan terhadap kekerasan.

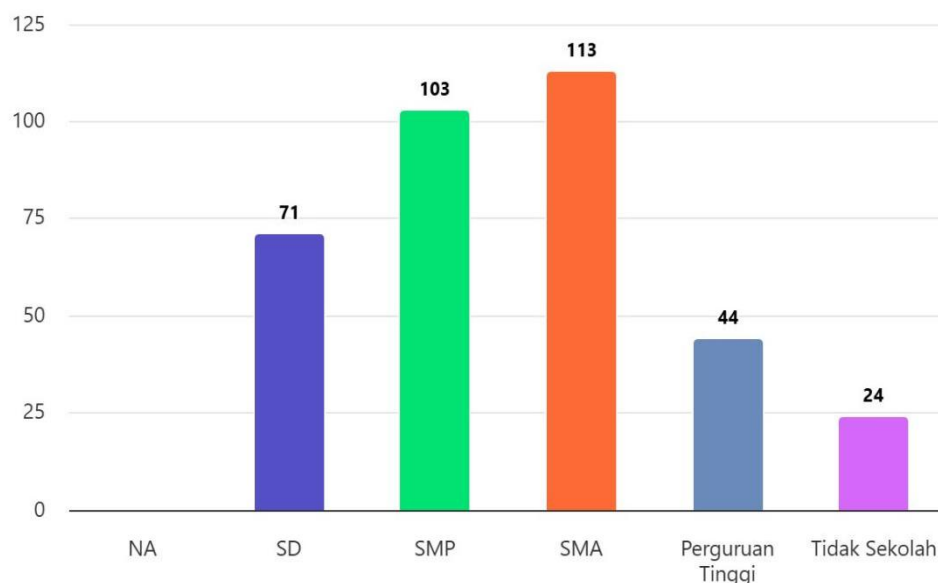
Sementara itu, jumlah korban pada kelompok usia 6–12 tahun dan 0–5 tahun menunjukkan bahwa anak masih memerlukan perlindungan khusus dari berbagai bentuk kekerasan. Dari perspektif gender, anak perempuan maupun anak laki-laki memiliki bentuk kerentanan yang berbeda. Anak perempuan lebih berisiko mengalami kekerasan seksual dan eksploitasi, sedangkan anak laki-laki lebih sering mengalami kekerasan fisik atau enggan melaporkan kekerasan yang dialaminya karena pengaruh norma maskulinitas. Oleh karena itu, sistem perlindungan anak perlu memperhatikan kebutuhan spesifik berdasarkan jenis kelamin agar upaya pencegahan dan penanganan menjadi lebih efektif.

Kelompok usia 19–24 tahun, 45–59 tahun, dan 60 tahun ke atas tetap memerlukan perhatian meskipun jumlah korban relatif lebih sedikit. Rendahnya jumlah korban pada kelompok usia tersebut belum tentu menunjukkan tingkat risiko yang rendah, tetapi dapat dipengaruhi oleh fenomena underreporting, yaitu korban yang memilih tidak melaporkan kekerasan akibat rasa malu, ketergantungan terhadap pelaku, kekhawatiran terhadap stigma sosial, maupun keterbatasan akses terhadap layanan perlindungan. Kondisi ini terutama dapat terjadi pada perempuan dewasa dan lanjut usia yang sering kali menghadapi hambatan dalam mengakses bantuan.

Secara keseluruhan, distribusi korban berdasarkan kelompok usia menunjukkan bahwa kekerasan berbasis gender terjadi pada seluruh tahapan kehidupan, namun memiliki karakteristik kerentanan yang berbeda pada setiap kelompok umur. Oleh karena itu, kebijakan

pengarusutamaan gender perlu disertai pendekatan yang responsif terhadap siklus kehidupan (*life cycle approach*), melalui penguatan edukasi kesetaraan gender sejak usia dini, pencegahan kekerasan pada remaja, perlindungan perempuan usia produktif, serta penyediaan layanan yang mudah diakses oleh seluruh kelompok usia tanpa diskriminasi.

Grafik 9. Jumlah Korban Berdasarkan Pendidikan



Sumber : <https://ppt-dp3a.semarangkota.go.id;2025>

Data tahun 2025 menunjukkan bahwa dari 355 korban kekerasan, kelompok dengan tingkat pendidikan SMA merupakan korban terbanyak, yaitu 113 korban (31,83%), diikuti SMP sebanyak 103 korban (29,01%), SD sebanyak 71 korban (20,00%), Perguruan Tinggi sebanyak 44 korban (12,39%), dan tidak sekolah sebanyak 24 korban (6,76%). Tidak terdapat korban dengan kategori pendidikan yang tidak diketahui (NA). Distribusi tersebut menunjukkan bahwa sebagian besar korban berasal dari kelompok usia sekolah, khususnya pada jenjang pendidikan menengah.

Dari perspektif gender, tingginya jumlah korban pada jenjang SMA dan SMP menunjukkan bahwa remaja merupakan kelompok yang memiliki kerentanan tinggi terhadap berbagai bentuk kekerasan berbasis gender. Pada fase ini, intensitas interaksi sosial, penggunaan media digital, serta mulai berkembangnya relasi pertemanan dan hubungan personal dapat meningkatkan risiko terjadinya kekerasan seksual, kekerasan dalam hubungan pacaran, perundungan, maupun kekerasan berbasis teknologi informasi. Kerentanan tersebut semakin meningkat apabila masih terdapat stereotip gender, ketimpangan relasi kuasa, serta rendahnya pemahaman mengenai hak, persetujuan (*consent*), dan perlindungan diri.

Sebanyak 71 korban yang masih berada pada jenjang SD menunjukkan bahwa anak usia sekolah dasar juga menghadapi risiko kekerasan yang cukup tinggi. Dalam perspektif gender, perlindungan terhadap anak perlu memperhatikan perbedaan bentuk kerentanan antara anak perempuan dan anak laki-laki. Anak perempuan cenderung lebih rentan terhadap kekerasan seksual dan eksploitasi, sedangkan anak laki-laki lebih sering mengalami kekerasan fisik maupun menghadapi hambatan dalam mengungkapkan pengalaman kekerasan akibat norma sosial yang mengaitkan laki-laki dengan sikap kuat dan tidak boleh menunjukkan kerentanan. Oleh karena itu, lingkungan keluarga, sekolah, dan masyarakat memiliki peran penting dalam menciptakan ruang yang aman bagi seluruh anak tanpa membedakan jenis kelamin.

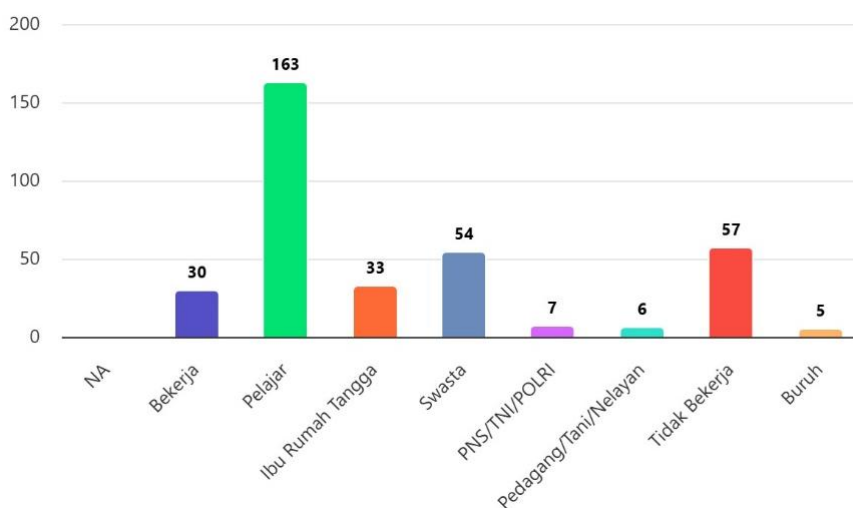
Kelompok Perguruan Tinggi yang mencatat 44 korban menunjukkan bahwa kekerasan juga masih dialami oleh kelompok dewasa muda yang sedang menempuh pendidikan tinggi. Meskipun memiliki akses informasi yang lebih baik, mahasiswa tetap berpotensi mengalami kekerasan seksual, pelecehan, kekerasan dalam relasi personal, maupun kekerasan berbasis digital. Kondisi ini menunjukkan bahwa peningkatan tingkat pendidikan belum sepenuhnya menghilangkan risiko kekerasan berbasis

gender sehingga diperlukan penguatan sistem pencegahan dan mekanisme penanganan yang efektif di lingkungan perguruan tinggi.

Sementara itu, terdapat 24 korban pada kelompok tidak sekolah. Dari perspektif gender, kondisi ini menunjukkan bahwa individu yang tidak mengenyam pendidikan formal berpotensi menghadapi kerentanan yang lebih besar karena memiliki keterbatasan dalam mengakses informasi mengenai hak-haknya, layanan perlindungan, maupun mekanisme pelaporan ketika mengalami kekerasan. Selain itu, rendahnya tingkat pendidikan juga dapat berkaitan dengan keterbatasan kesempatan memperoleh pekerjaan yang layak, sehingga meningkatkan ketergantungan ekonomi yang pada akhirnya dapat memperbesar risiko terjadinya kekerasan, terutama terhadap perempuan.

Secara keseluruhan, data ini menunjukkan bahwa tingkat pendidikan belum sepenuhnya menjadi faktor yang melindungi seseorang dari risiko kekerasan berbasis gender. Oleh karena itu, pengarusutamaan gender perlu diintegrasikan dalam lingkungan pendidikan pada seluruh jenjang melalui penguatan pendidikan karakter, pendidikan kesetaraan gender, pencegahan kekerasan seksual, peningkatan literasi digital, serta penyediaan mekanisme pelaporan yang aman, mudah diakses, dan berpihak kepada korban. Di sisi lain, kelompok yang tidak mengakses pendidikan formal juga perlu memperoleh perhatian melalui edukasi berbasis masyarakat agar setiap warga memiliki kesempatan yang setara untuk memperoleh perlindungan dari berbagai bentuk kekerasan.

Grafik 10. Jumlah Korban Berdasarkan Pekerjaan



Sumber : <https://ppt-dp3a.semarangkota.go.id;2025>

Data tahun 2025 menunjukkan bahwa dari 355 korban kekerasan, kelompok pelajar merupakan korban terbanyak, yaitu 163 korban (45,92%), diikuti kelompok tidak bekerja sebanyak 57 korban (16,06%), pekerja swasta sebanyak 54 korban (15,21%), ibu rumah tangga sebanyak 33 korban (9,30%), bekerja sebanyak 30 korban (8,45%), PNS/TNI/POLRI sebanyak 7 korban (1,97%), pedagang/tani/ nelayan sebanyak 6 korban (1,69%), dan buruh sebanyak 5 korban (1,41%). Data tersebut menunjukkan bahwa korban berasal dari berbagai latar belakang pekerjaan, sehingga kekerasan tidak hanya terjadi pada kelompok tertentu, tetapi dapat dialami oleh seluruh lapisan masyarakat.

Dari perspektif gender, tingginya jumlah korban pada kelompok pelajar menunjukkan bahwa anak dan remaja masih menjadi kelompok yang paling rentan mengalami berbagai bentuk kekerasan. Selain karena masih berada pada masa perkembangan fisik dan psikologis, kelompok ini juga memiliki posisi tawar yang relatif rendah dalam relasi sosial sehingga

lebih rentan menjadi korban kekerasan seksual, perundungan, kekerasan fisik, maupun kekerasan berbasis teknologi informasi. Kondisi tersebut menunjukkan pentingnya penguatan pendidikan mengenai kesetaraan gender, perlindungan anak, literasi digital, serta pembentukan lingkungan pendidikan yang aman dan bebas dari kekerasan.

Kelompok tidak bekerja yang menempati urutan kedua menunjukkan adanya keterkaitan antara kondisi sosial ekonomi dan kerentanan terhadap kekerasan. Dalam perspektif gender, individu yang tidak memiliki penghasilan tetap sering kali berada dalam posisi yang lebih bergantung kepada anggota keluarga atau pihak lain. Ketergantungan tersebut dapat mengurangi kemampuan korban untuk mengambil keputusan secara mandiri, termasuk dalam upaya melaporkan atau keluar dari situasi kekerasan. Kondisi ini terutama menjadi perhatian bagi perempuan yang belum memiliki kemandirian ekonomi, karena ketergantungan finansial dapat memperkuat relasi kuasa yang tidak seimbang.

Sebanyak 54 korban berasal dari kelompok pekerja swasta dan 30 korban dari kategori bekerja, yang menunjukkan bahwa individu yang telah memasuki dunia kerja juga masih menghadapi risiko kekerasan. Bentuk kekerasan yang dialami dapat terjadi baik di lingkungan kerja maupun di luar tempat kerja, termasuk kekerasan seksual, pelecehan, diskriminasi, maupun kekerasan dalam rumah tangga yang berdampak terhadap produktivitas kerja. Hal ini menunjukkan bahwa penciptaan lingkungan kerja yang aman, bebas dari diskriminasi dan kekerasan berbasis gender, perlu terus diperkuat melalui kebijakan perlindungan pekerja dan mekanisme pengaduan yang efektif.

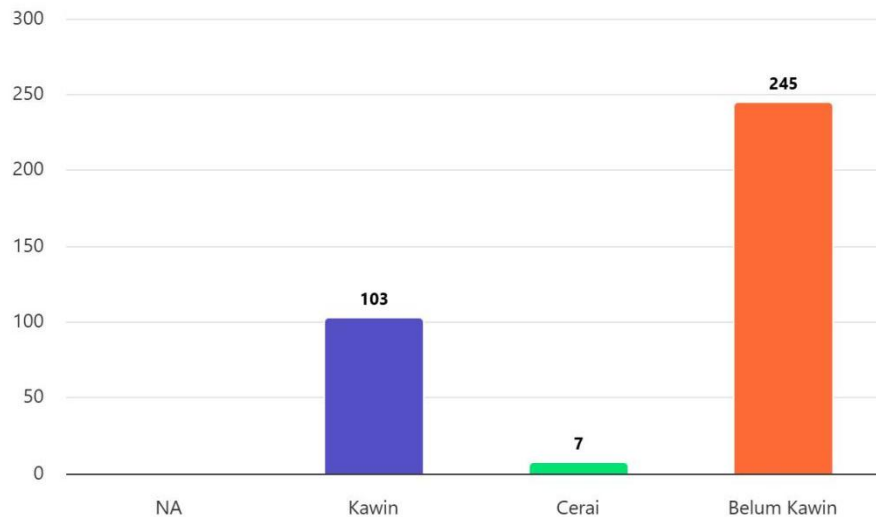
Data juga menunjukkan terdapat 33 korban yang berstatus ibu rumah tangga. Dari perspektif gender, kondisi ini menggambarkan bahwa perempuan yang menjalankan peran domestik masih menghadapi

kerentanan terhadap berbagai bentuk kekerasan, terutama kekerasan dalam rumah tangga, kekerasan psikis, maupun kekerasan ekonomi. Pembagian peran gender yang belum setara, ketergantungan ekonomi terhadap pasangan, serta masih kuatnya norma yang menempatkan urusan rumah tangga sebagai ranah privat dapat menyebabkan korban enggan melaporkan kekerasan yang dialaminya. Oleh karena itu, pemberdayaan ekonomi perempuan, penguatan kapasitas keluarga, serta peningkatan akses terhadap layanan perlindungan menjadi bagian penting dalam upaya pencegahan kekerasan berbasis gender.

Sementara itu, jumlah korban pada kelompok PNS/TNI/POLRI, pedagang/tani/nelayan, dan buruh relatif lebih sedikit. Namun demikian, rendahnya jumlah korban yang tercatat tidak serta-merta menunjukkan bahwa kelompok tersebut memiliki risiko yang lebih rendah. Masih terdapat kemungkinan terjadinya underreporting, yaitu kasus yang tidak dilaporkan karena adanya kekhawatiran terhadap stigma, posisi pekerjaan, relasi dengan pelaku, maupun konsekuensi sosial dan ekonomi yang mungkin dihadapi korban apabila mengungkapkan kekerasan yang dialaminya.

Secara keseluruhan, data ini menunjukkan bahwa kerentanan terhadap kekerasan dipengaruhi tidak hanya oleh jenis pekerjaan, tetapi juga oleh posisi sosial, akses terhadap sumber daya ekonomi, dan relasi gender yang berkembang dalam masyarakat. Oleh karena itu, pengarusutamaan gender perlu terus diintegrasikan dalam kebijakan ketenagakerjaan, pendidikan, pemberdayaan ekonomi, dan perlindungan sosial agar setiap individu, baik perempuan maupun laki-laki, memperoleh kesempatan yang setara untuk hidup, bekerja, belajar, dan beraktivitas dalam lingkungan yang aman serta bebas dari segala bentuk kekerasan.

Grafik 11. Jumlah Korban Berdasarkan Status Perkawinan



Sumber : <https://ppt-dp3a.semarangkota.go.id;2025>

Data tahun 2025 menunjukkan bahwa dari 355 korban kekerasan, sebagian besar berstatus belum kawin, yaitu sebanyak 245 korban (69,01%). Selanjutnya, korban dengan status kawin tercatat sebanyak 103 korban (29,01%), sedangkan korban dengan status cerai sebanyak 7 korban (1,97%). Tidak terdapat korban dengan status perkawinan yang tidak diketahui (NA). Komposisi tersebut menunjukkan bahwa mayoritas korban berasal dari kelompok yang belum menikah, yang umumnya didominasi oleh anak, remaja, dan dewasa muda.

Dari perspektif gender, tingginya jumlah korban yang berstatus belum kawin menunjukkan bahwa kelompok anak, remaja, dan dewasa muda masih memiliki tingkat kerentanan yang tinggi terhadap berbagai bentuk kekerasan, terutama kekerasan seksual, kekerasan dalam relasi pertemanan maupun pacaran, perundungan, serta kekerasan berbasis teknologi informasi. Pada kelompok ini, proses pembentukan identitas,

tingginya intensitas interaksi sosial, serta belum optimalnya pemahaman mengenai kesetaraan gender, hak atas tubuh, dan relasi yang sehat dapat meningkatkan risiko menjadi korban kekerasan. Oleh karena itu, pendidikan mengenai kesetaraan gender, kesehatan reproduksi, literasi digital, dan pencegahan kekerasan perlu diperkuat sejak usia dini sebagai bagian dari strategi perlindungan.

Sebanyak 103 korban yang berstatus kawin menunjukkan bahwa kekerasan juga masih banyak dialami dalam kehidupan rumah tangga. Dalam perspektif gender, kondisi ini mencerminkan bahwa relasi suami-istri yang belum setara, pembagian peran yang tidak seimbang, ketergantungan ekonomi, serta masih adanya norma yang mentoleransi dominasi salah satu pihak dapat meningkatkan kerentanan, khususnya bagi perempuan. Kekerasan dalam rumah tangga tidak hanya berdampak pada korban secara fisik dan psikologis, tetapi juga memengaruhi kualitas pengasuhan anak, keharmonisan keluarga, produktivitas ekonomi, serta kesejahteraan masyarakat secara lebih luas. Oleh karena itu, penguatan ketahanan keluarga perlu dibarengi dengan upaya membangun relasi yang setara, saling menghormati, dan bebas dari kekerasan.

Korban dengan status cerai yang berjumlah 7 orang memang relatif sedikit, namun tetap memerlukan perhatian. Dari perspektif gender, perempuan yang telah bercerai dapat menghadapi kerentanan yang berbeda, seperti tekanan ekonomi, stigma sosial, maupun risiko kekerasan yang berlanjut dari mantan pasangan atau lingkungan sekitar. Di sisi lain, rendahnya jumlah kasus yang tercatat juga belum tentu menggambarkan kondisi yang sebenarnya karena masih terdapat kemungkinan underreporting, yaitu korban yang memilih tidak melaporkan kekerasan akibat rasa takut, kekhawatiran terhadap stigma, atau keterbatasan akses terhadap layanan perlindungan.

Secara keseluruhan, data ini menunjukkan bahwa kekerasan dapat dialami oleh individu pada berbagai status perkawinan, namun bentuk kerentanan yang dihadapi berbeda pada setiap kelompok. Oleh karena itu, pengarusutamaan gender perlu diarahkan pada penguatan upaya pencegahan sesuai siklus kehidupan, mulai dari edukasi bagi anak dan remaja mengenai relasi yang sehat dan setara, penguatan ketahanan keluarga bagi pasangan yang telah menikah, hingga penyediaan layanan perlindungan dan pemberdayaan bagi korban yang telah bercerai. Pendekatan tersebut penting untuk memastikan bahwa setiap individu memperoleh hak yang sama atas rasa aman, perlindungan, dan akses terhadap layanan tanpa dipengaruhi oleh status perkawinannya.

B. Sistem Layanan Perlindungan

Dalam perspektif pengarusutamaan gender (PUG), sistem layanan perlindungan tidak hanya diukur dari jumlah kasus yang berhasil ditangani, tetapi juga dari sejauh mana layanan tersebut dapat diakses secara mudah, aman, inklusif, dan memberikan perlindungan yang setara bagi perempuan, laki-laki, anak perempuan, maupun anak laki-laki sesuai dengan kebutuhan dan kerentanannya masing-masing. Oleh karena itu, penyajian data mengenai layanan perlindungan menjadi penting untuk memberikan gambaran mengenai kondisi kekerasan yang terjadi, kelompok yang paling terdampak, serta kapasitas sistem perlindungan yang telah dibangun oleh pemerintah bersama aparat penegak hukum, lembaga layanan, dan berbagai pemangku kepentingan dalam mewujudkan lingkungan yang aman, adil, dan bebas dari segala bentuk kekerasan.

Berikut tersaji data mengenai Jumlah Perempuan dan Anak Bermasalah Hukum yang ditangani UPPA Polrestabes Kota Semarang sepanjang tahun 2025.

Tabel 35. Jumlah Perempuan dan Anak Bermasalah Hukum di PPA Polrestabes Tahun 2025

NO	URAIAN	L	P	JML	KETERANGAN
1	Korban anak	7	39	46	Laki – Laki = - 4 Orang Korban Kekerasan Fisik Terhadap Anak - 3 Orang Korban TPKS Perempuan = - 2 Orang Korban Kekerasan Fisik Terhadap Anak - 37 Orang Korban TPKS
2	Korban perempuan	-	18	18	- 6 Orang Korban KDRT - 12 Orang Korban TPKS

Sumber : PPA Polrestabes Kota Semarang

Data Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (PPA) Polrestabes Kota Semarang menunjukkan bahwa sepanjang tahun pelaporan terdapat 64 korban yang ditangani, terdiri dari 46 korban anak dan 18 korban perempuan dewasa. Pada kelompok korban anak, terdapat 39 perempuan (84,8%) dan 7 laki-laki (15,2%), sedangkan seluruh korban perempuan dewasa berjumlah 18 orang. Berdasarkan jenis kasus, korban anak laki-laki terdiri atas 4 korban kekerasan fisik terhadap anak dan 3 korban tindak pidana kekerasan seksual (TPKS). Sementara itu, pada kelompok anak perempuan terdapat 2 korban kekerasan fisik dan 37 korban TPKS. Adapun pada kelompok perempuan dewasa, terdapat 6 korban KDRT dan 12 korban TPKS. Data tersebut menunjukkan bahwa Unit PPA memiliki

peran penting dalam memberikan perlindungan dan penanganan terhadap perempuan dan anak sebagai kelompok yang rentan menjadi korban tindak pidana, khususnya kekerasan berbasis gender.

Dari perspektif gender, terlihat adanya ketimpangan yang cukup besar pada korban tindak pidana kekerasan seksual, di mana perempuan menjadi kelompok yang paling terdampak. Dari total 52 korban TPKS, sebanyak 49 korban (94,2%) merupakan perempuan, terdiri atas 37 anak perempuan dan 12 perempuan dewasa, sedangkan korban laki-laki hanya 3 anak. Kondisi ini menunjukkan bahwa kekerasan seksual masih didominasi oleh korban perempuan, baik pada usia anak maupun dewasa. Tingginya jumlah korban perempuan mengindikasikan bahwa relasi kuasa yang tidak setara, diskriminasi berbasis gender, serta kerentanan perempuan terhadap berbagai bentuk kekerasan seksual masih menjadi tantangan dalam mewujudkan lingkungan yang aman dan setara.

Sementara itu, pada kasus kekerasan fisik terhadap anak, korban laki-laki tercatat lebih banyak dibandingkan perempuan, yaitu 4 laki-laki dan 2 perempuan. Meskipun jumlahnya relatif kecil, kondisi ini menunjukkan bahwa anak laki-laki juga memiliki kerentanan terhadap tindak kekerasan fisik. Dengan demikian, upaya perlindungan anak perlu memperhatikan kebutuhan perlindungan bagi anak laki-laki maupun perempuan, karena bentuk kekerasan yang dialami keduanya dapat berbeda sesuai dengan konstruksi sosial gender yang berkembang di masyarakat.

Data ini memperlihatkan bahwa isu perlindungan perempuan dan anak tidak hanya berkaitan dengan penegakan hukum setelah terjadinya tindak pidana, tetapi juga menuntut penguatan upaya pencegahan melalui edukasi masyarakat, penguatan sistem perlindungan di lingkungan keluarga, sekolah, dan komunitas, serta peningkatan koordinasi antara aparat penegak hukum, pemerintah daerah, dan lembaga layanan

perlindungan perempuan dan anak. Pendekatan yang responsif gender diperlukan agar kebijakan dan program perlindungan mampu menjawab kerentanan yang berbeda antara perempuan, laki-laki, anak perempuan, dan anak laki-laki, sehingga setiap korban memperoleh akses terhadap keadilan, perlindungan, dan pemulihan secara setara.

Penanganan terhadap perempuan dan anak yang berhadapan dengan hukum merupakan bagian penting dari upaya perlindungan hak asasi manusia serta penyelenggaraan pelayanan yang responsif gender. Perempuan dan anak memiliki kerentanan yang berbeda ketika berhadapan dengan proses hukum, baik sebagai korban, saksi, maupun pihak yang berkonflik dengan hukum. Oleh karena itu, penanganan yang dilakukan tidak hanya berorientasi pada penyelesaian perkara, tetapi juga mencakup pemberian perlindungan, pendampingan, pemulihan, serta pemenuhan hak-hak korban sesuai dengan kebutuhan masing-masing. Dalam perspektif gender, layanan penanganan ini diharapkan mampu memberikan perlakuan yang adil, non-diskriminatif, dan memperhatikan perbedaan pengalaman serta kerentanan perempuan, anak perempuan, dan anak laki-laki, sehingga proses hukum dapat berlangsung dengan tetap menjunjung tinggi prinsip perlindungan dan keadilan.

**Tabel 36. Kegiatan Penanganan Anak Bermasalah Hukum
Tahun 2025**

NO	MITRA	PERAN
1	UPTD PPA	Melakukan pendampingan korban selama tahap penyidikan sampai dengan sidang di Pengadilan Negeri.
2	DP3A	Memberikan bantuan rumah aman (Shelter) dan bantuan pemeriksaan psikologis terhadap korban.
3	BAPAS KELAS 1	Memberikan hasil penelitian kemasyarakatan anak yang berkonflik hukum dalam tingkat penyidikan serta memberikan pertimbangan dalam pelaksanaan diversi pelaku anak.
4	RUMAH SAKIT	Melakukan pemeriksaan Visum et Repertum serta dalam hal pemulihan korban.
5	DINAS SOSIAL	Melakukan pendampingan korban dan saksi anak yang dilaksanakan oleh peksos.
6	KEJAKSAAN	Dalam melakukan penuntutan terhadap pelaku kekerasan terhadap anak.
7	PENGADILAN	Dalam pemeriksaan di sidang pengadilan terhadap pelaku kekerasan terhadap anak, mengeluarkan penetapan diversi pelaku anak.
8	LBH	Pendampingan pelaku anak yang berhadapan dengan hukum.

Sumber : PPA Polrestabes Kota Semarang

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Rangkaian data menunjukkan bahwa pembangunan yang responsif gender telah mengalami perkembangan yang positif di berbagai sektor. Hal tersebut tercermin dari semakin membaiknya Indeks Ketimpangan Gender (IKG) yang terus menurun dan meningkatnya Indeks Pembangunan Gender (IPG), yang menunjukkan bahwa kesenjangan pembangunan antara laki-laki dan perempuan semakin berkurang. Berbagai indikator pembangunan manusia, seperti pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan ekonomi juga memperlihatkan tren peningkatan pada kedua kelompok, meskipun masih terdapat beberapa kesenjangan yang memerlukan perhatian lebih lanjut.

Pada bidang kependudukan, data menunjukkan bahwa jumlah kepala keluarga laki-laki masih lebih besar dibandingkan kepala keluarga perempuan. Namun demikian, keberadaan rumah tangga yang dikepalai perempuan menjadi perhatian penting dalam perencanaan pembangunan karena kelompok tersebut berpotensi menghadapi tantangan ekonomi maupun sosial yang berbeda dibandingkan rumah tangga lainnya. Oleh karena itu, data kependudukan yang terpilah menurut jenis kelamin menjadi dasar penting dalam penyusunan kebijakan yang lebih tepat sasaran.

Pada bidang pendidikan, akses pendidikan bagi laki-laki dan perempuan secara umum telah menunjukkan kondisi yang semakin setara. Bahkan pada beberapa indikator, seperti Angka Partisipasi Sekolah (APS), Angka Partisipasi Kasar (APK), dan Angka Partisipasi Murni (APM) pada jenjang menengah hingga perguruan tinggi, perempuan menunjukkan capaian yang lebih baik dibandingkan laki-laki. Hal ini mencerminkan

meningkatnya kesempatan perempuan dalam memperoleh pendidikan, meskipun upaya pencegahan putus sekolah serta peningkatan keberlanjutan pendidikan bagi kedua kelompok tetap perlu diperkuat.

Pada bidang kesehatan, berbagai indikator menunjukkan peningkatan kualitas pelayanan kesehatan masyarakat, seperti meningkatnya angka harapan hidup, tingginya cakupan pelayanan kesehatan ibu dan anak, serta semakin luasnya akses masyarakat terhadap pelayanan kesehatan dasar. Meskipun demikian, masih terdapat tantangan berupa kematian ibu, kelahiran bayi dengan berat badan lahir rendah, serta tingginya jumlah kunjungan pelayanan kesehatan yang memerlukan penguatan upaya promotif, preventif, dan pelayanan kesehatan yang responsif gender sepanjang siklus kehidupan.

Pada bidang ketenagakerjaan dan ekonomi, partisipasi perempuan dalam dunia kerja terus meningkat, namun kesenjangan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) dan pengeluaran riil per kapita menunjukkan bahwa kesempatan ekonomi antara laki-laki dan perempuan belum sepenuhnya setara. Perempuan juga telah menunjukkan kontribusi yang besar dalam lingkungan pemerintahan, terutama pada jabatan fungsional dan beberapa sektor pelayanan publik. Namun demikian, keterwakilan perempuan pada posisi pengambil keputusan strategis masih perlu terus diperkuat agar tercipta keseimbangan dalam proses perumusan kebijakan.

Pada bidang perlindungan perempuan dan anak, masih ditemukannya kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak menunjukkan bahwa perlindungan terhadap kelompok rentan masih menjadi tantangan pembangunan daerah. Berbagai bentuk kekerasan yang terjadi menegaskan pentingnya penguatan sistem pencegahan, penanganan, rehabilitasi, serta peningkatan kesadaran masyarakat dalam menciptakan lingkungan yang aman dan bebas dari kekerasan.

Secara keseluruhan, Profil Gender Kota Semarang Tahun 2025 menunjukkan bahwa pelaksanaan Pengarusutamaan Gender (PUG) telah memberikan dampak positif terhadap pembangunan daerah. Namun demikian, penyediaan data yang semakin lengkap, terpilah menurut jenis kelamin, usia, disabilitas, dan karakteristik lainnya masih menjadi kebutuhan penting untuk mendukung penyusunan kebijakan yang lebih tepat sasaran, inklusif, dan berkeadilan.

5.2 Saran

Sebagai upaya meningkatkan kualitas pembangunan yang responsif gender di Kota Semarang, diperlukan penguatan pelaksanaan Pengarusutamaan Gender pada seluruh perangkat daerah melalui integrasi perspektif gender dalam perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi pembangunan.

Pemerintah Kota Semarang perlu terus meningkatkan kualitas data gender dan data terpilah sebagai dasar penyusunan kebijakan berbasis bukti (evidence-based policy). Penyediaan data menurut jenis kelamin, usia, disabilitas, status sosial ekonomi, dan karakteristik lainnya perlu menjadi bagian dari sistem statistik sektoral daerah sehingga analisis gender dapat dilakukan secara lebih komprehensif.

Di bidang pendidikan, diperlukan upaya mempertahankan tingginya akses pendidikan bagi perempuan sekaligus meningkatkan keberlanjutan pendidikan bagi anak laki-laki pada jenjang menengah dan pendidikan tinggi melalui pencegahan putus sekolah, pemberian bantuan pendidikan, penguatan pendidikan vokasi, serta peningkatan kualitas layanan pendidikan yang inklusif.

Di bidang kesehatan, perlu terus diperkuat pelayanan kesehatan ibu, bayi, remaja, dan lanjut usia melalui peningkatan kualitas pelayanan

kesehatan reproduksi, deteksi dini komplikasi kehamilan, penurunan angka kematian ibu dan bayi, pengendalian penyakit tidak menular, serta penguatan promosi perilaku hidup bersih dan sehat.

Di bidang ketenagakerjaan dan ekonomi, Pemerintah Kota Semarang diharapkan terus memperluas kesempatan kerja yang setara bagi perempuan dan laki-laki, meningkatkan akses perempuan terhadap pelatihan keterampilan, kewirausahaan, ekonomi digital, pembiayaan usaha, serta memperkuat kebijakan yang mendukung keseimbangan antara kehidupan keluarga dan pekerjaan sehingga kesenjangan partisipasi ekonomi dapat semakin diperkecil.

Pada bidang pengambilan keputusan, perlu terus didorong peningkatan representasi perempuan dalam jabatan strategis, kepemimpinan birokrasi, organisasi masyarakat, dan lembaga politik melalui pengembangan kapasitas, sistem pembinaan karier yang adil, serta kebijakan yang mendukung kesetaraan kesempatan dalam kepemimpinan.

Sementara itu, pada bidang perlindungan perempuan dan anak, diperlukan penguatan sinergi antara pemerintah daerah, aparat penegak hukum, lembaga layanan, dunia pendidikan, organisasi masyarakat, serta keluarga dalam mencegah dan menangani berbagai bentuk kekerasan. Edukasi mengenai kesetaraan gender, pengasuhan positif, perlindungan anak, serta peningkatan akses layanan pengaduan dan pendampingan korban perlu terus diperluas hingga tingkat kelurahan dan masyarakat.

Melalui berbagai upaya tersebut, diharapkan pembangunan Kota Semarang ke depan semakin mampu mewujudkan kesetaraan gender, perlindungan hak perempuan dan anak, pemberdayaan masyarakat, serta pembangunan yang inklusif, berkeadilan, dan berkelanjutan, sehingga seluruh warga, baik laki-laki maupun perempuan, memperoleh

kesempatan, akses, partisipasi, kontrol, dan manfaat pembangunan secara setara.

DAFTAR PUSTAKA

- Nassaruddin Umar, Argumen Kesetaraan Gender, (Jakarta: Dian Rakyat, 2010)
- Iswah Adriana, Kurikulum Berbasis Gender, Tadrîs. Volume 4. Nomor 1. 2009.
- Dwi Narwoko dan Bagong Yuryanto, Sosiologi Teks Pengantar dan Terapan, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2004).
- Mansour Fakih, Analisis Gender & Transformasi Sosial, (Yogyakarta: INSISTPress, 2016).
- Dede Wiliam, Gender Bukan Tabu: Catatan Perjalanan Fasilitasi Kelompok Perempuan di Jambi, (Bogor: Center for International Forestry Research CIFOR, 2006).
- Rosmarie Putnam Tong, Feminist Thought: Pengantar Paling Komprehensif kepada Aliran Utama Pemikiran Feminis, terj. Auarini Priyatna Prabasmono (Yogyakarta: Jalasutra, 1998).
- Wewen Kusumi Rahayu, "Analisis Pengarusutamaan Gender dalam Kebijakan Publik", JAKPP (Jurnal Analisis Kebijakan dan Pelayanan Publik), 1(Juni, 2016).
- Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender Dalam Pembangunan Nasional, Jakarta: Kementrian Pemberdayaan Perempuan, 2000.

Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2010 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender Di Madrasah Kementerian Agama Republik Indonesia, Jakarta: Kementrian Pemberdayaan Perempuan, 2010.

Sri Djoharwinarli, Dilema Kesetaraan Gender: Refleksi dan Respons Praksis, (Yogyakarta: PolGov Fisipol UGM, 2012).